BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



MEI
2021

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT

Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT

[0380] 832-364/827-916 ; fax : [0380] 822-103

www.bi.go.id

Kata Pengantar

Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat KPw BI NTT) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi kebijakan moneter. Secara triwulanan, KPw BI NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam kaitan perumusan kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/analisis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi eksternal *stakeholder* setempat, yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta *stakeholder* lainnya.

Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro Regional, Keuangan Pemerintah Daerah, Perkembangan Inflasi, Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun laporan ini digunakan data yang berasal dari internal Bank Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran, kritik, dan masukan sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, kiranya dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

Kupang, Mei 2021
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ttd.

I Nyoman Ariawan Atmaja
Deputi Direktur

Daftar Isi

Halaman Judul ----- i
Kata Pengantar ----- ii
Daftar Isi ----- iii
Ringkasan Eksekutif ----- iv
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur ----- v

BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL
1.1 Kondisi Umum ----- 1
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran ----- 4
1.2.1. Konsumsi ----- 4
1.2.2. Investasi ----- 8
1.2.3. Ekspor dan Impor ----- 11
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha ----- 13
1.3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ----- 13
1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -- 15
1.3.3. Konstruksi ----- 17
1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya ----- 19

BOKS 1. DAMPAK BADAI SIKLON SEROJA TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ----- 22

BOKS 2. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS GARAM DI KAB. KUPANG ----- 27

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 Kondisi Umum ----- 33
2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT ----- 35
2.2.1. Pendapatan APBD Provinsi NTT ----- 35
2.2.2. Belanja APBD Provinsi NTT ----- 37
2.3 APBD Kabupaten/Kota ----- 39
2.3.1. Pendapatan APBD Kabupaten/Kota ----- 39
2.3.2. Belanja APBD Kabupaten/Kota ----- 42
2.4 APBN di Provinsi NTT ----- 44

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI
3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum ----- 46
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas ----- 47
3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau ----- 48
3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki ----- 49
3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT ----- 49
3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan RT ----- 50
3.2.5 Kelompok Kesehatan ----- 51
3.2.6 Kelompok Transportasi ----- 51
3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan ----- 52
3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya ----- 52
3.2.9 Kelompok Pendidikan ----- 53
3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran ----- 53
3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya ----- 54
3.3. Inflasi Berdasarkan Kota ----- 54

3.3.1 Inflasi Kota Kupang ---- 54
3.3.2 Inflasi Kota Maumere ---- 55
3.3.3 Inflasi Kota Waingapu ---- 55
3.4. *Tracking* dan Proyeksi Inflasi Triwulan I 2021 ---- 56
3.5 Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID ---- 57

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH
4.1. Kondisi Umum ---- 58
4.1.1. Kinerja Bank Umum ---- 58
4.1.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga ---- 59
4.1.3. Penyaluran Kredit ---- 60
4.2. Kinerja Korporasi Nonkeuangan ---- 62
4.2.1. Kondisi dan Prospek Usaha ---- 62
4.2.2. Penyaluran Kredit Korporasi ---- 62
4.3. Kinerja Keuangan Rumah Tangga ---- 63
4.3.1. Kondisi Rumah Tangga ---- 63
4.3.2. Penghimpunan DPK Rumah Tangga ---- 64
4.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga ---- 64
4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM ---- 65
4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM ---- 65

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH
5.1. Kondisi Umum ---- 67
5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Provinsi NTT ---- 67
5.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai di Provinsi NTT ---- 67
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas di Provinsi NTT ---- 68
5.2.2.1 Layanan Kas Titipan ---- 68
5.2.2.2 Uang Tidak Layak Edar ---- 69
5.2.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai di Provinsi NTT ---- 70
5.2.3.1 Transaksi SKNBI ---- 70
5.2.3.2 Transaksi BI RTGS ---- 70
5.3. Perkembangan Inklusi Keuangan di Provinsi NTT ---- 71
5.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ---- 71
5.3.2. Perkembangan Transaksi Elektronik ---- 73
5.3.3. Upaya Elektronifikasi ---- 73
5.4. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran ---- 75
5.3.1. Sistem Pembayaran Tunai ---- 75
5.3.2. Sistem Pembayaran Non Tunai ---- 76

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
6.1. Kondisi Umum ---- 77
6.2. Perkembangan Ketenagakerjaan ---- 77
6.3. Perkembangan Kesejahteraan ---- 81

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT ---- 83
7.2. Prospek Inflasi Provinsi NTT ---- 87

Ringkasan Eksekutif
Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur Mei 2021

✓ EKONOMI MAKRO REGIONAL

Ekonomi Provinsi NTT berangsur pulih sebagaimana tercermin pada kinerja perekonomian triwulan I 2021 yang tumbuh 0,12% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 2,27% (yoy). Vaksinasi yang telah dimulai sejak awal tahun mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi pengeluaran, pemulihan bersumber dari investasi dan konsumsi swasta. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sekaligus merupakan LU utama. Kinerja perekonomian NTT pada triwulan II 2021 diprakirakan terus melanjutkan tren pemulihan. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi serta momen HBKN berpotensi semakin mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan mobilitas.

✓ KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kinerja belanja yang meningkat terutama bersumber dari belanja modal APBN, seiring dengan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja belanja Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten (APBD) menurun, seiring dengan refocusing anggaran dan migrasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kinerja pendapatan (APBD) juga menurun, seiring dengan penyesuaian Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, serta kinerja PAD yang menurun.

✓ PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2021 tercatat sebesar 0,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,61% (yoy). Namun demikian, inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,37% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga ikan-ikan segar, seperti ikan kembung, tongkol dan tembang akibat produksi yang berkurang di tengah gelombang tinggi dan cuaca laut yang buruk. Kelompok makanan, minuman dan

tembakau juga masih menjadi faktor pendorong inflasi, terutama akibat kenaikan harga berbagai jenis ikan segar.

✓ STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 masih terjaga. Profitabilitas dan fungsi intermediasi sedikit menurun, seiring dengan konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. DPK tumbuh sebesar 3,65% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, ditopang oleh tabungan masyarakat perseorangan yang meningkat. Namun penyaluran kredit melambat, dengan pertumbuhan sebesar 3,60% (yoy). Kredit usaha korporasi mencatat pertumbuhan yang tinggi sebesar 39,61% (yoy). Namun demikian, kredit usaha UMKM terkontraksi sebesar 2,05% (yoy). Secara keseluruhan, kualitas kredit secara keseluruhan masih terjaga, dengan NPL (gross) sebesar 1,93%.

✓ PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pembayaran tunai mengalami kondisi net inflow sesuai pola historis awal tahun pasca berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sistem pembayaran nilai besar BI-RTGS mengalami perbaikan, sementara nilai kecil SKNBI masih tertahan.

✓ KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Februari 2021 tercatat sebesar 2,88 juta orang, meningkat 6,99% dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat meningkat menjadi sebesar 3,38%. Meskipun demikian, kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Agustus 2020. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan I 2021 tercatat masih rendah sebesar 94,65. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2020 tercatat sebesar 21,21%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

✓ PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0.83% (yoy). Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 ditopang oleh peningkatan investasi, perbaikan kinerja konsumsi masyarakat, serta percepatan peran fiskal sebagai countercyclical. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan didorong oleh LU utama kecuali LU Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan yang sedikit tertahan akibat dampak dampak badai siklon Seroja. Pada akhir tahun 2021, inflasi Provinsi NTT diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi tahun 2020 sebesar 0,61% (yoy). Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat terutama didorong oleh membaiknya permintaan domestik seiring dampak kebijakan PEN, peningkatan aktivitas ekonomi pasca vaksinasi, serta keyakinan konsumen yang meningkat. Sementara itu, Siklon Seroja pada awal April 2021 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kerusakan lahan pertanian, kematian binatang ternak, kerusakan kapal tangkap, dan kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu dan tempe.

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur

I. EKONOMI MAKRO REGIONAL

INDIKATOR	2018	2019				2019	2020				2020	2021
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Berdasarkan Lapangan Usaha - Harga Berlaku												
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp)	**98.930**	**24.760**	**26.500**	**27.380**	**28.087**	**106.728**	**25.958**	**26.037**	**26.997**	**27.514**	**106.506**	**26.010**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.035	6.685	7.732	7.588	7.800	29.804	7.057	7.807	7.652	7.853	30.370	7.654
Pertambangan dan Penggalian	1.202	303	306	313	327	1.250	287	285	290	293	1.155	293
Industri Pengolahan	1.253	339	346	353	368	1.405	335	341	339	352	1.367	309
Pengadaan Listrik dan Gas	75	18	18	18	21	76	21	21	21	23	85	22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54	14	14	14	14	57	14	15	15	16	60	17
Konstruksi	10.745	2.626	2.749	2.950	3.282	11.606	2.646	2.460	2.615	2.733	10.454	2.523
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.025	2.835	3.013	3.210	3.209	12.266	3.153	2.835	2.940	2.961	11.888	3.054
Transportasi dan Pergudangan	5.459	1.360	1.474	1.493	1.506	5.834	1.433	1.062	1.181	1.241	4.917	1.178
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	757	192	205	207	201	806	174	118	138	163	594	136
Informasi dan Komunikasi	6.570	1.716	1.737	1.807	1.818	7.078	1.821	2.006	2.048	2.048	7.924	2.040
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.072	1.082	1.017	1.106	1.101	4.307	1.112	1.123	1.173	1.232	4.640	1.246
Real Estate	2.475	617	623	620	620	2.480	615	586	619	607	2.426	591
Jasa Perusahaan	292	72	75	80	79	306	76	37	38	40	191	40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.232	3.354	3.603	3.749	3.869	14.573	3.503	3.758	3.965	3.966	15.192	3.348
Jasa Pendidikan	9.436	2.438	2.454	2.720	2.674	10.286	2.505	2.504	2.867	2.860	10.737	2.435
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.151	568	574	576	609	2.328	624	625	645	667	2.560	666
Jasa lainnya	2.098	542	561	577	588	2.267	582	455	450	460	1.947	456
Berdasarkan Pengeluaran (Harga Berlaku)												
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp)	**98.930**	**24.760**	**26.500**	**27.380**	**28.087**	**106.728**	**25.958**	**26.037**	**26.997**	**27.514**	**106.506**	**26.010**
Konsumsi Rumah Tangga	71.254	18.361	19.271	19.142	20.118	76.891	19.569	18.455	18.264	18.339	74.627	18.062
Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)	3.287	879	930	859	894	3.562	868	814	882	896	3.460	869
Konsumsi Pemerintah	29.099	4.253	6.759	8.868	9.965	29.845	4.471	6.189	7.383	9.500	27.543	3.697
Pembentukan Modal Tetap Bruto	47.466	11.352	11.939	13.574	14.442	51.307	11.541	11.129	12.598	12.301	47.569	11.340
Perubahan Inventori	884	221	260	263	266	1.009	266	278	282	279	1.106	273
Ekspor Luar Negeri	2.072	352	300	405	533	1.590	314	142	237	380	1.072	179
Impor Luar Negeri	-1.918	-278	-238	-337	-297	-1.150	-394	-93	-31	-87	-605	-208
Net Ekspor Antar Wilayah	-53.214	-10.378	-12.720	-15.393	-17.835	-56.327	-10.677	-10.876	-12.618	-14.093	-48.265	-8.203
Data Ekspor Impor di Provinsi NTT												
Nilai Ekspor Nonmigas (ribu USD)	59.993	9.904	5.318	12.570	24.877	52.669	11.780	3.980	8.450	19.104	43.314	3.741
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD)	95.510	832	2.208	720	4.365	8.125	9.101	6	415	277	9.799	970

II. INFLASI

INDIKATOR	2018				2019				2020				2021
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)													
NTT	2,26	2,89	1,90	3,07	2,12	1,35	2,06	0,67	1,65	1,57	1,10	0,61	0,78
- Kota Kupang	2,19	3,00	1,96	3,23	2,33	1,30	2,23	0,50	1,70	1,28	0,23	0,29	0,56
- Kota Maumere	2,63	2,12	1,50	2,00	0,69	1,73	0,84	1,84	2,07	0,67	2,69	2,24	2,76
- Kota Waingapu									7,34	5,24	1,07	1,52	0,52

III. PERBANKAN

INDIKATOR	2018				2019				2020				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain)													
1. Total Aset	34.878	38.891	36.851	37.017	37.265	40.849	42.870	42.943	43.917	46.159	48.994	44.857	45.497
2. DPK	25.012	26.865	26.658	25.098	25.680	28.817	28.748	29.497	29.651	31.154	33.605	30.085	30.739
- Giro	5.468	6.297	5.577	3.478	5.798	7.676	5.926	4.392	5.614	6.408	7.616	3.672	4.904
- Tabungan	12.617	13.369	13.784	15.463	13.531	14.306	14.386	16.364	14.665	15.605	16.549	17.992	16.518
- Deposito	6.928	7.200	7.297	6.157	6.351	6.835	8.436	8.741	9.372	9.141	9.441	8.421	9.317
3. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor	25.817	26.681	28.011	28.694	29.136	30.481	32.794	32.205	32.521	32.699	33.751	34.297	34.824
- Modal Kerja	7.815	8.410	8.739	8.999	8.988	9.739	10.571	10.292	10.293	11.394	11.077	11.385	11.716
- Investasi	1.991	2.077	2.172	2.234	2.531	2.590	3.089	2.578	2.653	3.225	2.315	2.310	2.293
- Konsumsi	16.011	16.194	17.101	17.461	17.616	18.152	19.134	19.335	19.574	19.788	20.358	20.600	20.815
4. LDR (%)	103,22	99,31	105,08	114,33	113,46	105,78	114,08	109,18	109,68	104,96	100,43	114,00	113,29
5. Kredit UMKM	8.527	9.057	9.361	10.189	10.404	11.014	11.617	11.524	11.854	11.804	11.409	11.550	11.611

Bab I.

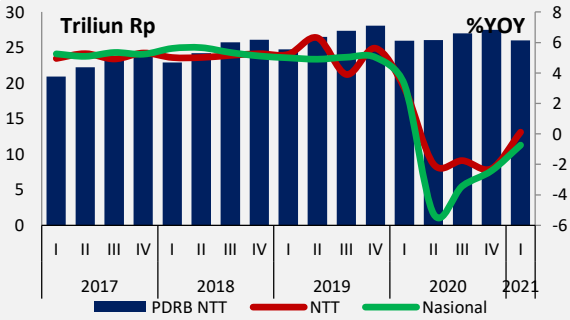
EKONOMI MAKRO REGIONAL

- Ekonomi Provinsi NTT berangsur pulih sebagaimana tercermin pada kinerja perekonomian triwulan I 2021 yang tumbuh 0,12% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 2,27% (yoy). Vaksinasi yang telah dimulai sejak awal tahun mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi pengeluaran, pemulihan bersumber dari investasi dan konsumsi swasta. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sekaligus merupakan LU utama. Perbaikan LU pertanian terjadi akibat tingginya curah hujan pada musim tanam Oktober Maret 2021 di tengah upaya Pemerintah meningkatkan produksi pertanian sebagai sektor strategis sehingga mendorong meningkatnya luas tanam dan luas panen tabama (tanaman bahan makanan) pada awal tahun 2021.
- Kinerja perekonomian NTT pada triwulan II 2021 diprakirakan terus melanjutkan tren pemulihan. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi serta momen HBKN berpotensi semakin mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan mobilitas. Dari sisi pengeluaran, pemulihan diperkirakan terutama bersumber dari Konsumsi RT, Investasi, dan Konsumsi Pemerintah. Dari sisi LU, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Jasa Pendidikan; dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menjadi pendorong utama pertumbuhan triwulan II 2021.

1.1 Kondisi Umum

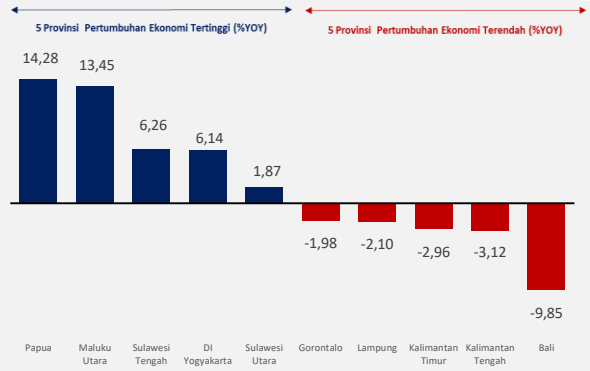
Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan I 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan tumbuh 0,12% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 2,27% (yoy). Pemulihan ekonomi NTT relatif lebih cepat dibandingkan dengan Nasional yang juga mengalami perbaikan meskipun masih terkontraksi 0,74% (yoy) pada triwulan I 2021. Perbaikan kinerja ekonomi Nasional dan Provinsi NTT sebagai dampak vaksinasi yang telah dimulai sejak awal tahun sehingga meningkatkan optimisme pelaku usaha dan konsumen. Dari sisi pengeluaran, pemulihan kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan I 2021 ditopang oleh investasi dan konsumsi swasta. Dari sisi lapangan usaha (LU), pemulihan ekonomi terutama bersumber dari perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan seiring tingginya curah hujan pada musim tanam Oktober 2020 – Maret 2021[1] yang mendorong peningkatan luas tanam dan luas panen pertanian tanaman pangan di tengah upaya Pemerintah menjalankan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dan *food estate* Kab. Sumba Tengah.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional Secara Triwulanan



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.2. Peringkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Pada Triwulan I 2021

Tabel 1.1. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran

Uraian	2020				2020	2021	Pangsa (Triwulan I 2021)
	I	II	III	IV		I	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.41	(4.40)	(2.38)	(3.88)	(1.64)	**(3.67)**	69.44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(2.72)	(13.10)	1.22	(1.06)	(4.04)	**(1.24)**	3.34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.54	(6.47)	(15.12)	(7.99)	(8.04)	**(15.74)**	14.22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.66	(7.74)	(8.07)	(16.07)	(8.29)	**(4.96)**	43.60
5. Perubahan Inventori	17.96	7.01	8.35	5.21	9.31	**2.27**	1.05
6. Ekspor Luar Negeri	(13.09)	(51.29)	(42.51)	(26.99)	(34.44)	**(50.21)**	3.76
7. Impor Luar Negeri	0.71	(19.47)	(17.62)	(18.88)	(14.87)	**(21.34)**	35.41
P D R B	**2.99**	**(1.98)**	**(1.75)**	**(2.27)**	**(0.83)**	**0.12**	**100.00**

Sumber: BPS, diolah

[1] Keterangan BMKG NTT pada bulan September 2020

Tabel 1.2. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2020				2020	2021	Pangsa (Triwulan I 2021)
		I	II	III	IV		I	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.08	(0.48)	0.55	0.95	0.96	**8.32**	29.43
B	Pertambangan dan Penggalian	(11.18)	(12.59)	(13.70)	(15.70)	(13.33)	**0.12**	1.13
C	Industri Pengolahan	(3.28)	(4.10)	(7.17)	(7.43)	(5.54)	**(9.03)**	1.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.50	11.76	17.18	6.78	12.29	**12.33**	0.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(2.00)	6.58	7.85	11.46	6.04	**21.02**	0.06
F	Konstruksi	(0.01)	(10.50)	(11.34)	(15.84)	(9.82)	**(5.91)**	9.70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.64	(7.97)	(10.70)	(8.93)	(5.96)	**(3.58)**	11.74
H	Transportasi dan Pergudangan	5.56	(23.36)	(16.28)	(13.43)	(12.16)	**(14.70)**	4.53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(10.25)	(43.14)	(33.61)	(19.40)	(26.92)	**(22.30)**	0.52
J	Informasi dan Komunikasi	6.13	15.36	13.55	12.68	11.96	**10.41**	7.84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.88	12.32	7.16	13.15	8.57	**11.54**	4.79
L	Real Estate	0.26	(5.58)	(0.83)	0.03	(1.54)	**(0.14)**	2.27
M,N	Jasa Perusahaan	0.87	(52.51)	(53.35)	(49.90)	(39.27)	**(47.64)**	0.15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.26	6.45	5.59	1.66	4.67	**(4.66)**	12.87
P	Jasa Pendidikan	(0.13)	(0.46)	3.85	3.93	1.89	**(1.91)**	9.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.67	5.45	5.08	(0.38)	4.38	**0.36**	2.56
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.63	(21.19)	(21.63)	(22.13)	(15.30)	**(21.59)**	1.76
P D R B		**2.99**	**(1.98)**	(1.75)	**(2.27)**	**(0.83)**	**0.12**	**100.00**

Sumber: BPS, diolah

Pada triwulan II 2021, akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT diprakirakan terus berlanjut seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh konsumsi RT, investasi dan konsumsi Pemerintah. Meningkatnya konsumsi RT seiring meningkatnya optimisme pada momen Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei 2021 dan vaksinasi yang terus berlanjut. Meningkatnya investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) berupa jalan dan bendungan, serta pengembangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Dari sisi LU, pertumbuhan diperkirakan bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Jasa Pendidikan, dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Akan tetapi, badai siklon tropis Seroja yang melanda Provinsi NTT serta berlanjutnya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Kupang dan Sumba Timur berpotensi menahan kinerja perekonomian Provinsi NTT.

1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

1.2.1 Konsumsi

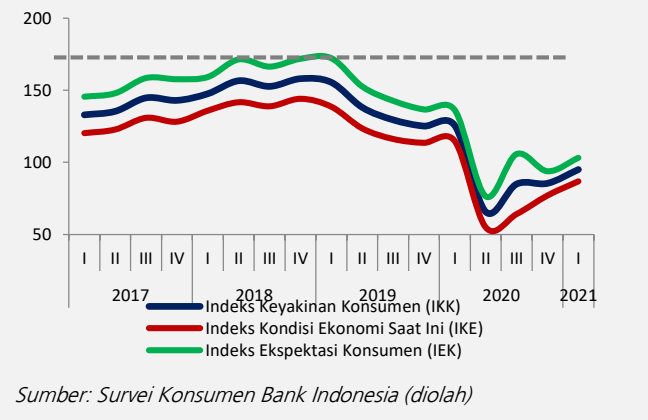
Pada triwulan I 2021, kinerja konsumsi Provinsi NTT secara agregat (rumah tangga, pemerintah, dan LNPRT) terkontraksi sebesar 5,62% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 5,03% (yoy). Perlambatan konsumsi bersumber dari konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT yang terkontraksi masing-masing sebesar 15,74% (yoy) dan 1,24% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi di triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 7,99% (yoy) dan 1,06% (yoy). Sementara itu, kinerja konsumsi RT mengalami perbaikan terbatas dari -3,88 (yoy) di triwulan IV 2020 menjadi -3,67% (yoy) pada triwulan I 2021.

Perbaikan kinerja konsumsi RT pada periode laporan didorong oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi pasca pelaksanaan vaksinasi. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan I 2021 mencapai 96,89, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 85,43. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi NTT telah dimulai sejak 15 Januari 2021 diawali oleh tenaga kesehatan (Tahap I) dan dilanjutkan dengan vaksinasi Tahap II pada periode 3 Maret 2021 untuk kelompok pelayan publik dan kelompok lanjut usia (lansia). Sampai dengan 23 Mei 2021[2], pemberian vaksin dosis pertama telah mencapai 25% dan dosis kedua mencapai 12% dari target sasaran tahap I (tenaga kesehatan) dan tahap II (Petugas Publik dan Lanjut Usia). Kegiatan vaksinasi diharapkan terus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 menuju terbentuknya *herd immunity* sehingga dapat memulihkan aktivitas masyarakat.

Membaiknya konsumsi RT juga terkonfirmasi dari peningkatan konsumsi listrik serta pengeluaran masyarakat di Provinsi NTT. Konsumsi listrik di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 tumbuh 15,16% (yoy) lebih tinggi dari triwulan IV 2020 yang sebesar 10,08% (yoy). Meningkatnya pengeluaran masyarakat di triwulan I 2021 tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia terutama kelompok pengeluaran suku cadang dan aksesori. Perbaikan konsumsi yang lebih tinggi tertahan akibat penerapan PPKM[3] di

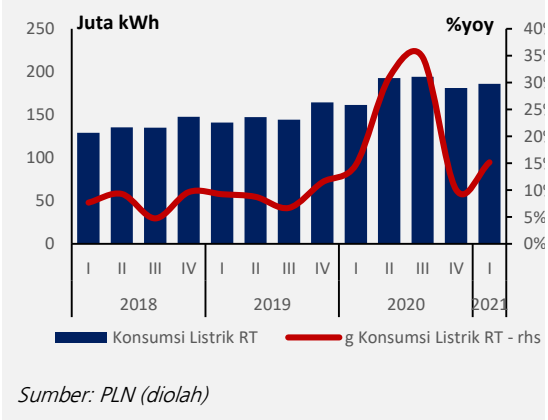
[2] Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 24 Mei 2021.

Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Timur yang mengakibatkan penurunan mobilitas pada awal tahun.



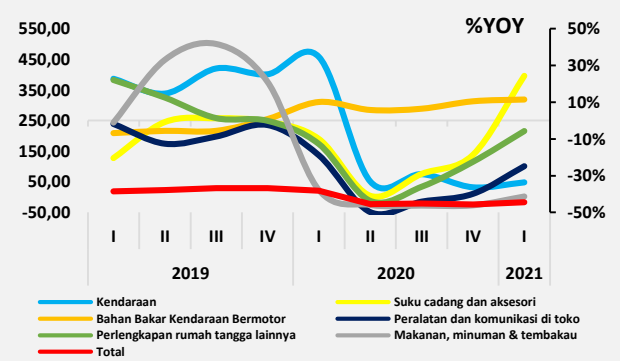
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



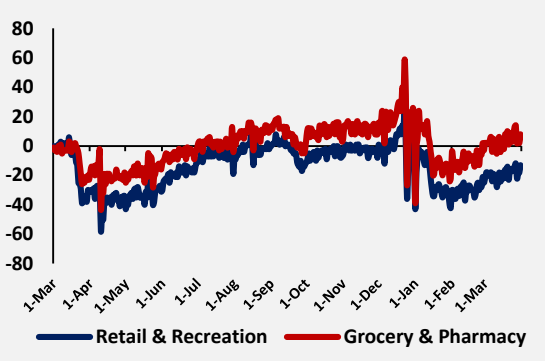
Sumber: PLN (diolah)

Grafik 1.4. Perkembangan Konsumsi Listrik RT Provinsi NTT



Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.5. Perkembangan Penjualan Eceran

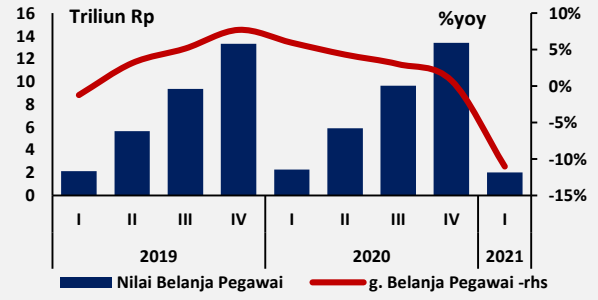


Sumber: Google Mobility Report

Grafik 1.6. Perkembangan Mobilitas Masyarakat

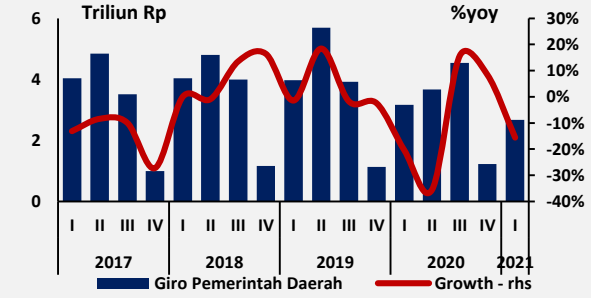
Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 15,74% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi sebesar 7,99% (yoy). Menurunnya kinerja konsumsi pemerintah akibat melambatnya realisasi anggaran Pemerintah di Provinsi NTT[4] di triwulan I 2021 terutama belanja pegawai. Pada triwulan I 2021 realisasi belanja pegawai tercatat 8,12% dari total anggaran atau melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang mencapai 9,44%. Pemerintah perlu terus mengakselerasi realisasi anggaran agar mampu berperan sebagai *countercyclical* perekonomian secara lebih optimal.

[4] APBN di Provinsi NTT, APBD Provinsi NTT, dan APBD 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT



Sumber: Kanwil DJPb dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Grafik 1.7. Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi NTT

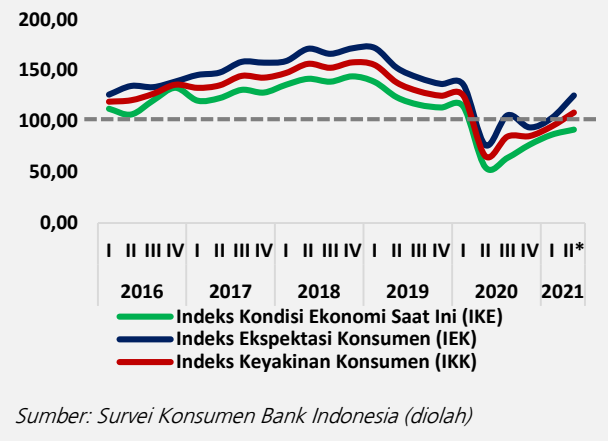


Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.8. Perkembangan Giro Pemerintah Daerah di Bank Umum

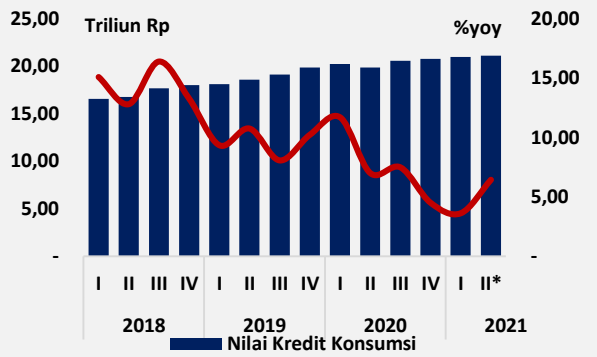
Kinerja konsumsi Provinsi NTT pada triwulan II 2021 diprakirakan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perbaikan konsumsi diperkirakan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi pasca vaksinasi dan berlanjutnya program perlindungan sosial oleh Pemerintah. Optimisme masyarakat tercermin dari IKK bulan April dan Mei 2021 sebesar 108,5 atau berada pada level optimis (indeks di atas 100) serta mobilitas masyarakat di sektor perdagangan melalui indeks rata-rata *Grocery and Pharmacy* yang meningkat dari -3.4 pada bulan Januari-Maret 2021, menjadi 17,2 pada periode April-Mei 2021. Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik berupa perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako BST, BLT dana desa, kartu prakerja) dan program padat karya diharapkan mampu menopang daya beli masyarakat di triwulan II 2021. Dalam upaya akselerasi penyaluran dana desa, Pemerintah pusat telah menerbitkan ketentuan[5] baru untuk menyederhanakan syarat pencairan BLT dana desa. Pemulihan konsumsi juga tercermin dari penyaluran kredit konsumsi pada April 2021 yang tumbuh 6,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode Januari s.d. Maret 2021.

[5] PMK Nomor 50/PMK.07/2020 pada tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.9. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen di Provinsi NTT



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.10. Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi Provinsi NTT

Kinerja ekonomi Provinsi NTT triwulan II 2021 berpotensi tertahan akibat badai Seroja dan berlanjutnya PPKM di beberapa Kabupaten/Kota. Badai siklon tropis Seroja pada April 2021 melanda 21 Kabupaten/Kota di NTT, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur termasuk perumahan warga. Diperkirakan sebanyak 65,935 rumah[6] mengalami kerusakan dan korban jiwa sebanyak 181 orang. Timbulnya korban jiwa dan kerusakan aset berpotensi menurunkan daya beli masyarakat akibat kehilangan sumber pendapatan atau penurunan nilai kekayaan. Sementara itu, berlanjutnya PPKM berpotensi menahan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan konsumsi

Kinerja konsumsi pemerintah triwulan II 2021 diprakirakan membaik, di tengah akselerasi belanja produktif pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Aakselerasi belanja pemerintah juga tercermin dari realisasi belanja barang pada triwulan I 2021 yang tumbuh sebesar 11,66% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 2,06% (yoy). Percepatan belanja dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi sebagai katalis aktivitas ekonomi daerah. Adapun prognosa /target realisasi APBN di triwulan II 2021 sebesar 47% dari total pagu anggaran, meningkat dibandingkan dengan realisasi APBN di triwulan II 2020 yang mencapai 34,11%[7].

[6] BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, posisi data tanggal 5 Mei 2021
[7] Keterangan DJPb dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi NTT pada Mei 2021

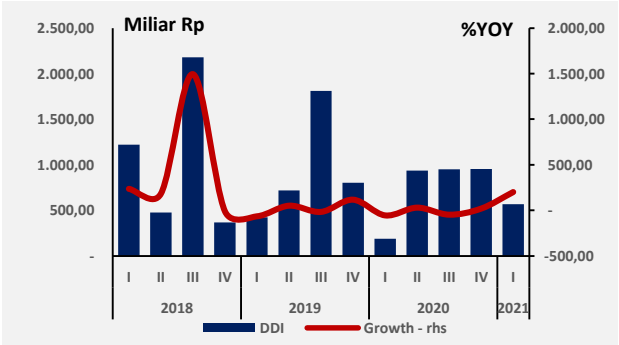


Sumber: Kanwil DJPb dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Grafik 1.11. Perkembangan Belanja Barang Pemerintah Provinsi NTT

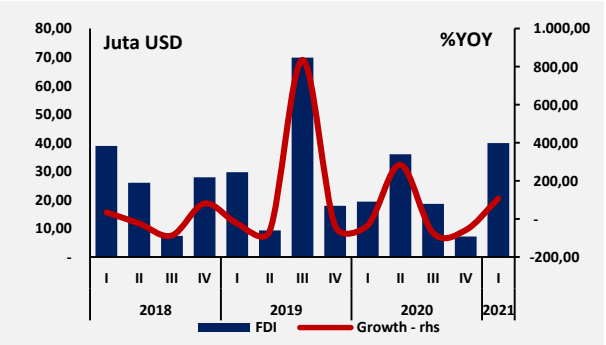
1.2.2 Investasi

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB/investasi) pada triwulan I 2021 terkontraksi 4,96% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 16,07% (yoy). Perbaikan kontraksi kinerja investasi pada triwulan laporan didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal baik APBN dan APBD di Provinsi NTT untuk pengerjaan PSN[8] antara lain Terminal Multipurpose Wae Kelambu (Labuan Bajo), Pelabuhan Kupang (Kota Kupang), Bandar Udara Komodo (Labuan Bajo), Bendungan Temef (Timor Tengah Selatan), Bendungan Manikin (Kabupaten Kupang), dan Bendungan Napun Gete (Sikka). Membaiknya investasi juga tercermin dari realisasi pengadaan semen di Provinsi NTT yang menunjukkan perbaikan dari -28,78% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi -2,98% (yoy) pada triwulan I 2021.



Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 1.12. Perkembangan PMDN Provinsi NTT



Sumber: BKPM (diolah)

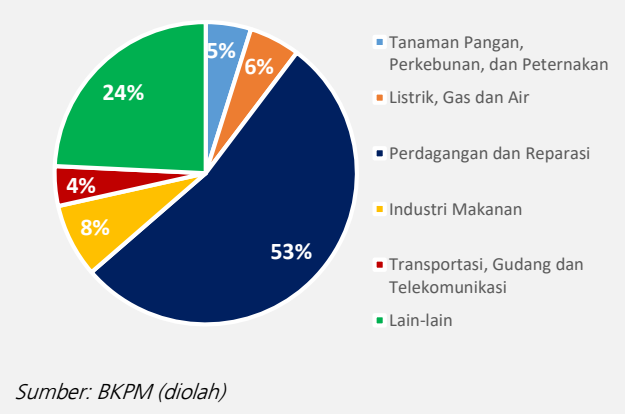
Grafik 1.13. Perkembangan PMA Provinsi NTT

[8] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional tanggal 17 November 2020

Kinerja PMTDB yang membaik di triwulan I 2021 didorong oleh meningkatnya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTT. Pada triwulan I 2021, nominal PMDN dan PMA tercatat masing-masing sebesar Rp566,8 miliar dan USD39,91 juta atau tumbuh 200,9% (yoy) dan 106% (yoy). Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dari triwulan IV 2020 di mana PMDN dan PMA masing-masing tumbuh sebesar 19,28% (yoy) dan -59,63% (yoy).

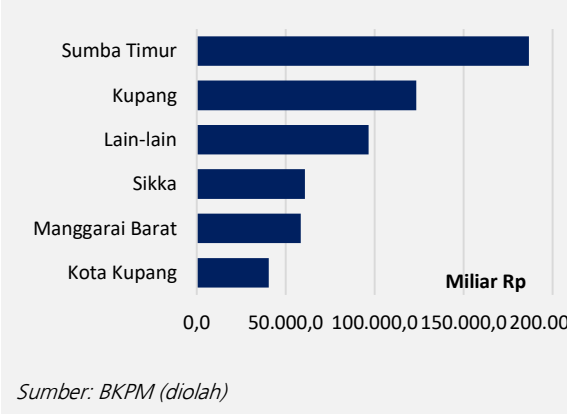
Berdasarkan sektornya, pertumbuhan PMDN terutama bersumber dari sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (51,9%), diikuti oleh sektor Perdagangan dan Reparasi (36,32%), serta sektor Transportasi, pergudangan dan Telekomunikasi (32,86%). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, serta pengembangan infrastruktur melalui pengembangan potensi baru sebagai sumber pendapatan daerah[9]. Secara spasial, realisasi PMDN terbesar terdapat di Kab. Sumba Timur yang mencapai Rp186,7 miliar (32%).

Adapun realisasi PMA pada triwulan I 2021 didominasi oleh sektor Perdagangan dan Reparasi sebesar 53%, diikuti oleh sektor Industri dan Makanan sebesar 8%. Di samping itu, wilayah spasial dengan realisasi PMA yang tertinggi adalah Kab. Ende yang mencapai USD20,9 juta (52,4%) pada sektor tenaga listrik, gas, dan air. Realisasi investasi Kab. Manggarai Barat pada triwulan I juga mencapai USD16,9 juta (42,46%) didominasi oleh sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Berdasarkan asal negaranya, Singapura dan Qatar menjadi negara investor terbesar di Provinsi NTT pada triwulan I 2021.



Sumber: BKPM (diolah)

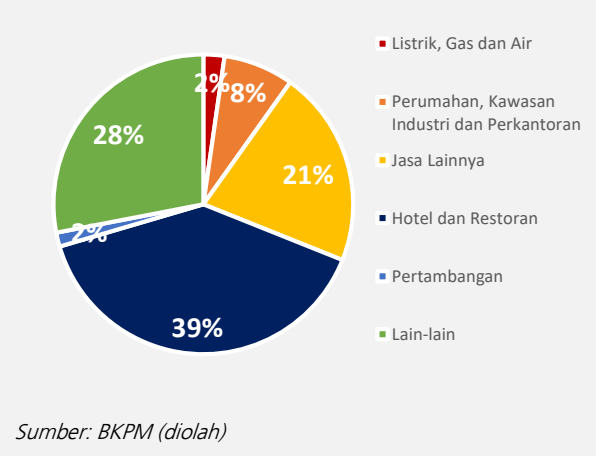
Grafik 1.14. Pangsa Sektoral PMDN Provinsi NTT Triwulan I 2021



Sumber: BKPM (diolah)

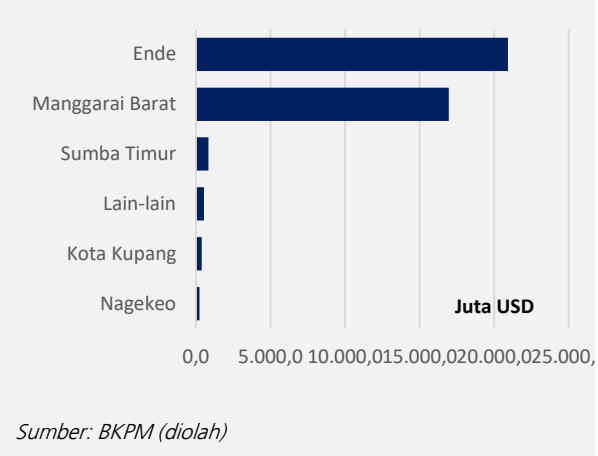
Grafik 1.15. PMDN Provinsi NTT Triwulan I 2021 Berdasarkan Kabupaten/Kota

[9] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023



Sumber: BKPM (diolah)

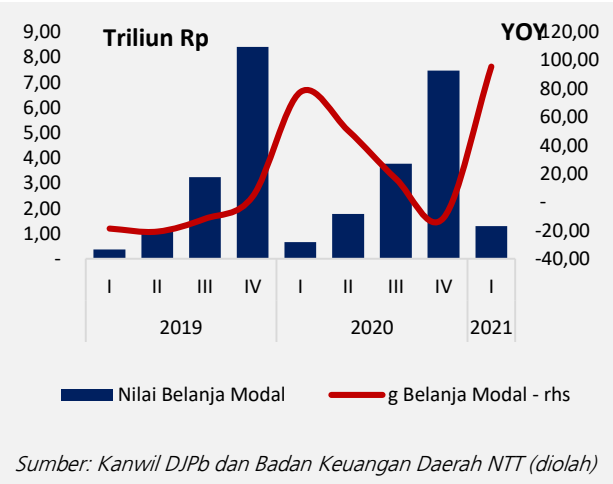
Grafik 1.16. Pangsa Sektoral PMA Provinsi NTT Triwulan I 2021



Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 1.17. PMA Provinsi NTT Triwulan I 2021 Berdasarkan Kabupaten/Kota

Pada triwulan II 2021, kinerja investasi di Provinsi NTT diprakirakan mengalami perbaikan. Optimisme pelaku usaha diprakirakan masih berlanjut, tercermin dari kenaikan *likert scale* investasi Provinsi NTT dari skala 0,00 pada triwulan I 2021 naik menjadi 0,5 pada triwulan II 2021 (sampai dengan Mei 2021). Pemulihan investasi pada triwulan II 2021 juga diperkirakan bersumber dari berlanjutnya akselerasi belanja modal Pemerintah. Pada triwulan I 2021 realisasi belanja modal Pemerintah mencapai 12,84% lebih tinggi dari triwulan I 2020 yang hanya 7,59%. Perbaikan investasi juga diperkirakan sejalan dengan hasil liaison omzet bahan konstruksi yang mengalami kenaikan dari 41,4% (yoy) pada triwulan I 2021 menjadi 10,35% (yoy) pada triwulan II 2021 (posisi Mei 2021).



Sumber: Kanwil DJPb dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Grafik 1.18. Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Provinsi NTT Triwulan I 2021



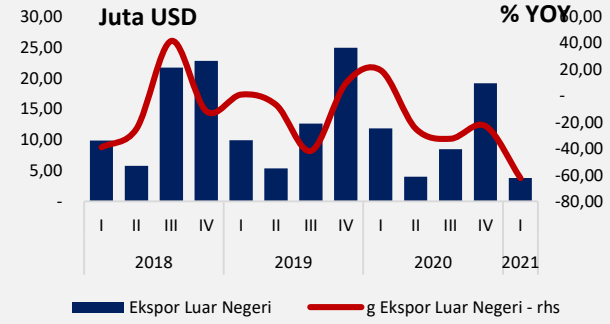
Sumber: Liaison Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.19. Perkembangan Omzet Bahan Konstruksi Provinsi NTT

1.2.3 Ekspor dan Impor

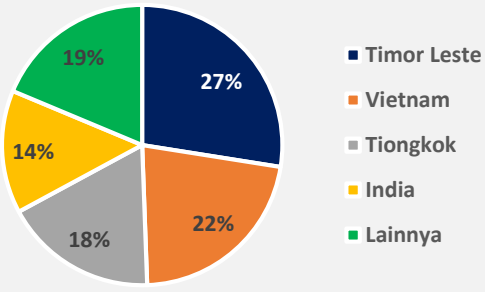
Defisit neraca perdagangan Provinsi NTT pada triwulan I 2021 terkontraksi 17,17% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -17,72%(yoy). Defisit neraca perdagangan bersumber dari net ekspor antar provinsi yang terkontraksi sebesar 16,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 17,15% (yoy).

Pada triwulan I 2021, ekspor luar negeri Provinsi NTT terkontraksi 43,80% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan IV 2020 sebesar 32,73% (yoy). Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekspor ke negara India dan Timor Leste yang terkontraksi masing-masing sebesar 75,32% (yoy) dan 50,83% (yoy). Pada triwulan I 2021, total ekspor luar negeri Provinsi NTT mencapai USD6,7 juta dengan negara tujuan utama adalah Timor Leste, Vietnam, dan Tiongkok. Komoditas ekspor utama Provinsi NTT didominasi kelompok buah-buahan, terutama mete dengan pangsa 36,94%. Pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) baik melalui PLBN[10] dan penutupan sementara kunjungan WNA ke Indonesia[11] juga memengaruhi kontraksi ekspor luar negeri Provinsi NTT di sektor jasa pariwisata. Pada triwulan I 2021, jumlah kedatangan wisman Provinsi NTT terkontraksi 99,85% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang mencapai 99,79% (yoy).



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.20. Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi NTT



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.21. Pangsa Negara Tujuan Utama Ekspor Provinsi NTT Triwulan I 2021

[10] Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020.

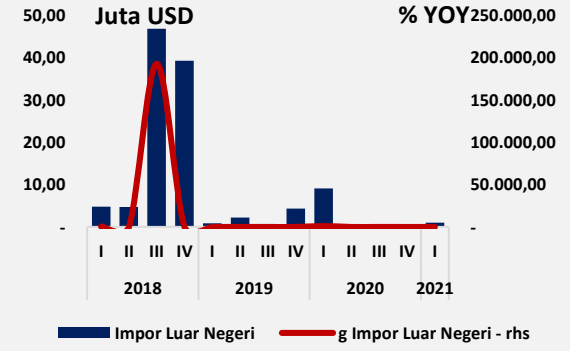
[11] SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19



Sumber: BPS (diolah)

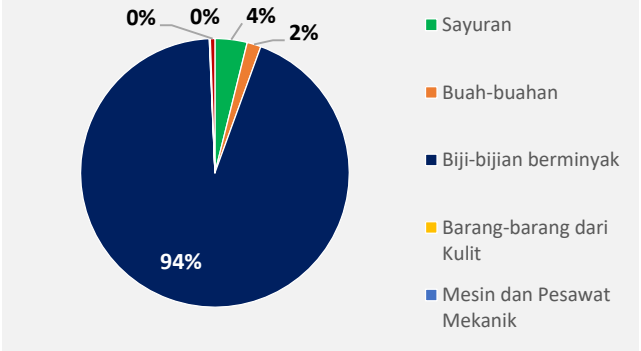
Grafik 1.22. Perkembangan Wisman Yang Menginap di Hotel Berbintang NTT

Di sisi lain, kinerja impor luar negeri Provinsi NTT pada triwulan I 2021 masih terkontraksi sebesar 46,60% (yoy). Penurunan impor luar negeri bersumber dari impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik, mesin dan pesawat mekanik, serta benda-benda dari besi dan baja yang secara keseluruhan turun 100% (yoy) pada triwulan I 2021. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR[12] pasal (3) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) dan Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK) harus mengoptimalkan produk dalam negeri. Adapun negara asal impor luar negeri terbesar di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 adalah Timor Leste dengan pangsa 100%, dan didominasi oleh impor komoditas biji-bijian berminyak dengan pangsa 93,7%.



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.23. Perkembangan Impor Luar Negeri Provinsi NTT



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.24. Pangsa Komoditas Utama Impor Provinsi NTT Triwulan I 2021

[12] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi

Pada triwulan II 2021, defisit neraca perdagangan Provinsi NTT diprakirakan mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan membaiknya permintaan domestik Provinsi NTT pasca-vaksinasi dan investasi yang diprakirakan meningkat sehingga mendorong permintaan bahan konsumsi dan bahan konstruksi dari luar Provinsi NTT. Perbaikan sektor konstruksi pasca bencana Siklon Seroja juga berpotensi meningkatkan nilai tambah bruto investasi dan perdagangan antar daerah. Rehabilitasi kerusakan pasca bencana direncanakan pada periode 6 Mei – 6 November 2021 sebagai masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan.

Net Ekspor luar negeri Provinsi NTT juga diprakirakan membaik dibanding triwulan I 2021 seiring pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang serta pelonggaran pembatasan akses perdagangan di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi, kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh Timor Leste sampai dengan 16 Mei 2021[13] berpotensi menurunkan permintaan ekspor ke Timor Leste sebagai salah satu mitra dagang utama NTT.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

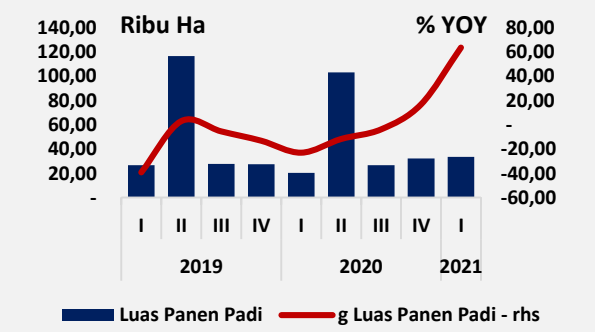
1.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2021 mencapai 8,32% (yoy), dan merupakan kinerja tertinggi selama lima tahun terakhir. Tingginya kinerja sektor ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi pada masa tanam Oktober 2020 – Maret 2021 di tengah upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui program TJPS dan *food estate* Sumba Tengah. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, realisasi luas tanam periode Oktober – Desember 2020 komoditas padi dan jagung tumbuh masing-masing sebesar 51% (yoy) dan 74,8% (yoy). Tingginya realisasi tanam tersebut didorong oleh program TJPS Pemerintah Provinsi NTT (realisasi 9.573 Ha) dan program *food estate* di Sumba Tengah (5.000 ha). Luas panen tanaman padi pada triwulan laporan sebesar 63,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 16,8% (yoy). Perbaikan kinerja pertanian sejalan dengan NTP triwulan I 2021 khususnya subsektor tanaman pangan padi-palawija dan hortikultura yang mengalami kenaikan sehingga masing-masing menjadi 95,65 dan 100,22.

[13] *Foreign Travel Advice Gov.uk*: Timor Leste, diakses pada tanggal 30 Mei 2021

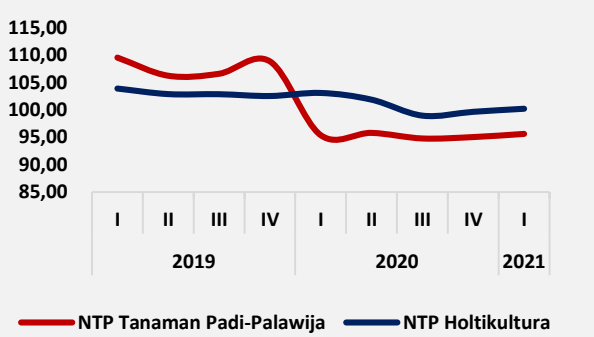
Pengembangan *food estate* merupakan program peningkatan penyediaan pangan nasional (bagian dari PSN) berbasis korporasi petani. Pengembangan dilakukan dengan pendekatan klaster dan multi komoditas yang terintegrasi hulu hilir serta mendorong perubahan peradaban pengelolaan pertanian. *Food estate* di Sumba Tengah yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Februari 2021, telah ditanami padi dan jagung masing-masing 3.000 Ha dan 2.000 Ha pada musim tanam Okmar 2021. Pertanian di *Food Estate* ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas padi dari 2,5 ton/ha menjadi 4-5 ton/ha dan jagung dari 4-5 ton/ha menjadi 5-6 ton/ha.

Perbaikan kinerja LU pertanian juga didorong oleh mulai terkendalinya virus flu babi Afrika di awal tahun. Di sisi lain, gelombang laut yang tinggi pada awal tahun 2021 menahan kinerja subsektor perikanan tercermin dari meningkatnya tekanan inflasi kelompok komoditas ikan segar (Ikan Tongkol, Ikan Kembung, Ikan Tuna, Ikan Selar, Ikan Teri) pada triwulan I 2021.



Sumber: Dinas Pertanian Provinsi NTT (diolah)

Grafik 1.25. Perkembangan Luas Panen Padi Provinsi NTT



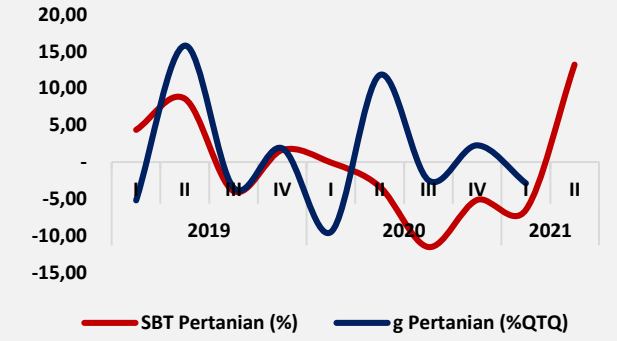
Sumber: BPS

Grafik 1.26. Perkembangan NTP Tanaman Padi-Palawija dan Hortikultura Provinsi NTT

Pada triwulan II 2021, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi NTT diprakirakan melanjutkan perbaikan terutama didorong oleh puncak panen raya tabama yang diperkirakan pada bulan April - Mei 2021. Kondisi ini terkonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, di mana saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan kegiatan dunia usaha LU pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan II 2021 sebesar 13,32%, meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2021 yang

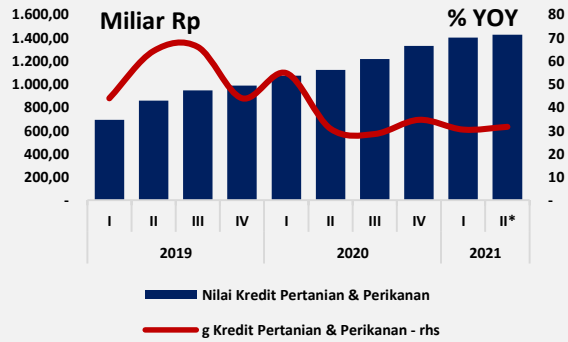
sebesar -6,51%. Perbaikan kinerja juga sejalan dengan kredit sektor pertanian (April 2021) yang tumbuh lebih tinggi menjadi 31,7% (yoy).

Bencana Siklon Tropis Seroja berpotensi menahan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih tinggi. Pasca-badai, kerusakan lahan subsektor tanaman tabama[14] mencapai 23,5 ribu Ha padi dan 13,96 ribu Ha jagung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Badai tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur pertanian dan jaringan irigasi di Provinsi NTT. Pada subsektor peternakan[15] terdapat 45,1 ribu ekor ternak hilang (terdiri dari 14 ribu ternak besar dan 31,1 ribu ternak kecil). Sementara di sisi subsektor perikanan[16], sebanyak 602 kapal mengalami kerusakan berat (537 unit memiliki kapasitas 1-10GT dan 65 unit memiliki kapasitas 10-30 GT) dan kerusakan rumput laut.



Sumber: Survei Kegiatan dunia Usaha Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.27. Perkembangan SBT Pertanian



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.28. Perkembangan Nilai Kredit Pertanian & Perikanan Provinsi NTT

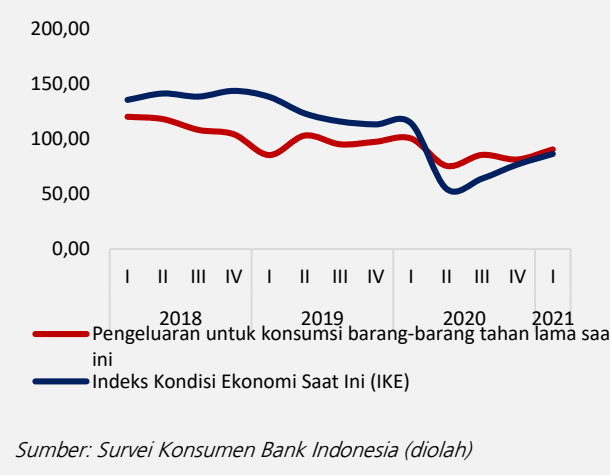
1.3.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan laporan masih tercatat tumbuh membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. kinerja LU Perdagangan tumbuh dari -8,93% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi -3,58% (yoy). Peningkatan kinerja LU perdagangan ini sejalan dengan perbaikan konsumsi rumah tangga setelah vaksinasi COVID-19 dan pembukaan kegiatan akses perdagangan PLBN. Kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang

[14] Keterangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
[15] Keterangan Dinas Peternakan Provinsi NTT
[16] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

berlaku mulai 1 Maret 2021[17], secara bertahap meningkatkan permintaan kendaraan bermotor yang tercatat tumbuh pada triwulan I sebesar -30,11%(yoy), sedikit membaik dibandingkan dengan kinerja triwulan IV sebesar -30,59% (yoy). Di sisi lain, kinerja perdagangan antar daerah juga meningkat didorong oleh kinerja pengeluaran ternak besar (Sapi, Kuda, Kerbau) pada triwulan I sebesar 40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 31% (yoy).

Perbaikan kinerja LU perdagangan terkonfirmasi dari hasil SPE serta liaison. Berdasarkan hasil SPE, penjualan tumbuh -17% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang -23,6% (yoy). Selain itu, hasil *liaison* menunjukkan adanya peningkatan *likert* penjualan domestik.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.29. Perkembangan *Likert Scale* Penjualan Domestik Provinsi NTT



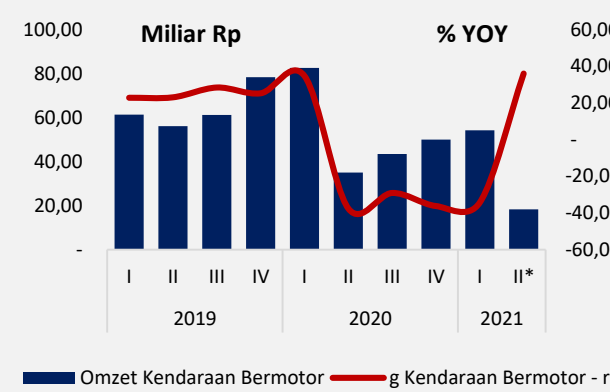
Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah (diolah)

Grafik 1.30. Perkembangan Pembelian Kendaraan Bermotor Provinsi NTT

Pemulihan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan II 2021 diprakirakan terus berlanjut. Momen Hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei 2021 dan *base effect* pandemi sejak Triwulan II 2020 menjadi pendorong utama perbaikan kinerja LU perdagangan. Pencairan THR baik pegawai negeri maupun swasta[18] dan berlanjutnya program jaring pengaman sosial diharapkan meningkatkan daya

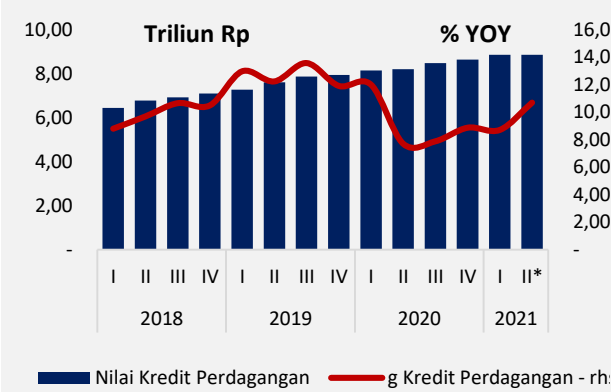
[17] Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 tentang Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
[18] SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

beli masyarakat. Perbaikan kinerja LU perdagangan tercermin dari penyaluran kredit perdagangan yang tumbuh lebih tinggi menjadi 10,69% (yoy) pada posisi April 2021. Kondisi ini juga terkonfirmasi dari SPE Bank Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan omzet triwulan II 2021 (sampai dengan Mei 2021) mencapai 24,3% (yoy), lebih tinggi dari triwulan I 2021 11,2% (yoy).



Sumber: SPE (diolah)

Grafik 1.31. Perkembangan Omzet Penjualan Kendaraan Bermotor SPE Provinsi NTT



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)

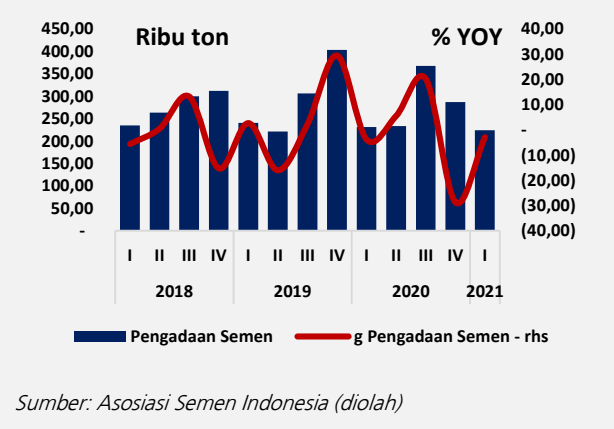
Grafik 1.32. Perkembangan Kredit Perdagangan Provinsi NTT

1.3.3 Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 5,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 15,84% (yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2021 disebabkan oleh keberlanjutan PSN pada triwulan I 2021 antara lain Bendungan Temef (Kab. Timor Tengah Selatan), Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Pelabuhan Kupang (Kota Kupang), Multipurpose Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Bandara Komodo (Kab. Manggarai Barat), dan juga Bendungan Napun Gete (Kab. Sikka) yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Feb 2021. Di samping itu, proyek pengembangan DPSP Labuan Bajo baik infrastruktur (jalan, bandara Komodo, pelabuhan multipurpose, pengolahan air) serta penataan kawasan wisata menjadi faktor pendorong sektor konstruksi secara keseluruhan.

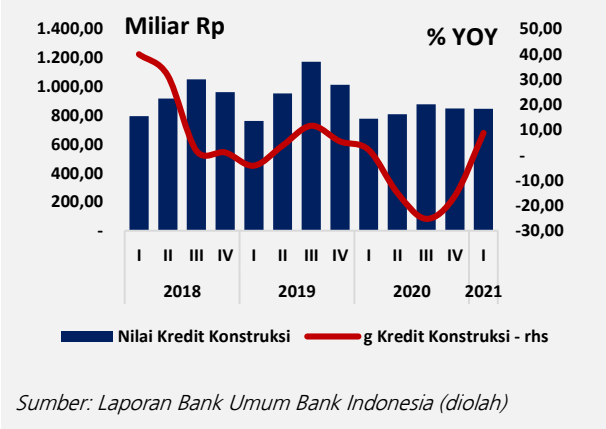
Perbaikan kinerja LU konstruksi tercermin dari pertumbuhan realisasi pengadaan semen di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 mencapai 2,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar -28,78% (yoy). Di samping itu, kinerja penyaluran kredit di

sektor konstruksi menunjukkan perbaikan yang signifikan dari -16,18% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi 8,7% (yoy) pada triwulan I 2021.



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (diolah)

Grafik 1.33. Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Provinsi NTT



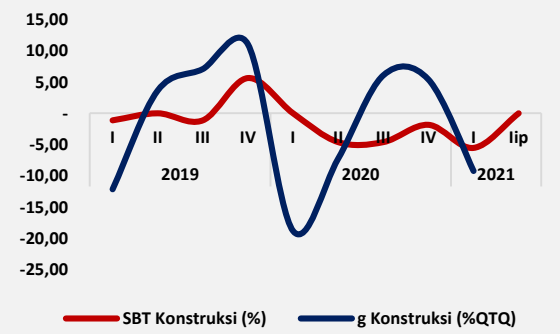
Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.34. Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi Provinsi NTT

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2021 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2021. Pemulihan kinerja LU konstruksi pada triwulan II 2021 diperkirakan didorong oleh percepatan belanja produktif pemerintah pada Tahun 2021. Pemerintah Provinsi NTT juga mengajukan pinjaman infrastruktur kepada PT SMI dalam rangka PEN sebesar Rp1,01 triliun untuk pembenahan jalan provinsi 516,47 km, pembangunan embung 22 unit dan pengembangan SPAM sebanyak 20 paket[19]. Sementara itu, proyek yang sempat tertunda akibat badai siklon Seroja akan diselesaikan di triwulan II 2021 antara lain pengerjaan 16 ruas jalan yang bersumber dari Pinjaman PT. SMI tahun 2020 senilai Rp188 miliar[20].

Optimisme perbaikan kinerja LU Konstruksi juga terkonfirmasi dari hasil SKDU Bank Indonesia yang menunjukkan prakiraan SBT LU konstruksi pada triwulan II 2021 sebesar 0,00%, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -5,52%. Hasil SPE Bank Indonesia juga mengkonfirmasi perbaikan omzet penjualan bahan konstruksi pada triwulan II 2021 (sampai dengan Mei 2021) yang tumbuh sebesar 10,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2021 sebesar -42,03% (yoy).

[19] Surat Dinas PUPR Provinsi NTT No.PUPR.SKT.05.01/900/360/IX/2020 tanggal 1 September 2020
[20] Keterangan Dinas PUPR Provinsi NTT, Mei 2021



Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.35. Perkembangan SBT LU Konstruksi Provinsi NTT

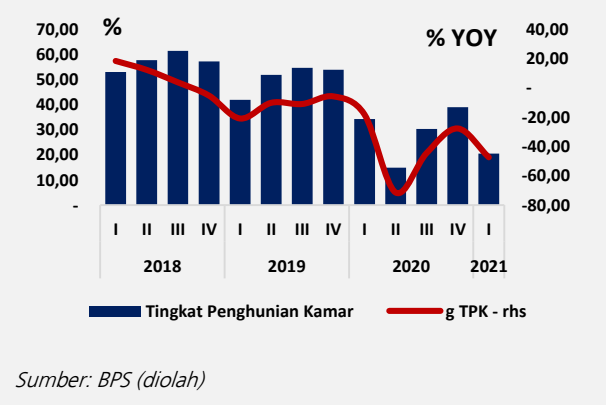


Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.36. Perkembangan Omzet Penjualan Bahan Konstruksi SPE Provinsi NTT

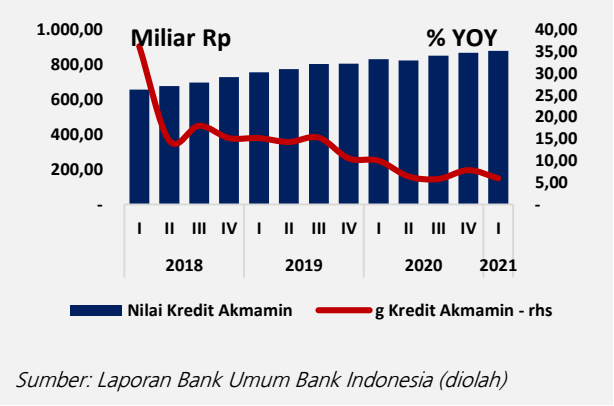
1.3.4 Lapangan Usaha Lainnya

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan I 2021 terkontraksi 22,30% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 19,40% (yoy). Larangan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerapan PPKM untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 menahan kinerja sektor ini. Kondisi ini tercermin dari rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada triwulan I 2021 yang melambat -47,3% (yoy) serta menurunnya kunjungan penumpang baik di Bandara El-Tari Kupang dan Bandara Komodo Labuan Bajo. Di samping itu, Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan kebijakan untuk larangan pelaksanaan pesta, dan pembatasan kapasitas restoran dan jam operasional melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terutama di Kota Kupang, dan Kab. Manggarai Barat. Sejalan dengan hal tersebut, kontraksi LU penyediaan akomodasi dan makan minum (Akmamin) juga tercermin dari kinerja penyaluran kredit sektor akmamin yang menurun dari 7,8% (yoy) pada triwulan IV 2020, menjadi 5,93% (yoy) pada triwulan I 2021.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.37. Perkembangan TPK Provinsi NTT



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.38. Perkembangan Kredit Akomodasi Makan Minum Provinsi NTT

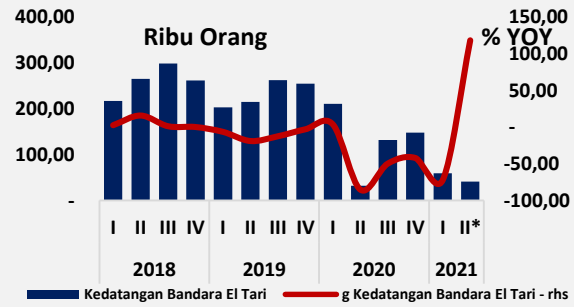
Kinerja LU Penyediaan Akmamin pada triwulan II diprakirakan lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja LU Akomodasi dan Makan Minum didorong oleh momen HBKN, pembukaan tempat destinasi secara bertahap dan didukung oleh promosi dan diskon untuk menarik minat pengunjung. Program Sertifikasi CHSE juga telah diterapkan di Provinsi NTT pada 46 pelaku usaha pariwisata[21] baik hotel maupun restoran untuk meningkatkan tingkat kepercayaan wisatawan domestik dalam melakukan perjalanan wisata. Penyelenggaraan rapat dan kegiatan lainnya baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah juga berpotensi meningkatkan kinerja LU Akmamin.

Perbaikan kinerja akmamin pada triwulan II 2021 juga tercermin dari meningkatnya jumlah kedatangan penumpang Bandara El Tari Kupang dan Bandara Komodo Labuan Bajo. Pada bulan April 2021, pertumbuhan penumpang di kedua bandara tersebut masing-masing sebesar 118% (yoy) dan 106% (yoy). Di samping itu, SBT Sektor Akomodasi makan minum juga meningkat dari -0,21% pada triwulan I 2021 menjadi 0,28% pada triwulan II 2021.

Kebijakan larangan dan pembatasan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H[22] serta penutupan layanan transportasi pada 6-17 Mei 2021, berpotensi menahan kinerja sektor ini tumbuh lebih tinggi. Kebijakan tersebut sebagai upaya pengendalian penyebaran virus COVID-19. Penerapan *travel restriction* dan *lockdown* di beberapa negara seperti India dan Timor Leste juga berpotensi menahan kunjungan wisatawan ke Provinsi NTT.

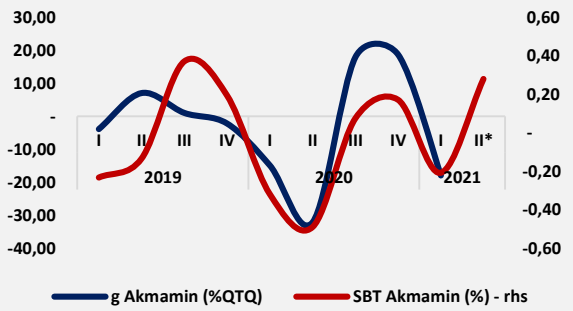
[21] Kementerian Pariwisata, Mei 2021

[22] SE No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah



Sumber: PT. Angkasa Pura I (diolah)

Grafik 1.39. Perkembangan Jumlah Kedatangan Penumpang Bandara El Tari Provinsi NTT

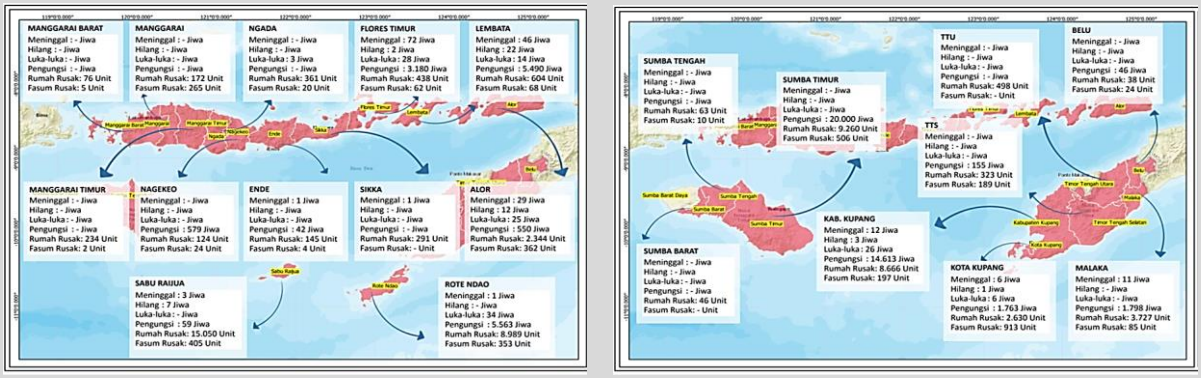


Sumber: SKDU (diolah)

Grafik 1.40. SBT Sektor Akomodasi Makan Minum Provinsi NTT

Boks 1. Dampak Badai Siklon Seroja terhadap Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur

Badai Siklon Tropis Seroja yang terjadi pada tanggal 4 dan 5 April 2021 di Provinsi NTT menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur, perumahan, serta sektor pertanian. Sesuai surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT[1], masa tanggap darurat ditetapkan sejak 6 April 2021 hingga 5 Mei 2021. Sampai dengan tanggal 5 Mei 2021, kerusakan rumah warga tercatat sebesar 65,9 ribu rumah, dengan rincian sebanyak 52,7 ribu rusak ringan, 6,8 ribu rusak sedang, dan 6,3 ribu mengalami rusak berat, serta korban jiwa sebanyak 182 orang pada 21 Kab/Kota.

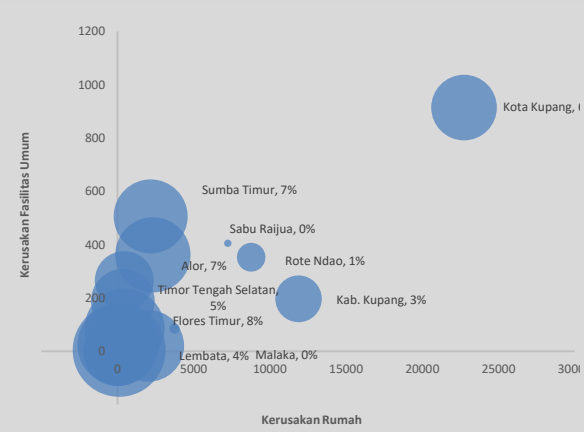


Sumber: BPBD Prov. NTT (Update 5 Mei 2021)

Gambar Boks 1.1. Sebaran Jumlah Korban dan Kerusakan Rumah di Kab/ Kota Pasca Bencana Badai Siklon Seroja di Prov. NTT

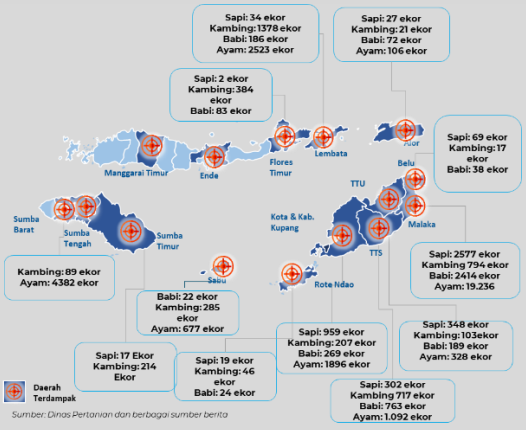
Pemetaan bencana Badai Siklon Seroja perlu dilakukan untuk mempercepat titik penanganan kerusakan terutama pada infrastruktur dan perumahan. Daerah yang paling terdampak bencana siklon seroja berdasarkan data kerusakan rumah dan fasilitas umum adalah Kota Kupang dengan total kerusakan rumah dan fasilitas umum mencapai masing-masing 22,7 ribu unit dan 914 unit, diikuti oleh Kab. Sumba Timur dan Kab. Kupang. Di samping itu, potensi debitur KUR terdampak bencana pada Kota Kupang, Kab. Sumba Timur, dan Kab. Kupang masing-masing sebesar 6%, 7%, dan 3% dari keseluruhan debitur KUR di Prov. NTT perlu diupayakan pemberian bantuan dan relaksasi/ restrukturisasi.

[1] Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 118/KEP/HK/2021 pada tanggal 6 April 2021 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: BPBD Prov. NTT, diolah

Grafik Boks 1.1 Pemetaan Kab/Kota terdampak Bencana Badai Siklon Seroja



Sumber: Dinas Peternakan, Prov. NTT (Update 5 Mei 2021)

Gambar Boks 1.2 Pemetaan Ternak yang hilang per Kab/Kota Prov. NTT

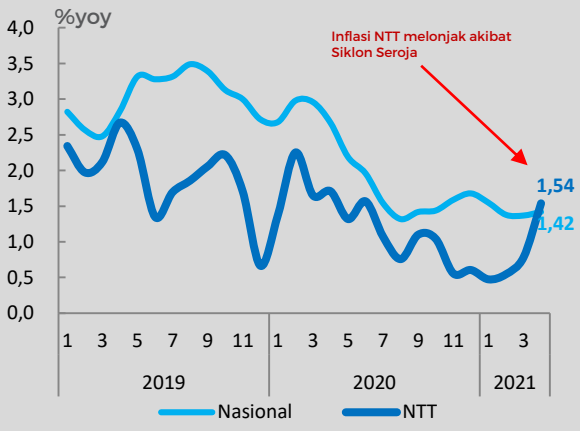
Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai LU utama Provinsi NTT (dengan *share* 28,51%) secara langsung terdampak Bencana Siklon Tropis Seroja. Kerusakan lahan terhadap subsektor tanaman bahan makanan (tabama)[2] mencapai 23,5 ribu Ha padi dan 13,96 ribu Ha jagung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Dampak dari kerusakan tersebut mencakup 7,2% dari target total luas panen padi dan 4,3% dari target total luas panen jagung sepanjang tahun 2021, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan di tengah musim panen raya pada Tw. II tahun 2021. Mayoritas lahan rusak untuk tanaman padi dan Jagung disebabkan oleh lahan pertanian yang terendam banjir. Badai Siklon Seroja juga menyebabkan kerusakan infrastruktur pertanian dan jaringan irigasi di Prov. NTT mencapai 880 m untuk jaringan primer dengan tingkat kerusakan sedang-berat, serta kerusakan pada Bendungan Kambaniru di Kab. Sumba Timur dengan potensi lahan terdampak mencapai 1.440 ha. Pada subsektor peternakan terdapat 45,1 ribu ekor ternak hilang (terdiri dari 14 ribu ternak besar dan 31,1 ribu ternak kecil) sementara di sisi subsektor perikanan sebanyak 602 kapal mengalami kerusakan berat (537 unit memiliki kapasitas 1-10GT dan 65 unit memiliki kapasitas 10-30 GT) dan 2.000 ton rumput laut terdampak bencana.

Kebijakan penanganan terhadap Lapangan Usaha Pertanian perlu dilakukan untuk memitigasi dampak bencana dan mempercepat pemulihan perekonomian Provinsi NTT. Langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian adalah percepatan pendataan dan verifikasi data perikanan pada masa tanggap darurat bencana hingga 7 Mei 2021 untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui

[2] Keterangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tanggal 5 Mei 2021

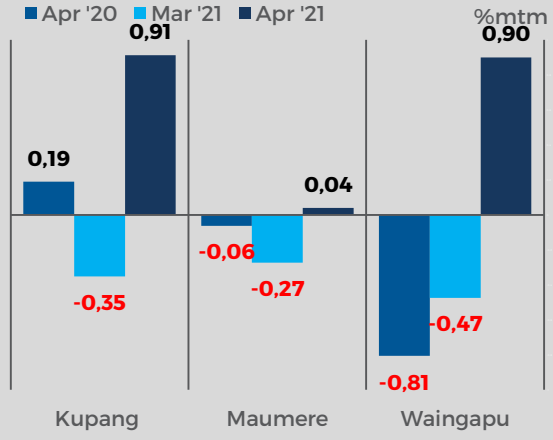
kementerian terkait. Selanjutnya, pemerintah daerah mempercepat musim tanam padi dan jagung (April – September), mengganti tanaman rusak dan menyiapkan benih untuk wilayah kab/kota dengan kondisi air yang masih mencukupi. Penanganan terhadap kerusakan tanaman hortikultura juga dilakukan melalui percepatan panen dan pengolahan tanah, penanaman menggunakan Brigade pertanian (alsintan), serta perbaikan infrastruktur pertanian (pengairan/irigasi, bendungan)[3]. Di sisi lain, perbaikan sektor peternakan dan perikanan juga didorong dengan memberikan bantuan benih rumput laut, bantuan pembangunan kapal sebanyak 300 unit kapal kecil (1-10 GT)[4], bantuan obat-obatan dan pemantauan kondisi pelayanan kesehatan ternak, serta memfasilitasi pemasukan daging ayam karkas untuk memenuhi kebutuhan Provinsi NTT akibat kematian ayam yang mencapai 31,1 ribu ekor[5].

Dari sisi stabilitas harga, Badai Siklon Tropis Seroja meningkatkan tekanan inflasi di NTT pada bulan April 2021 tercatat sebesar 1,54% (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 1,42 (yoy). Inflasi yang tinggi terutama disebabkan oleh kenaikan harga-harga sayur-sayuran seperti kangkung, sawi putih dan sawi hijau, sebagai dampak kerusakan lahan hortikultura akibat Siklon Seroja. Pada bulan April 2021, seluruh kota perhitungan inflasi di Provinsi NTT mengalami inflasi, dengan tingkat inflasi tertinggi pada Kota Kupang sebesar 0,91% (mtm), diikuti oleh Kota Waingapu dan Maumere.



Sumber: BPS, diolah

Grafik Boks 1.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Prov. NTT



Sumber: BPS, diolah

Grafik Boks 1. 3 Pemetaan Ternak yang hilang per Kab/Kota Prov. NTT

[3] Keterangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tanggal 5 Mei 2021
[4] Keterangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tanggal 4 Mei 2021
[5] Keterangan Dinas Peternakan Provinsi NTT tanggal 4 Mei 2021

Kondisi sistem pembayaran Prov. NTT pasca bencana Siklon Seroja 4-5 April 2021, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT dapat beroperasi normal untuk menjalankan fungsi kritikal di bidang Sistem Pembayaran (SP) dan Pengedaran Uang Rupiah (PUR) berdasarkan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI). Bank Indonesia Provinsi NTT melakukan pemantauan kepada Perbankan untuk memastikan operasional ATM dan Layanan Perbankan melalui *phone* dan *site visit* oleh Kepala Perwakilan Prov. NTT ke Kantor Cabang Perbankan di Kupang, memastikan operasional 9 Kas Titipan, Pertukaran Warkat Debit (PWD) berjalan lancar, serta memastikan Supply Listrik dan BBM untuk operasional BI dan Perbankan. Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi NTT juga membuat press rilis terkait (i) kegiatan operasional BI berjalan normal (ii) meyakinkan perbankan dan masyarakat akan ketersediaan uang tunai yang cukup.

Bank Indonesia menyalurkan bantuan melalui Posko Tanggap Bencana dan Gugus Tanggap Darurat. Sebagai wujud kepedulian Bank Indonesia kepada masyarakat di NTT yang terkena bencana, Bank Indonesia telah menyalurkan bantuan baik yang bersumber dari PSBI (Program Sosial Bank Indonesia), PIPEBI (Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia), dan IPEBI (Ikatan Pegawai Bank Indonesia) Prov. NTT kepada Posko Tanggap Bencana dan Gugus Tanggap Darurat Provinsi NTT, serta kepada pegawai yang terdampak badai.



Gambar Boks 1.3 Bantuan PSBI melalui Posko Tanggap Bencana Pemprov. NTT



Gambar Boks 1.4 Bantuan Sembako PSBI melalui Tanggap Bencana

Perbaikan kinerja perekonomian diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2021. Bank Indonesia secara aktif melakukan diskusi dengan Pemerintah Daerah, DJPb, dan OJK untuk merumuskan rekomendasi pemulihan pascabencana di Provinsi NTT antara lain: 1) Pemerintah Daerah agar menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, antara lain memuat: (i) bantuan berupa benih, pupuk, alsintan, bibit

ternak (sapi,babi,ayam) dan melakukan pendampingan pasca bencana kepada Kementerian Pertanian, (ii) bantuan pengadaan kapal mengingat kelompok ikan segar sering mendorong inflasi di NTT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta (iii) Kementerian PUPR agar membantu rehabilitasi infrastruktur terdampak termasuk infrastruktur pertanian. 2) Pemerintah Provinsi NTT agar menyurati Dewan Komisioner OJK, untuk meminta relaksasi kredit bagi debitur terdampak becana di NTT baik untuk penerapan POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah Tertentu yang Terkena Bencana Alam, ataupun POJK khusus, 3) BPBD Provinsi NTT agar memetakan lembaga kritikal di Provinsi NTT (termasuk Bank Indonesia, OJK, PJSP dll) dan memastikan supply pasokan energi (listrik, BBM) untuk mendukung operasional lembaga kritikal, 4) Perluasan Program TJPS, Food Estate, tindak lanjut Program 1000 Desa Sapi, akselerasi tindak lanjut Pinjaman PEN PT. SMI 2021, perluasan penggunaan brigade alsintan, percepatan vaksinasi untuk mendorong mobilitas, serta (5) PLN, Pertamina, dan Telkom agar memastikan ketersediaan listrik, BBM, dan recovery jaringan telekomunikasi di area kritikal.

Boks 2. Strategi Pengembangan Komoditas Garam di Kabupaten Kupang

Saat ini sumbangan garam terhadap perekonomian NTT belum optimal. Akan tetapi dengan potensi yang dimiliki, komoditas garam diharapkan dapat memberi sumbangan yang signifikan bagi perekonomian NTT di waktu mendatang. Pangsa pasar yang tersedia juga relatif besar. Kebutuhan garam nasional sepanjang lima tahun terakhir masih dipenuhi melalui impor. Pada tahun 2019, kebutuhan garam mencapai 4,57 juta ton, sedangkan produksi garam nasional hanya mencapai 2,85 juta ton. Pemerintah Pusat telah memiliki beberapa program untuk mewujudkan swasembada garam nasional, salah satunya melalui program ekstensifikasi yakni pembukaan lahan garam baru terutama di Provinsi NTT.

Provinsi NTT memiliki kondisi geografis yang sesuai untuk produksi garam; antara lain musim panas yang lama (6-7 bulan dalam setahun), wilayah kepulauan dengan panjang garis pantai 5.700 km, serta air laut yang belum tercemar dengan kepekatan ±3,50 Beume. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2018, produksi garam di Provinsi NTT baru mencapai 11.142 ton atau 0,47% dari total produksi nasional. Pemerintah tengah melaksanakan program ekstensifikasi lahan garam di Provinsi NTT dengan luas lahan mencapai 3.099 ha. Pada tahun 2023, produksi garam di lahan ekstensifikasi tersebut diperkirakan mencapai 309.900 ton garam per tahun2. Beberapa perusahaan telah berinvestasi di lahan ekstensifikasi garam di Provinsi NTT, khususnya di lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi NTT di Teluk Kupang seluas 1.694 ha.

Secara keseluruhan, potensi luas areal tambak garam di Kabupaten Kupang mencapai 10 ribu hektar, yang tersebar di Bipolo, Oeteta, Pariti, Pantai Beringin, Pitay, Babau, Merdeka, Oebelo, dan Tanah Merah (prediksi Pemerintah Kabupaten Kupang). Potensi lahan garam rakyat yang ada apabila dikelola dengan baik maka NTT bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara beberapa wilayah yang potensial untuk garam industri, bisa difokuskan menjadi pilar produksi untuk memenuhi kebutuhan garam nasional karena didukung oleh kondisi cuaca yang baik, wilayah pantai dan laut yang luas.



Gambar Boks 2.1. Peta Wilayah Potensi Garam Tambak di Kabupaten Kupang (DKP Kab. Kupang, 2019)

Meskipun demikian, sampai saat ini kualitas garam yang dihasilkan belum sesuai standar baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-Dag/Per/101.2007 kualitas garam rakyat dikelompokan menjadi 3 jenis, yaitu:

a. KW-1, yaitu garam dengan kualitas terbaik yang memenuhi syarat untuk bahan industri maupun untuk konsumsi dengan kadar NaCl/Natrium Klorida minimal 97,46 %.
b. KW-2, yaitu kualitas garam dibawah KW-1.Garam jenis ini harus dikurangi kadar berbagai zat agar memenuhi standart sebagai bahan baku industri. Secara fisik garam K-2 berwarna putih agak kecoklatan dan sedikit lembab. Garam ini dengan kadar NaCl 94,7%.
c. KW-3 merupakan garam kualitas terendah, tampilan fisik yang putih kecoklatan dan bercampur lumpur. Garam ini dengan kadar NaCl <94,7%.

Permasalahan terkait teknologi, SDM, permodalan, dan pemenuhan standar baku mutu dapat ditangani oleh perusahaan-perusahaan, namun sulit ditangani oleh petambak garam secara individu. Mengingat bahwa produksi garam melibatkan industri serta para petambak garam, maka persoalan kualitas garam perlu mendapat perhatian.

Selain masalah kualitas, pengaturan dan kelembagaan serta kerjasama perdagangan juga perlu mendapat perhatian. Ke depan, sampai sejauh mana komoditas garam dapat menjadi komoditas yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi NTT, sangat ditentukan oleh faktor kualitas, kelembagaan, kesiapan industri dan petambak garam tradisional untuk melakukan kerjasama perdagangan sangatlah penting.

Oleh karena itu, KPw Bank Indonesia Provinsi NTT telah melakukan *Focus Group Discussion* dengan para *stakholder* industri garam, antara lain perusahaan-perusahaan garam, pemerintah daerah dan dinas terkait, serta para petani tambak garam. Dari FGD tersebut, telah diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

FAKTOR PRODUKSI

a. Teknologi Produksi
    1. Pada tingkat petambak garam tradisional sulit mendapatkan teknologi produksi yang murah, minim dukungan sumber pembiayaan dan kemampuan penguasaan teknologi yang terbatas.
    2. Pada tingkat pelaku industri juga menghadapi hambatan pada mahalnya teknologi produksi.
b. Infrastruktur Penunjang Produksi
    1. Ketersediaan listrik terbatas, sementara pengadaan listrik mandiri membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
    2. Prasarana jalan terbatas/belum memadai
    3. Fasilitas penyimpanan/gudang terbatas.
c. Kesiapan Petambak Garam Tradisional
    1. Pengetahuan tentang berbagai aspek kualitas garam industri sangat terbatas.

2. Kualifikasi dan kompetensi SDM sangat terbatas

d. Peluang dan Tantangan Peningkatan Nilai Tambah
    1. Belum terdapat hasil riset yang memadai untuk memanfaatkan peluang peningkatan nilai tambah.
    2. Belum terdapat hasil riset yang memadai untuk memanfaatkan peluang peningkatan nilai tambah.

PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN

a. Pengaturan Non Ijin
    1. Proses sertifikasi lahan milik petambak garam tradisional belum berjalan dengan baik.
    2. Aspek non ijin terkait pengalihan hak pengelolaan lahan sering terhambat pada kejelasan status kepemilikan lahan.
    3. Belum terdapat Peraturan Daerah terkait industri dan tataniaga garam, mengakibatkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya belum terukur dengan baik

b. Kelembagaan
    1. Kultur bekerja secara individual yang telah berlangsung turun-temurun di kalangan petambak garam tradisional menjadikan mereka belum bisa beradaptasi dengan baik dalam kerja kelompok atau kerja berbasis kelemabagaan.
    2. Kelembagaan terkait pengendalian mutu garam petambak tradisional yang melibatkan stakeholder terkait belum terbentuk.
    3. Kelembagaan yang mengatur pola kemitraan perusahaan industri dan petambak garam tradisional belum tersedia. Akibatnya pilihan bentuk kemitraan seperti sub kontaktor, inti-plasma, bagi hasil antara pelaku industri garam dan petambak garam tradisional masih terhambat dalam hal kesesuaian dengan keinginan pelaku industri garam dan petambak garam tradisional.
    4. Kelembagaan ekonomi seperti Bumdes dan Koperasi belum berfungsi dengan baik.
    5. Pada tingkat pelaku industri, keteterlibatan asosioasi usaha seperti KADIN dan HIPMI masih terbatas.

KERJASAMA DAN PERDAGANGAN

a. Potensi Kerjasama
    1. Belum teridentifikasi dengan baik peluang kerjasama perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.
    2. Pelaku industri garam yang ada saat ini masih berorientasi pada perdagangan dalam negeri dan belum memiliki referensi untuk mengembangkan kerjasama lebih lanjut.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka strategi untuk perbaikan produksi, pengaturan dan kelembagaan serta kerjasama dan perdagangan dapat adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan Produksi, dilakukan melalui strategi pemantapan proses produksi. Penjabarannya sebagai berikut:
    1. Pada tingkat petambak garam tradisional:
        - Standarisasi produksi melalui sertifikasi produk dan pengawasan teknis
        - Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui capacity building dan pendampingan.
        - Perbaikan teknologi produksi melalui penyediaan skim pembiayaan dengan bunga murah/rendah.
    2. Pada tingkat pelaku industri garam:
        - Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui capacity building dan pendampingan
        - Perbaikan teknologi produksi melalui penyediaan skim pembiayaan dengan bunga murah/rendah
b. Pengaturan dan regulasi, dilakukan melalui strategi penguatan regulasi non ijin, dengan sebagai berikut:
    1. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Industri dan Tataniaga Garam
    2. Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Petambak Garam Tradisional
    3. Fasilitasi Pengurusan Pengalihan Hak Pengusahaan Lahan
c. Kelembagaan melalui strategi:

1. Pemantapan fungsi kelembagaan pengendali mutu, melalui kegiatan:
    - Pembentukan Gugus Tugas Kendali Mutu
    - Fasiitasi Pelaksanaan Gugus Tugas Kendali Mutu
2. Pemantapan fungsi kelembagaan kerjasama produksi, melalui kegiatan:
    - Perumusan model/bentuk kerjasama produksi antara perusahaan industri dan petamabak garam tradisional
    - Pelaksanaan kerjasama produksi antara perusahaan industri dan petambak garam tradisional

d. Kerjasama dan Perdagangan melalui strategi pemantapan kerjasama perdagangan:
    1. Pembentukan Forum Perdagangan Lintas Pelaku
    2. Penjajagan Kerjasama Perdagangan
    3. Realisasi Pelaksanaan Kerjasama Perdagangan

Bab II.

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total belanja tercatat sebesar Rp5,01 triliun, mencapai 10,02% dari total anggaran. Kinerja belanja yang meningkat terutama bersumber dari belanja modal APBN, seiring dengan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja belanja Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten (APBD) menurun, seiring dengan *refocusing* anggaran dan migrasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kinerja pendapatan (APBD) juga menurun, seiring dengan penyesuaian Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, serta kinerja PAD yang menurun. Ke depan, realisasi anggaran Pemerintah perlu terus didorong untuk mengoptimalkan perannya sebagai *countercyclical* di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

2.1 Kondisi Umum

Anggaran perubahan Total Belanja pemerintah di NTT (APBN & APBD) pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp49,98 triliun, tumbuh 4,45% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran total belanja terutama bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi NTT yang tumbuh sebesar 19,52% (yoy), seiring dengan rencana pinjaman dana dari PT. SMI sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian, anggaran APBN tumbuh sebesar 4,70% (yoy), sementara anggaran Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi NTT tumbuh sebesar 0,14% (yoy).

Kinerja realisasi Total Belanja pemerintah di NTT (APBN & APBD) pada triwulan I 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi Total belanja tercatat sebesar Rp5,01 triliun, mencapai 10,02% dari anggaran. Hal ini terutama bersumber dari realisasi belanja APBN yang meningkat, didorong oleh belanja modal yang tinggi pada triwulan I 2021 dalam rangka penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang tertunda pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, kinerja belanja Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten mengalami penurunan kinerja. Hal ini disebabkan oleh *refocusing* anggaran sesuai dengan Permenkeu No.17/PMK.07/2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan migrasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tabel 2.1. Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2020-2021

Kategori	Pagu Belanja APBN-P/APBD-P (Miliar Rp)		Pertumbuhan Pagu (% yoy)		
	2020	2021	2020	2021	
APBN	18.256	19.115	4,58	4,70	▲
APBD Provinsi	6.346	7.585	9,99	19,52	▲
APBD Kota/Kabupaten	23.255	23.287	-4,96	0,14	▲
Total	47.857	49.986	0,34	4,45	▲

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTT pada Triwulan I tahun 2020-2021

Kategori	Posisi Realisasi Belanja (Miliar Rp)			Realisasi terhadap Anggaran (%)		
	Tw I 2020	Tw I 2021		Tw I 2020	Tw I 2021	
APBN	1.873	3.091	▲	10,26	16,17	▲
APBD Provinsi	478	475	▼	7,54	6,26	▼
APBD Kota/Kabupaten	1.891	1.445	▼	8,13	6,20	▼
Total	4.243	5.010	▲	8,87	10,02	▲

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Anggaran Total Pendapatan Pemerintah di NTT (APBD) pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp28,58 triliun, tumbuh 3,10% (yoy) dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Bila dilihat lebih rinci, terdapat kenaikan pada target PAD, seperti Pendapatan Pajak dan Pendapatan Retribusi baik di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Hal ini merupakan wujud dari optimisme pemerintah daerah terhadap kondisi perekonomian yang diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, kenaikan anggaran belanja Pemerintah Provinsi NTT didorong oleh rencana penerimaan dana pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp1,5 triliun, yang akan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, pendapatan pemerintah daerah di NTT masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, yang mencakup sekitar 83% dari total anggaran pendapatan pemerintah daerah di NTT.

Kinerja realisasi total pendapatan pemerintah (APBD) di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi total pendapatan mencapai Rp3,69 triliun, mencapai 12,92% dari anggaran. Hal ini terutama bersumber dari Pendapatan Transfer yang terkontraksi cukup dalam, sebagai dampak dari *refocusing* anggaran pemerintah pusat sesuai dengan Permenkeu No.17/PMK.07/2021. Selain itu, kinerja PAD juga menurun, sejalan dengan

kondisi perekonomian pada triwulan I yang masih relatif lemah. PAD Pemerintah Provinsi terutama bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang kinerjanya menurun seiring dengan perdagangan mobil dan motor yang masih lemah. Program pemutihan denda PKB yang dilakukan pada tahun sebelumnya, belum dilanjutkan lagi pada tahun 2021. Kemudian, PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten terutama bergantung pada Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yang kinerjanya menurun seiring dengan mobilitas masyarakat di tempat pariwisata yang masih rendah.

Tabel 2.3. Anggaran Pendapatan Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori	Pagu Pendapatan APBD-P (Miliar Rp)		Pertumbuhan Pagu (% yoy)	
	2020	2021	2020	2021
APBD Provinsi	5.838	6.284	4,98	7,63 ▲
APBD Kota/Kabupaten	21.877	22.291	-5,77	1,89 ▲
Total	27.715	28.575	-3,69	3,10 ▲

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Tabel 2.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTT pada Triwulan I Tahun 2020-2021

Kategori	Posisi Realisasi Pendapatan (Miliar Rp)		Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	Tw I 2020	Tw I 2021	Tw I 2020	Tw I 2021
APBD Provinsi	837	718 ▼	14,34	11,43 ▼
APBD Kota/Kabupaten	3.497	2.974 ▼	15,98	13,34 ▼
Total	4.334	3.692 ▼	15,64	12,92 ▼

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT

2.2.1 Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi NTT

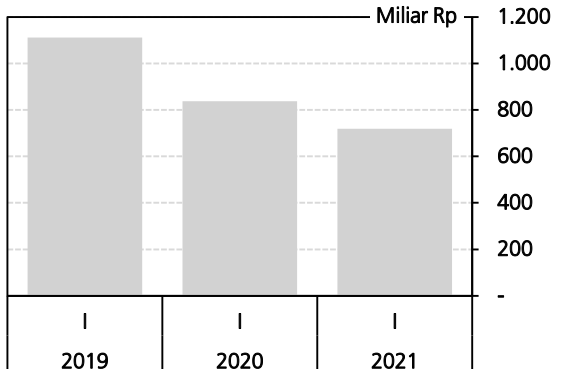
Anggaran (target) Total Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2021 adalah sebesar Rp6,29 triliun, tumbuh 7,63% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran pendapatan terutama bersumber dari peningkatan target Penerimaan Asli Daerah. Bila dilihat lebih rinci, target pendapatan pajak meningkat 8,60% (yoy), sedangkan target pendapatan retribusi meningkat 1,74% (yoy). Hal ini merupakan wujud dari optimisme Pemerintah Provinsi NTT mengenai ekonomi yang diprakirakan lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pendapatan Pemerintah Provinsi NTT

masih bergantung pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Anggaran Pendapatan Transfer pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp4,18 triliun. Seiring dengan kebijakan *refocusing* anggaran oleh pemerintah pusat dalam rangka penanganan COVID-19, anggaran Pendapatan Transfer Provinsi NTT terkontraksi 1,57% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov NTT Tahun 2020-2021

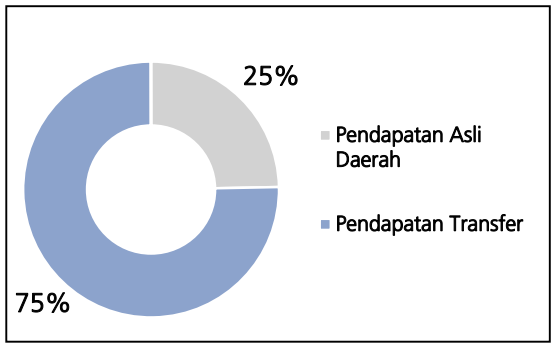
Kategori	2020					2021				
	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)
TOTAL PENDAPATAN	**5.838**	**4,98**	**837**	**14,34**	**-24,63**	**6.284**	**7,63**	**718**	**11,43**	**-14,20**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**1.466**	**8,91**	**192**	**13,13**	**-14,15**	**2.034**	**38,73**	**177**	**8,72**	**-7,86**
- Pendapatan Pajak Daerah	1.031	7,98	139	13,46	-7,40	1.533	48,67	115	7,48	-17,34
- Pendapatan Retribusi Daerah	104	48,86	4	4,10	11,52	206	97,51	2	1,13	-45,44
- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.	142	72,14	-	0,00	-100,00	94	-33,35	7	7,11	-
- Lain-Lain PAD yg Sah	189	-20,89	49	26,19	-29,38	200	6,01	54	26,79	8,46
Pendapatan Transfer	**4.274**	**2,39**	**645**	**15,08**	**-27,25**	**4.182**	**-2,14**	**541**	**12,93**	**-16,12**
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**99**	**139,41**	**0**	**0,02**	**-95,54**	**68**	**-31,00**	**0**	**0,30**	**878,80**

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.1. Realisasi Total Pendapatan Pemprov NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)

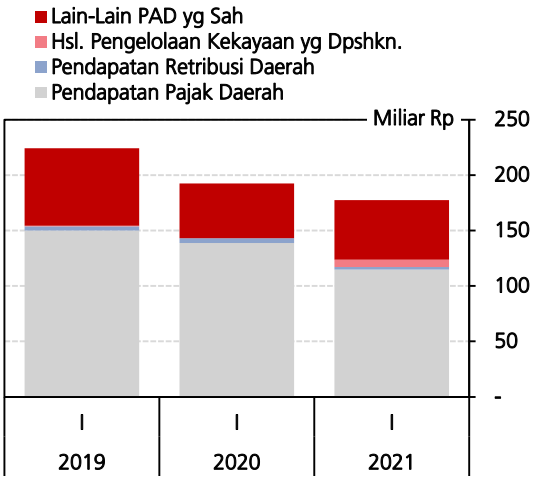


Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.2. Rincian Realisasi Total Pendapatan Pemprov NTT Triwulan I 2021

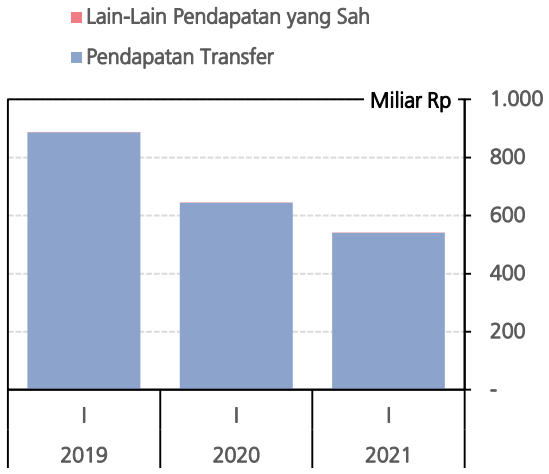
Kinerja realisasi Total Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT pada triwulan I 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi Total Pendapatan tercatat sebesar Rp718 Miliar, hanya mencapai 11,43% dari total anggaran. Secara nominal, realisasi tersebut terkontraksi 14,20% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi Pendapatan Transfer, seiring dengan *refocusing* anggaran oleh

Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Transfer tercatat sebesar Rp4,18 triliun, terkontraksi 16,12% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian, realisasi Pendapatan Asli Daerah juga terkontraksi 7,86% (yoy), sejalan dengan kondisi perekonomian yang relatif masih lemah. Bila dilihat lebih rinci, Pendapatan Pajak terkontraksi 17,34% (yoy), sedangkan Pendapatan Retribusi terkontraksi 45,44% (yoy). Kinerja Pendapatan Pajak yang rendah terutama disebabkan oleh kinerja perdagangan mobil dan motor yang masih belum sepenuhnya pulih pada triwulan I 2021. Kemudian, insentif penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) juga sudah berakhir pada akhir tahun 2020, sehingga tidak mampu menopang kinerja pajak pada triwulan I 2021. Sementara itu, Pendapatan Retribusi terkontraksi 17,34% (yoy).



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemprov NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.4. Realisasi Pendapatan Transfer Pemprov NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)

2.2.2 Belanja APBD Provinsi NTT

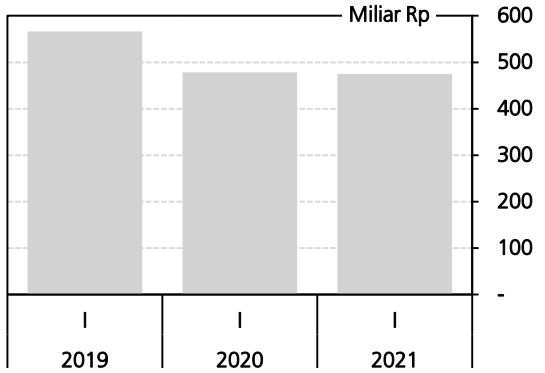
Anggaran Total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7,59 triliun, tumbuh 19,52% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran belanja terutama bersumber dari peningkatan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal, yang masing-masing tumbuh 11,11% (yoy) dan 9,90% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, kenaikan anggaran Belanja Operasi terutama bersumber dari kenaikan anggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Selanjutnya, anggaran Belanja Modal tumbuh tinggi sebesar 51,01% (yoy), sejalan dengan rencana penyelesaian berbagai proyek-proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi NTT yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Rencana Pemerintah Provinsi NTT dalam

mendapatkan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun dari PT. SMI untuk proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi juga turut menjadi faktor meningkatnya anggaran Total Belanja secara keseluruhan.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov NTT Tahun 2020-2021

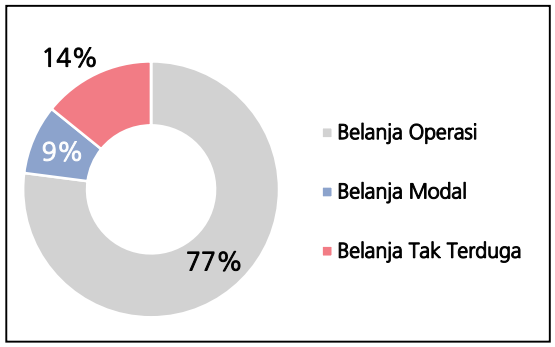
Kategori	2020					2021				
	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)
TOTAL BELANJA	**6.346**	**9,99**	**478**	**7,54**	**-15,53**	**7.585**	**19,52**	**475**	**6,26**	**-0,80**
Belanja Operasi	**4.308**	**0,42**	**429**	**9,96**	**-18,03**	**5.014**	**16,37**	**366**	**7,29**	**-14,78**
- Belanja Pegawai	1.815	4,35	266	14,67	14,43	1.562	-13,95	211	13,50	-20,81
- Belanja Barang dan Jasa	1.025	-7,19	145	14,17	98,03	1.551	51,35	147	9,48	1,21
- Belanja Bunga	14	-	-	0,00	-	39	189,62	5	11,99	-
- Belanja Hibah	1.431	0,98	12	0,82	-94,56	1.809	26,43	3	0,17	-74,47
- Belanja Bantuan Sosial	24	-18,75	6	23,93	385,94	52	118,21	-	0,00	-100,00
Belanja Modal	**1.231**	**33,83**	**40**	**3,24**	**> 9.000,00**	**1.859**	**51,07**	**42**	**2,24**	**4,51**
Belanja Tak Terduga	**283**	**2.125,02**	**4**	**1,58**	**1.128,40**	**68**	**-75,89**	**67**	**98,74**	**1.409,52**
Belanja Transfer	**525**	**-4,16**	**5**	**0,95**	**-88,24**	**644**	**22,80**	**-**	**0,00**	**-100,00**

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.5. Realisasi Total Belanja Pemprov NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)

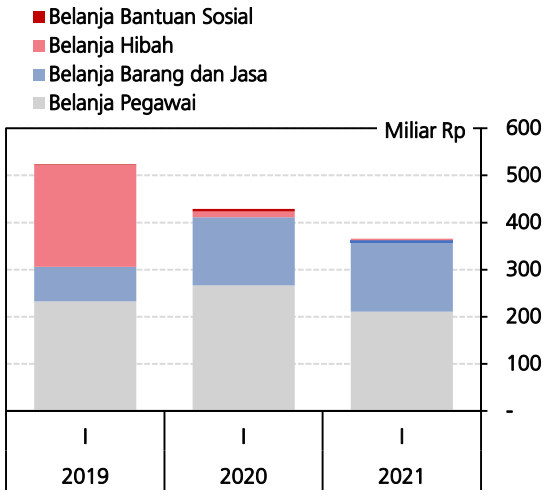


Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.6. Rincian Realisasi Total Belanja Pemprov NTT Triwulan I 2021

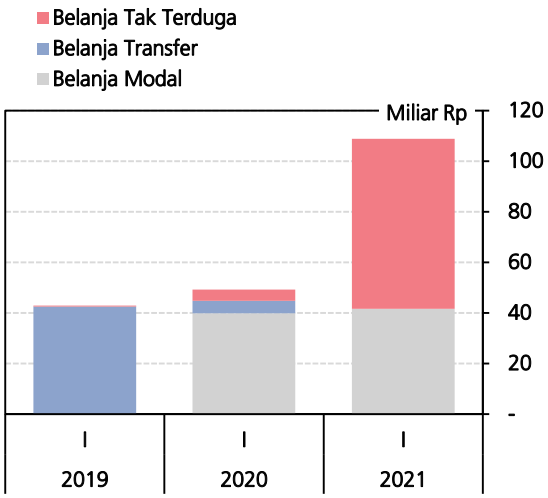
Kinerja realisasi Total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada triwulan I tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi total belanja tercatat sebesar Rp475 miliar, hanya mencapai 6,26% dari total anggaran. Secara nominal, realisasi total belanja terkontraksi 0,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan kinerja belanja terutama bersumber oleh rendahnya realisasi Belanja Operasi yang terkontraksi 14,78% (yoy). Melambatnya

realisasi belanja sebagai dampak dari *refocusing* anggaran dan migrasi ke SIPD. Bila dilihat lebih rinci, realisasi komponen Belanja Pegawai terkontraksi 20,81% (yoy), seiring dengan penyesuaian anggaran perjalanan dinas. Di sisi lain, realisasi Belanja Tak Terduga tumbuh tinggi sebesar 1.409,52% (yoy), atau sebesar 13 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga menopang kinerja realisasi belanja secara keseluruhan. Belanja Tak Terduga terutama digunakan untuk program-program penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi NTT yang melonjak sejak akhir tahun 2020.



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.7. Realisasi Belanja Operasi Pemprov NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.8. Realisasi Belanja Modal, Transfer, dan Tak Terduga Pemprov NTT 2019-2021 (Posisi Triwulan I)

2.3 APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

2.3.1 Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

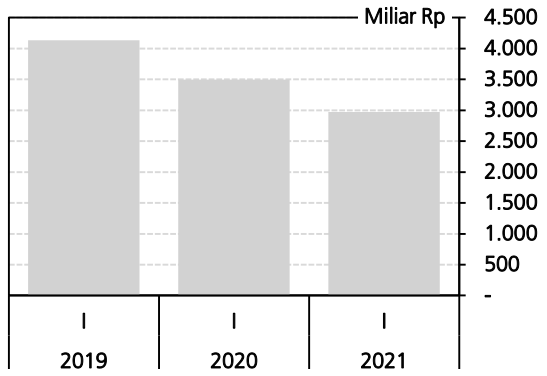
Anggaran (target) Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp22,29 triliun, tumbuh 1,89% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran pendapatan terutama bersumber dari kenaikan anggaran Pendapatan Asli Daerah, yang tumbuh 19,94% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, anggaran Pendapatan Pajak tumbuh 43,70% (yoy), sedangkan anggaran Pendapatan Retribusi tumbuh 46,33% (yoy). Hal ini merupakan wujud dari optimisme Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT mengenai ekonomi yang diprakirakan lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT

masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, dengan anggaran yang mencapai Rp Rp19,62 triliun.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

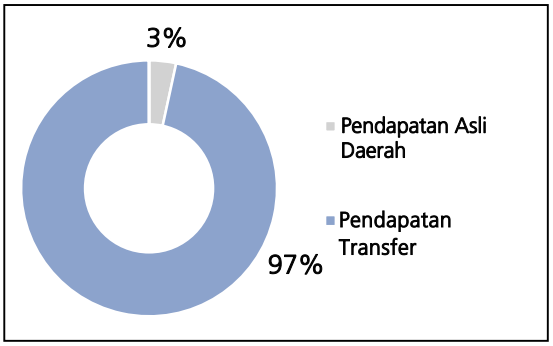
Kategori	2020					2021				
	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)
TOTAL PENDAPATAN	21.877	-5,77	3.497	15,98	-15,42	22.291	1,89	2.974	13,34	-14,96
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.595	-8,27	162	10,16	12,72	1.913	19,94	101	5,29	-37,54
- Pendapatan Pajak Daerah	410	-19,81	74	18,05	0,87	589	43,70	53	8,92	-28,95
- Pendapatan Retribusi Daerah	220	-18,75	30	13,80	64,34	322	46,33	24	7,40	-21,56
- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.	144	-6,88	0	0,19	194,26	164	14,15	-	0,00	-100,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	822	2,36	57	6,98	10,76	838	2,02	25	2,96	-56,76
Pendapatan Transfer	18.721	-8,40	3.335	17,81	-16,44	19.618	4,79	2.872	14,64	-13,88
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.561	49,82	0	0,00	0,00	760	-51,32	0	0,05	> 900,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.9. Realisasi Total Pendapatan Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2020 (Posisi per Triwulan I)

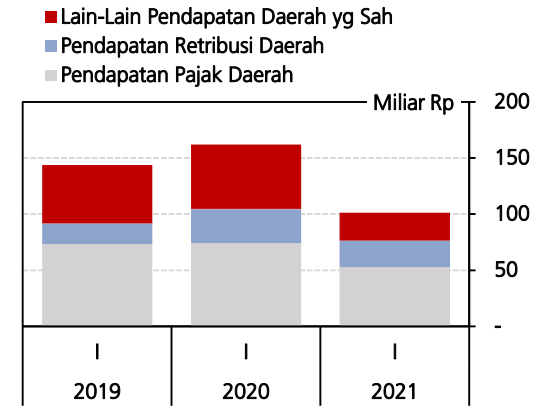


Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.10. Rincian Realisasi Total Pendapatan Pemkot/kab NTT Triwulan I 2021

Kinerja realisasi Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada triwulan I 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi total pendapatan tercatat sebesar Rp2,97 triliun, hanya mencapai 13,34% dari total anggaran. Secara nominal, realisasi tersebut terkontraksi 14,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini terutama bersumber dari realisasi Pendapatan Transfer yang terkontraksi 13,88% (yoy), seiring dengan *refocusing* anggaran oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan COVID-19. Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah juga terkontraksi 37,53% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, Pendapatan Pajak terkontraksi 28,95% (yoy), sedangkan Pendapatan

Retribusi terkontraksi 21,56% (yoy). Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian dan mobilitas yang masih lemah pada triwulan I 2021. Pendapatan pajak dan retribusi Pemerintah Kota dan Daerah mayoritas bersumber dari hotel, restoran, reklame, dan tempat wisata yang pada awal tahun belum dapat beroperasi normal.



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

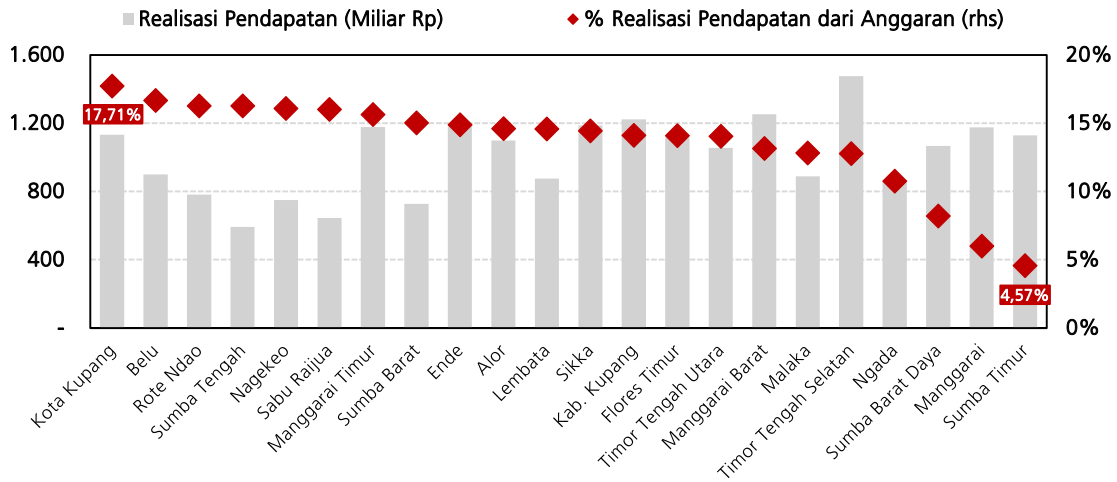
Grafik 2.11. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.12. Realisasi Pendapatan Transfer Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)

Secara spasial, persentase realisasi pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada triwulan I 2021 yang tertinggi dicapai oleh Kota Kupang. Realisasi pendapatan Kota Kupang tercatat sebesar Rp1,13 triliun, atau mencapai 17,71% dari target pendapatan. Sementara itu, bila dilihat secara nominal, realisasi pendapatan tertinggi dicapai oleh Timor Tengah Selatan, dengan realisasi mencapai Rp1,48 triliun.



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.13. Realisasi Pendapatan Pemkot/kab di NTT Secara Spasial Pada Triwulan I 2021

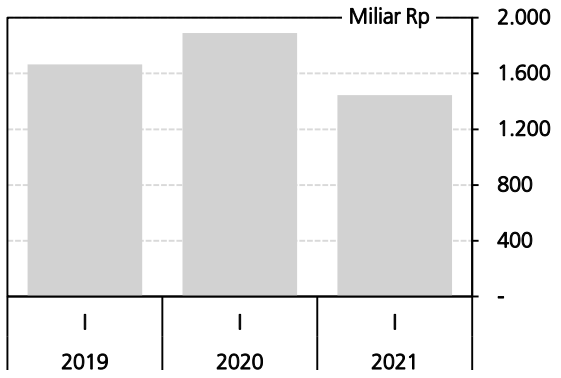
2.3.2 Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Anggaran Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp23,29 triliun, tumbuh hanya 0,13% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Komponen belanja utama adalah Belanja Operasi, yang terkontraksi 25,27% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, kontraksi paling dalam terjadi pada komponen anggaran Belanja Pegawai, yang terkontraksi 9,26% (yoy) seiring dengan *refocusing* anggaran dalam mengurangi perjalanan dinas di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, komponen anggaran Belanja Barang dan Jasa tumbuh 21,44% (yoy). Selanjutnya, anggaran Belanja Modal tumbuh 6,93% (yoy), sejalan dengan rencana penyelesaian berbagai proyek-proyek infrastruktur pemerintah daerah yang sempat tertunda di tahun sebelumnya.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

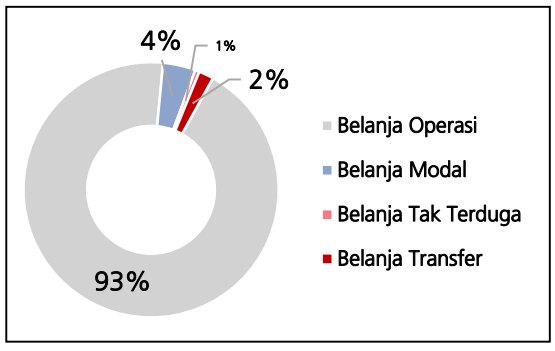
Kategori	2020					2021				
	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)	Anggaran APBD-P (M Rp)	*Growth* Anggaran (% yoy)	Realisasi APBD Tw I (M Rp)	Persentase Realisasi Tw I (%)	Growth Realisasi Tw I (% yoy)
TOTAL BELANJA	**23.255**	**-4,93**	**1.891**	**8,13**	**13,56**	**23.286**	**0,13**	**1.445**	**6,20**	**-23,59**
Belanja Operasi	**14.692**	**-1,60**	**1.834**	**12,48**	**17,95**	**14.900**	**1,42**	**1.350**	**9,06**	**-26,37**
- Belanja Pegawai	9.189	-0,70	1.390	15,13	3,68	8.329	-9,36	1.201	14,42	-13,62
- Belanja Barang dan Jasa	4.892	-8,39	236	4,82	15,02	5.941	21,44	147	2,47	-37,77
- Belanja Hibah	493	151,26	196	39,83	2.585,03	434	-12,00	2	0,49	-98,92
- Belanja Bantuan Sosial	118	-16,11	11	9,70	653,51	197	66,35	0	0,21	-96,38
Belanja Modal	**3.655**	**-29,90**	**24**	**0,67**	**2,89**	**3.909**	**6,93**	**60**	**1,53**	**143,58**
Belanja Tak Terduga	**607**	**1.100,42**	**9**	**1,54**	**13,51**	**181**	**-70,17**	**8**	**4,33**	**-15,93**
Belanja Transfer	**4.301**	**0,84**	**23**	**0,54**	**-70,18**	**4.296**	**-0,13**	**27**	**0,63**	**15,83**

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

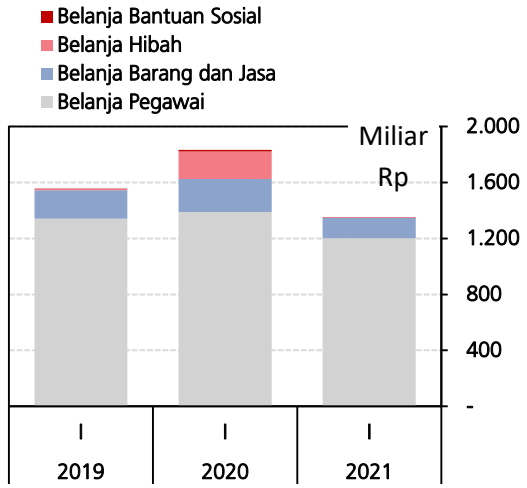
Grafik 2.14. Realisasi Total Belanja Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

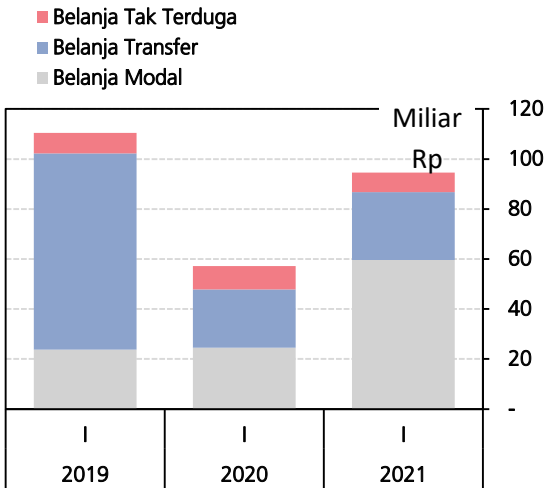
Grafik 2.15. Rincian Realisasi Total Belanja Pemkot/kab NTT Triwulan I 2021

Kinerja realisasi Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada triwulan I 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi Total Belanja tercatat sebesar Rp 1,45 triliun, hanya mencapai 6,20% dari total anggaran. Secara nominal, realisasi Total Belanja terkontraksi 23,59% (yoy) dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan kinerja belanja terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi Belanja Operasi yang terkontraksi 25,37% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, realisasi komponen Belanja Pegawai terkontraksi 13,62% (yoy), seiring penyesuaian anggaran perjalanan dinas. Realisasi komponen Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah juga terkontraksi masing-masing sebesar 37,77% (yoy) dan 96,38% (yoy). Di sisi lain, realisasi Belanja Modal tumbuh sebesar 143,58% (yoy), seiring dengan keberlanjutnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal yang baik menjadi penopang realisasi Total Belanja Kota dan Kabupaten secara keseluruhan.



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

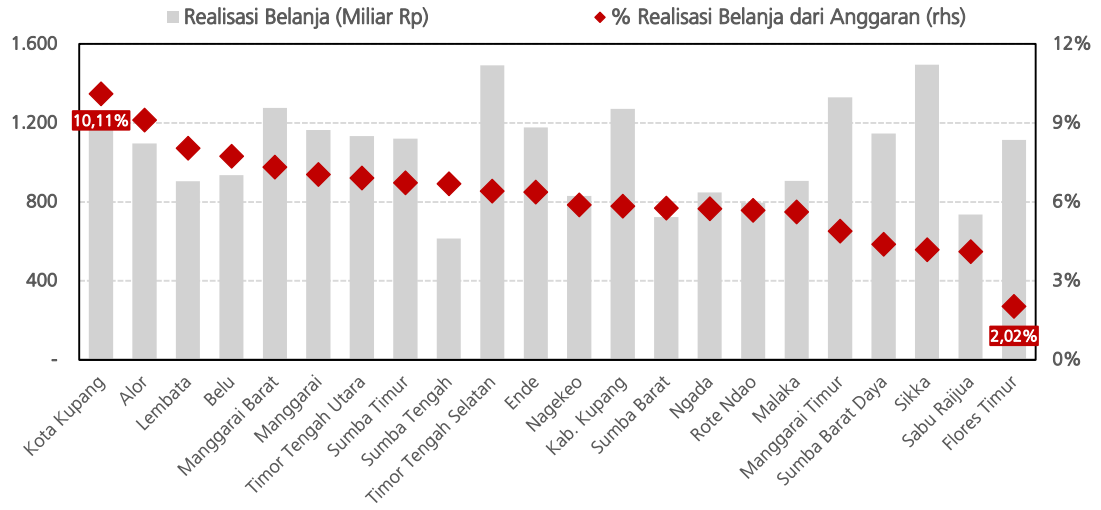
Grafik 2.16. Realisasi Belanja Operasi Pemkot/kab di NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.17. Realisasi Belanja Modal, Transfer, dan Tak Terduga Pemkot/kab di NTT Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan I)

Secara spasial, persentase realisasi belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada triwulan I 2021 yang tertinggi dicapai oleh Kota Kupang. Realisasi Belanja Kota Kupang tercatat sebesar Rp1,17 triliun, atau mencapai 10,11% dari anggaran. Sementara itu, nominal realisasi belanja tertinggi pada triwulan I 2021 dicapai oleh Kabupaten Sikka, dengan Total Belanja sebesar Rp1,49 triliun.



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.18. Realisasi Belanja Pemkot/kab di NTT Secara Spasial Pada Triwulan I 2021

2.4 APBN di Provinsi NTT

Anggaran Total Belanja APBN di NTT pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp19,12 triliun, tumbuh 4,70% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran Total Belanja terutama bersumber dari peningkatan Belanja Barang dan Belanja Modal, yang masing-masing tumbuh sebesar 7,09% (yoy) dan 12,36% (yoy). Kemudian, anggaran Belanja Transfer juga tumbuh sebesar 1,83% (yoy).

Kinerja realisasi Total Belanja APBN di NTT pada triwulan I 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi Total Belanja tercatat sebesar Rp3,09 triliun, tumbuh sebesar 64,97% (yoy). Hal ini terutama didorong oleh kenaikan realisasi belanja di seluruh komponen, terutama pada Belanja Modal. Realisasi Belanja Modal tumbuh tinggi sebesar 30,43% (yoy), seiring dengan berlanjutnya Proyek Strategis Nasional seperti PSN[1] antara lain Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu (Labuan Bajo), Bendungan Temef (Timor Tengah Selatan), Bendungan Manikin (Kabupaten Kupang), dan Bendungan Napun Gete (Sikka) dan penataan Labuan Bajo serta proyek lainnya yang sempat tertunda di tahun sebelumnya.

[1] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional tanggal 17 November 2020

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTT

Kategori	2020					2021				
	Anggaran APBN-P (M Rp)	*Growth* Pagu (% yoy)	Realisasi APBN Tw IV (M Rp)	Persentase Realisasi Tw IV (%)	Growth Realisasi Tw IV (% yoy)	Anggaran APBN-P (Rp M)	*Growth* Pagu (% yoy)	Realisasi APBN Tw IV (M Rp)	Persentase Realisasi Tw IV (%)	Growth Realisasi Tw IV (% yoy)
BELANJA	**18.256**	**4,58**	**1.873**	**10,26**	**9,34**	**19.115**	**4,70**	**3.138**	**16,17**	**67,47**
Belanja Pegawai	3.245	7,38	611	18,83	7,86	3.233	-0,34	652	18,72	6,77
Belanja Barang	3.703	-11,42	364	9,84	-10,40	3.965	7,09	475	11,99	30,43
Belanja Modal	3.808	1,87	596	15,64	71,20	4.279	12,36	1.189	27,79	99,59
Belanja Bantuan Sosial	13	-7,65	-	0,00	-	12	-6,90	-	0,00	-
Belanja Transfer	7.488	15,15	302	4,04	-22,94	7.625	1,83	821	10,77	171,46

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT, diolah

Bab III.

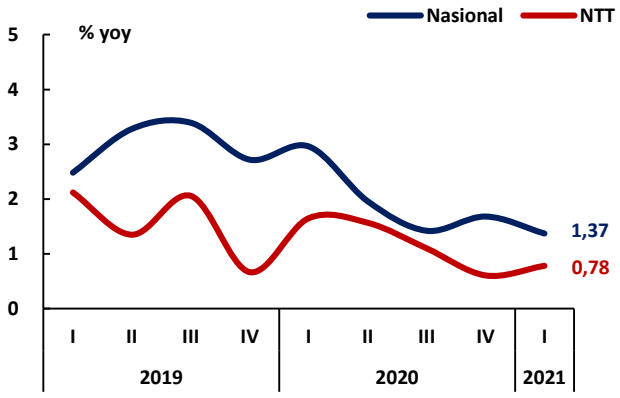
PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2021 tercatat sebesar 0,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,61% (yoy). Namun demikian, inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,37% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga ikan-ikan segar, seperti ikan kembung, tongkol dan tembang akibat produksi yang berkurang di tengah gelombang tinggi dan cuaca laut yang buruk. Kelompok makanan, minuman dan tembakau juga masih menjadi faktor pendorong inflasi, terutama akibat kenaikan harga berbagai jenis ikan segar.

Pada triwulan II 2021, inflasi Provinsi NTT diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2021. Meningkatnya tekanan inflasi merupakan dampak dari Siklon Tropis Seroja yang terjadi pada awal April 2021 yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, kematian hewan ternak, serta kerusakan kapal-kapal nelayan. Di sisi lain, PPKM yang dilakukan di Kota Kupang, Kab. Sumba Timur, serta PPKM Mikro di seluruh wilayah Provinsi NTT berisiko menahan konsumsi masyarakat sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi.

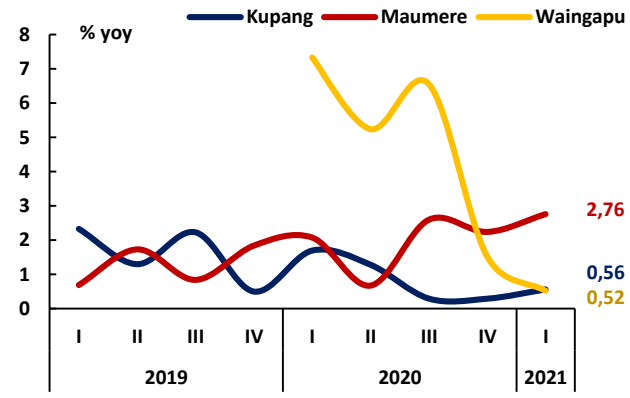
3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 0,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,61%. Inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,37% (yoy). Secara spasial, Kota Kupang mencatat inflasi sebesar 0,56% (yoy), Kota Maumere inflasi sebesar 2,76% (yoy), dan Kota Waingapu inflasi sebesar 0,52% (yoy).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan di Provinsi NTT, Triwulan I 2021

Triwulan I 2021		
Komoditas Inflasi	% yoy	Andil (% yoy)
Ikan Kembung	25,22	0,32
Kangkung	25,05	0,17
Ikan Tongkol	12,99	0,11
Ikan Tembang	25,89	0,09
Bayam	23,51	0,08
Emas Perhiasan	10,12	0,07
Tahu Mentah	14,72	0,06
Ikan Layang	43,32	0,05
Daging Sapi	11,25	0,05
Rokok Kretek Filter	2,11	0,05

Triwulan I 2021		
Komoditas Deflasi	% yoy	Andil (% yoy)
Angkutan Udara	-6,90	-0,21
Bawang Putih	-33,04	-0,11
Sirih	-45,50	-0,08
Biaya Pulsa Ponsel	-3,37	-0,08
Daging Babi	-11,85	-0,08
Apel	-28,40	-0,07
Wortel	-22,34	-0,07
Sawi Hijau	-7,12	-0,05
Gula Pasir	-6,97	-0,05
Semen	-4,76	-0,05

Sumber: BPS (diolah)

Tekanan inflasi Provinsi NTT yang meningkat terutama bersumber dari deflasi kelompok transportasi yang tidak sedalam triwulan sebelumnya. Deflasi kelompok transportasi tercatat sebesar 1,18% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya sebesar 4,16% (yoy). Program vaksinasi yang dimulai sejak awal tahun 2021 dan mobilitas masyarakat yang meningkat secara perlahan mendorong permintaan pada tarif angkutan udara. Meskipun demikian, permintaan terhadap tarif angkutan udara belum pulih kepada level sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, kelompok makanan, minuman dan tembakau juga masih menjadi faktor pendorong inflasi Provinsi NTT. Harga berbagai jenis ikan segar masih rentan mengalami gejolak. Kemudian, beberapa komoditas sayuran seperti kangkung dan bayam juga mengalami kenaikan harga karena belum memasuki masa panen.

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada triwulan I 2021 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 2,38% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,78% dari inflasi total. Di sisi lain, kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar 1,18% (yoy) dan merupakan faktor utama penahan laju inflasi secara keseluruhan.

Tabel 3.2. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas

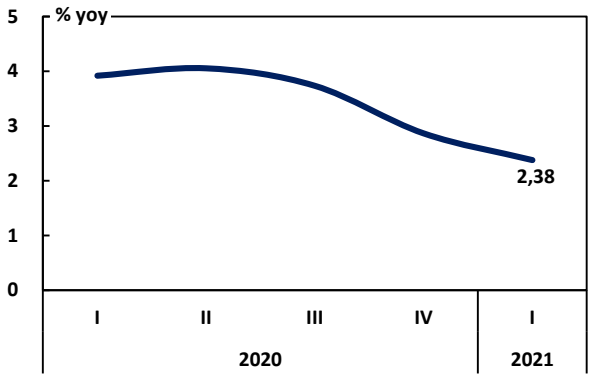
Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)	
	Jan '21	Feb '21	Mar '21	Tw IV '20	Tw I '21
Inflasi Umum	**0,40**	**0,44**	**-0,36**	**0,61**	**0,78**
Makanan, Minuman & Tembakau	1,05	1,56	-0,73	2,87	2,38
Pakaian & Alas Kaki	0,00	-0,11	-0,05	-0,47	-0,97
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	0,07	0,05	0,00	-0,27	0,06
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,09	0,01	0,21	0,60	0,52
Kesehatan	-0,09	-0,01	0,11	6,39	4,67
Transportasi	0,27	-0,84	-0,72	-4,66	-1,18
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,09	0,22	-0,01	-2,04	-1,71
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0,08	0,03	-1,07	-0,12	-0,06
Pendidikan	0,00	0,00	-0,00	0,62	0,62
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0,13	0,05	0,12	1,60	0,69
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	-0,06	0,05	-0,19	4,06	1,84

Sumber: BPS (diolah)

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

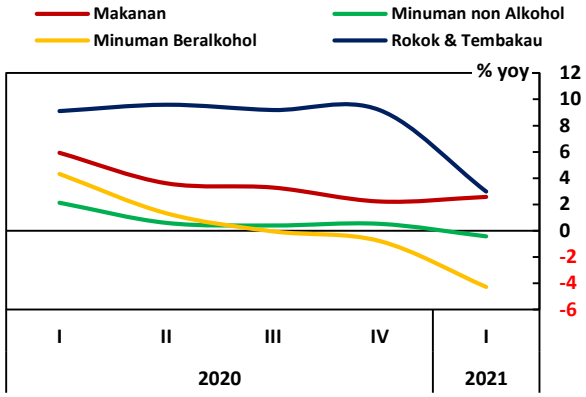
Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,87% (yoy). Inflasi kelompok terutama bersumber dari kenaikan harga berbagai jenis ikan segar, antara lain ikan kembung, ikan tongkol, ikan tembang, dan ikan layang. Ikan segar rentan mengalami gejolak harga akibat faktor cuaca dan gelombang tinggi di laut. Sementara itu, bayam dan kangkung juga mengalami kenaikan harga karena belum memasuki masa panen, sehingga turut menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.

Di sisi lain, penurunan harga bawang putih, gula pasir, dan daging babi menjadi faktor penahan laju inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Bawang putih dan gula pasir mengalami penurunan harga berkat pasokan yang terjaga. Sementara itu, daging babi juga mengalami normalisasi harga akibat pasokan yang mulai pulih, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan wabah *African swine flu.*



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

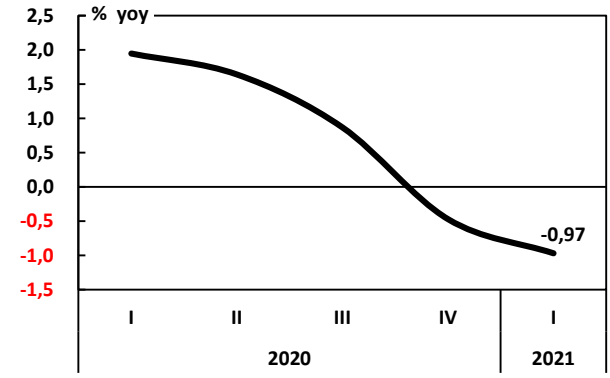


Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau per Sub Kelompok

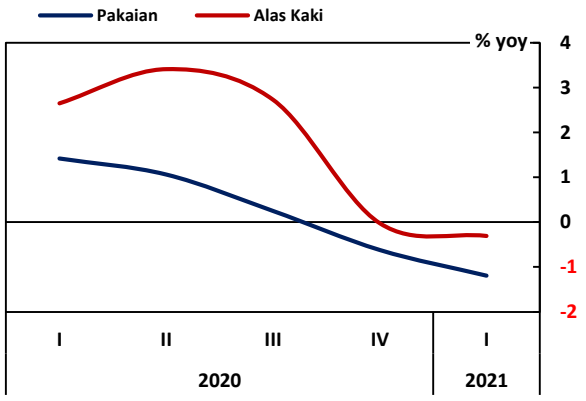
3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,97% (yoy), lebih dalam dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,47% (yoy). Deflasi kelompok bersumber dari penurunan harga blus wanita, sepatu pria, dan seragam sekolah anak seiring dengan melemahnya konsumsi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, kenaikan harga sandal kulit pria dan baju kaos pria menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.5 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki



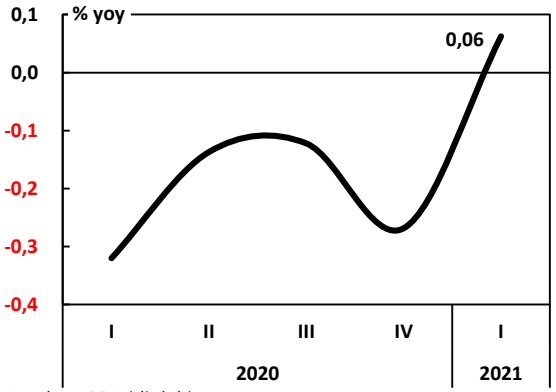
Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.6. Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki per Sub Kelompok

3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga

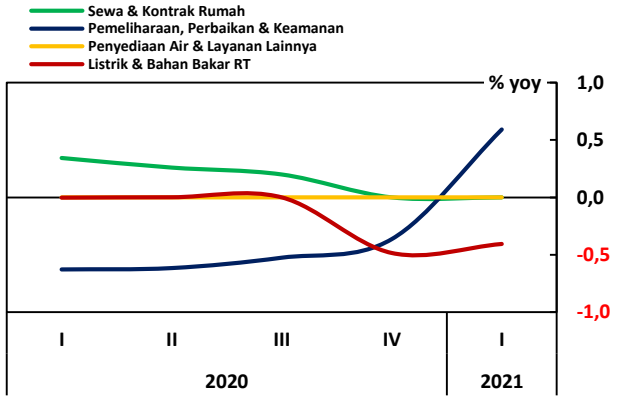
Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,27% (yoy). Tekanan inflasi kelompok perumahan,

air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang meningkat menjadi salah satu sumber peningkatan tekanan inflasi Provinsi NTT secara keseluruhan. Inflasi kelompok terutama bersumber dari kenaikan harga bahan-bahan konstruksi seperti seng, pasir dan beton. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi bahan-bahan konstruksi di awal tahun 2021 sebagai dampak dari penyelesaian proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang sempat tertunda di tahun sebelumnya akibat COVID-19.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.7. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

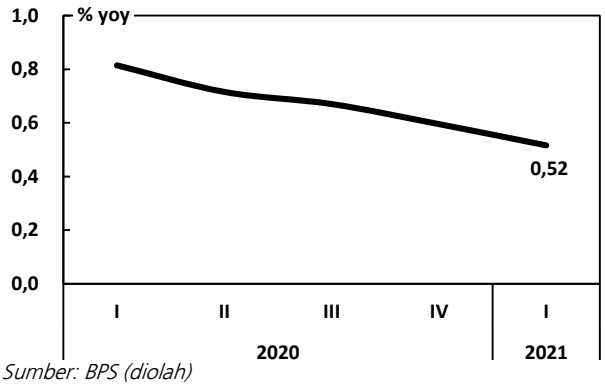


Sumber: BPS (diolah)

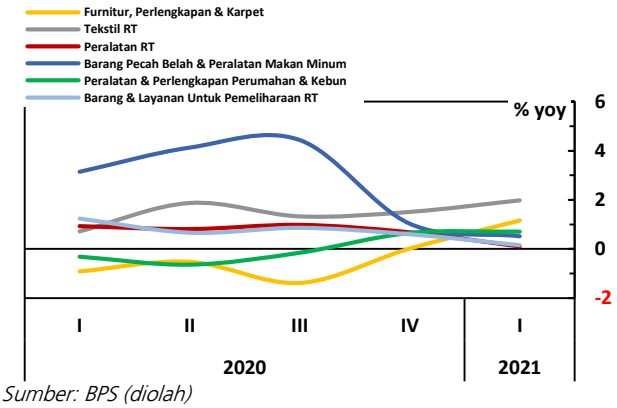
Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga per Sub Kelompok

3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,60% (yoy). Melandainya tekanan inflasi kelompok terutama bersumber dari penurunan harga sabun cuci piring, kasur, dan kompor. Di sisi lain, kenaikan harga lemari pakaian, pengharum/pelembut cucian, dan kain gorden menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.



Sumber: BPS (diolah)



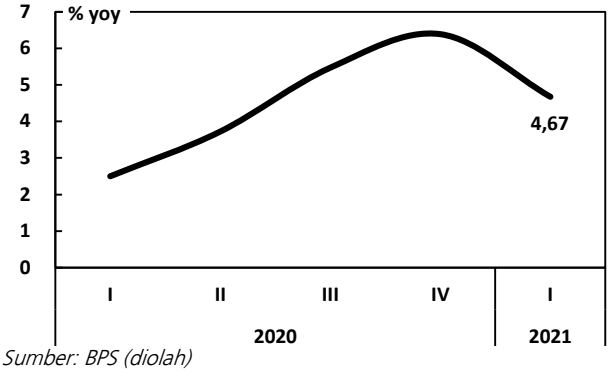
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga

Grafik 3.10. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga per Sub Kelompok

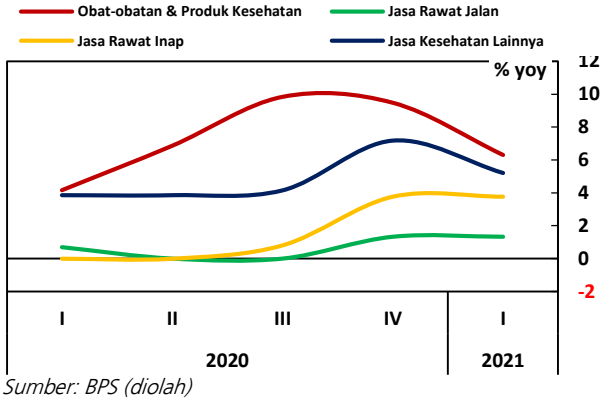
3.2.5 Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 4,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 6,39% (yoy). Inflasi kelompok kesehatan yang melandai terutama disebabkan oleh normalisasi harga obat-obatan dan produk kesehatan setelah sebelumnya terus mengalami kenaikan harga di tengah pandemi COVID-19.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.11. Inflasi Kelompok Kesehatan

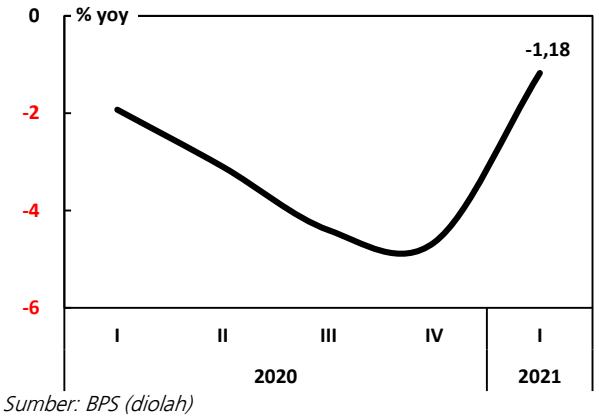


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.12. Inflasi Kelompok Kesehatan per Sub Kelompok

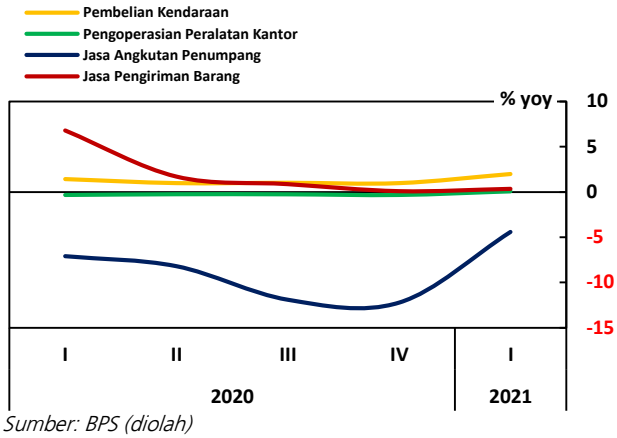
3.2.6 Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 1,18% (yoy), tidak sedalam deflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Tarif angkutan udara mengalami deflasi sebesar 6,90% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 17,53% (yoy). Program vaksinasi yang dimulai pada awal tahun 2021 berdampak pada mobilitas masyarakat yang meningkat, meskipun masih di bawah level sebelum pandemi COVID-19. Di sisi lain, kenaikan harga mobil dan sepeda motor menjadi faktor pendorong inflasi kelompok, sejalan dengan kebijakan dealer berbagai kendaraan bermotor yang selalu menaikkan harga di awal setiap tahun.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.13. Inflasi Kelompok Transportasi

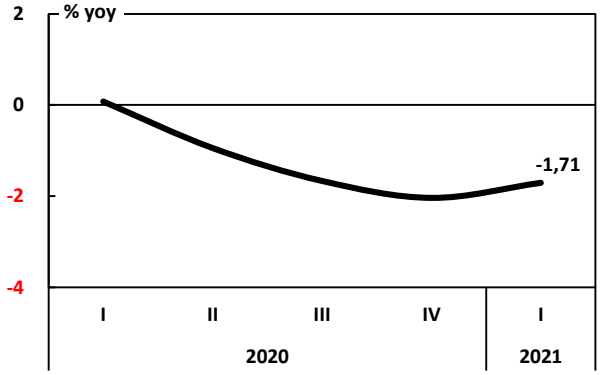


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.14. Inflasi Kelompok Transportasi per Sub Kelompok Komoditas

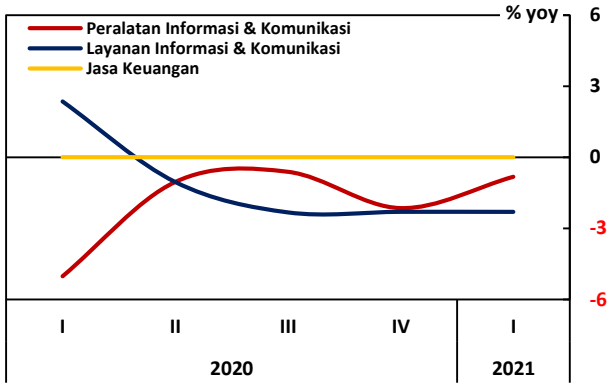
3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 1,71% (yoy), tidak sedalam deflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,04% (yoy). Deflasi kelompok terutama bersumber dari penurunan biaya pulsa ponsel, serta harga telepon seluler dan flash disk, seiring dengan penyesuaian harga oleh pedagang di tengah konsumsi yang lemah. Di sisi lain, kenaikan harga televisi berwarna, printer, dan biaya jaringan saluran TV menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.15. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

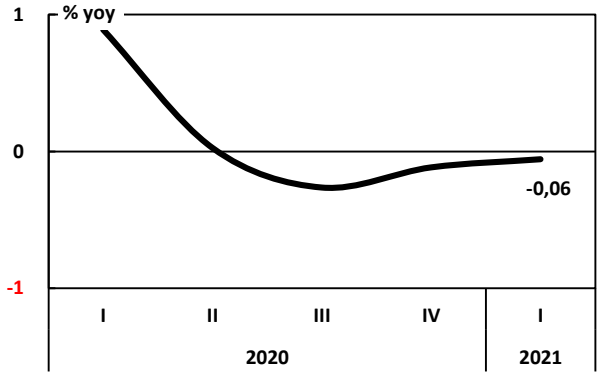


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.16. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok

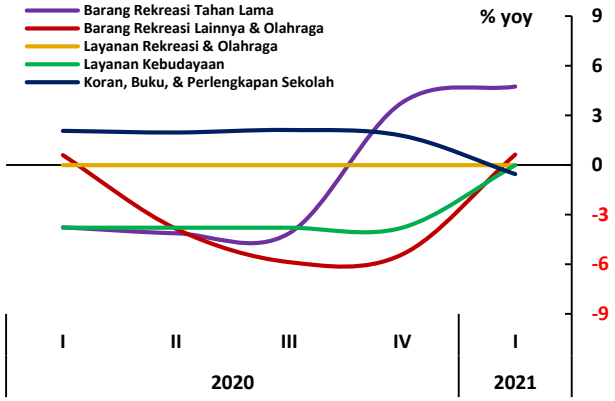
3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi sebesar 0,06%, tidak sedalam deflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,12% (yoy). Deflasi kelompok terutama bersumber dari penurunan harga tas sekolah, buku pelajaran, serta bola sepak, seiring dengan berkurangnya aktivitas rekreasi masyarakat di tengah PPKM Mikro. Di sisi lain, kenaikan harga pulpen, dan kamera menjadi faktor pendorong inflasi.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.17. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

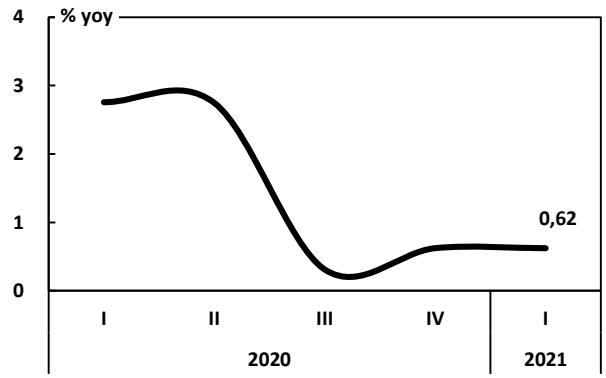


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.18. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya per Sub Kelompok

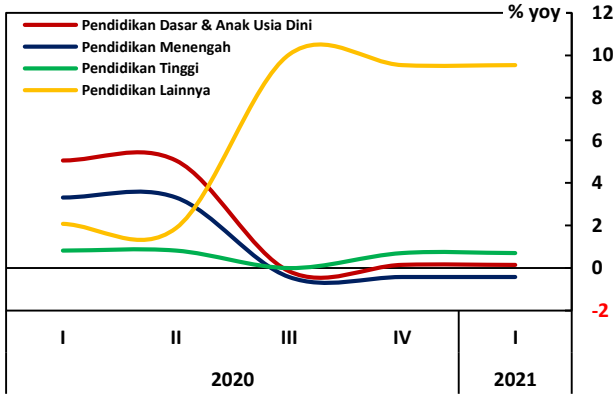
3.2.9 Kelompok Pendidikan

Kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,62% (yoy), tidak berubah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya. Kenaikan biaya bimbingan belajar menjadi faktor utama pendorong inflasi kelompok, sejalan dengan diberlakukannya kebijakan *learning from home* di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, penurunan biaya SMP/SLTP menjadi faktor utama penahan inflasi.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.19. Inflasi Kelompok Pendidikan

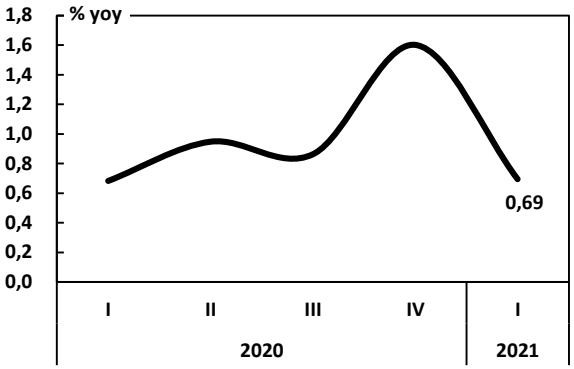


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.20. Inflasi Kelompok Pendidikan per Sub Kelompok

3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di triwulan sebelumnya sebesar 1,60% (yoy). Tekanan inflasi yang melandai terutama bersumber dari penurunan harga ayam goreng, seiring dengan pasokan daging ayam ras yang meningkat. Di sisi lain, kenaikan harga nasi dengan lauk, bubur kacang hijau, dan gado-gado menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.

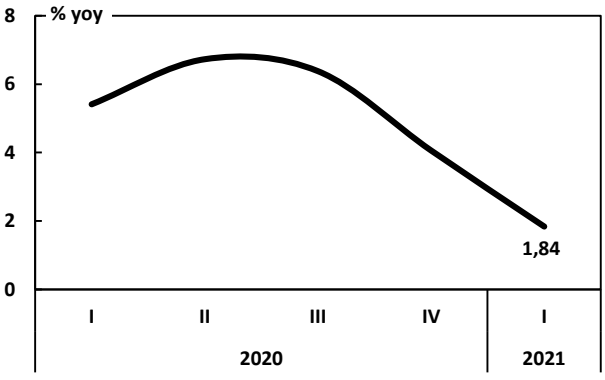


Sumber: BPS (diolah)

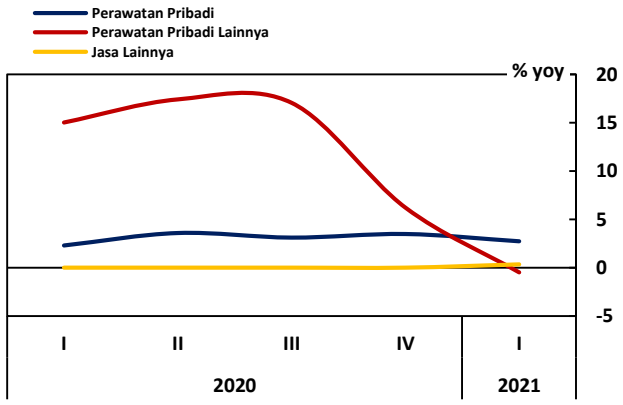
Grafik 3.21. Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 1,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 4,06% (yoy). Inflasi kelompok terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan, seiring dengan kenaikan harga emas di pasar global di tengah pandemi COVID-19. Meskipun demikian, harga emas perhiasan mulai mengalami normalisasi di awal tahun 2021. Di sisi lain, penurunan harga sirih, buah pinang, dan bedak bayi menjadi faktor penahan inflasi kelompok.



Sumber: BPS (diolah)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.22. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya secara Tahunan dan Bulanan

Grafik 3.23. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya per Sub Kelompok Komoditas

3.3. Inflasi Berdasarkan Kota

3.3.1 Inflasi Kota Kupang

Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,29% (yoy). Kenaikan harga ikan kembung, ikan ekor kuning, kangkung, dan bayam menjadi faktor utama pendorong inflasi di Kota Kupang. Ikan kembung dan ikan ekor kuning menjadi komoditas pendorong inflasi utama karena konsumsi masyarakat Kota Kupang yang tinggi, sedangkan produksinya rentan mengalami gejolak karena faktor cuaca dan gelombang tinggi di laut. Sementara itu, harga bayam dan kangkung mengalami kenaikan karena belum memasuki masa panen.

Di sisi lain, penurunan harga daging babi, bawang putih, serta tarif angkutan udara menjadi faktor utama penahan inflasi di Kota Kupang. Daging babi mengalami normalisasi harga sebagai dampak dari penanganan wabah *African swine flu* oleh pemerintah. Bawang putih mengalami penurunan harga akibat pasokan dari yang terjaga. Kemudian, tarif angkutan udara terus mengalami deflasi di tengah pandemi COVID-19, meskipun deflasinya tidak sedalam periode-periode sebelumnya.

3.3.2 Inflasi Kota Maumere

Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 2,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,24% (yoy). Kenaikan harga ikan layang, ikan selar serta daging ayam ras menjadi faktor utama pendorong inflasi di Kota Maumere. Ikan layang dan ikan selar menjadi komoditas pendorong inflasi utama karena konsumsi masyarakat Kota Maumere yang tinggi, sedangkan produksinya rentan mengalami gejolak karena faktor cuaca dan gelombang tinggi di laut. Kemudian, curah hujan yang tinggi juga berdampak pada banyaknya kematian ayam ternak, sehingga menyebabkan kenaikan harga daging ayam ras.

Di sisi lain, penurunan harga bawang putih dan cabai rawit menjadi faktor penahan inflasi Kota Maumere. Harga bawang putih mengalami penurunan berkat

pasokan yang terjaga. Sementara itu, harga cabai rawit mengalami penurunan, seiring dengan meningkatnya pasokan dari Sulawesi Tengah.

3.3.3 Inflasi Kota Waingapu

Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 0,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,52% (yoy). Penurunan harga sawi hijau, tomat, bawang putih dan gula pasir menjadi faktor menurunnya tekanan inflasi Kota Waingapu. Sawi hijau dan tomat mengalami penurunan harga akibat produksi yang meningkat di tengah masa panen. Sementara itu, bawang putih dan gula pasir mengalami penurunan harga berkat pasokan yang terjaga.

Di sisi lain, kenaikan harga ikan tongkol dan ikan tembang menjadi faktor pendorong inflasi Kota Waingapu. Ikan tongkol dan ikan tembang menjadi komoditas pendorong inflasi utama karena konsumsi masyarakat Kota Waingapu yang tinggi, sedangkan produksinya rentan mengalami gejolak karena faktor cuaca dan gelombang tinggi di laut

Tabel 3.3 Inflasi Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu di Triwulan I 2021 Secara Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Komoditas	Tw I '21 (% yoy)		
	Kupang	Maumere	Waingapu
Inflasi Umum	**0,56**	**2,76**	**0,52**
Makanan, Minuman & Tembakau	0,05	5,66	14,55
Pakaian & Alas Kaki	4,55	11,80	-4,41
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0,01	6,23	5,69
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	3,30	1,90	11,68
Kesehatan	0,23	23,65	2,22
Transportasi	-9,53	-14,02	1,65
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	-1,93	-26,45	-6,06
Rekreasi, Olahraga & Budaya	-1,91	32,00	-0,00
Pendidikan	-12,29	-11,24	-4,68
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	12,69	30,55	-0,71
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	4,55	27,27	2,48

Sumber : BPS (diolah)

3.4. *Tracking* dan Proyeksi Inflasi Triwulan I 2021

Secara bulanan, pada April 2021 Provinsi NTT mengalami inflasi yang tinggi sebesar 0,82% (mtm), meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,36% (mtm). Inflasi yang tinggi terutama didorong oleh Bencana Siklon Seroja yang terjadi pada awal April, yang berakibat pada banyaknya lahan pertanian yang rusak, terutama hortikultura. Hal ini tercermin dari kenaikan harga berbagai komoditas hortikultura seperti kangkung, cabai rawit, sawi putih, dan sawi hijau.

Prospek inflasi Provinsi NTT secara *year-on-year* pada triwulan II 2021 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2021. Siklon tropis Seroja yang terjadi pada awal April diprakirakan memberikan dampak berupa kenaikan tekanan inflasi, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sampai dengan 25 April 2021, terdapat 23 ribu hektar lahan padi serta 22 ribu hektar lahan jagung yang mengalami kerusakan. Sebanyak 1.120 ekor babi, 414 ekor sapi, 265 ekor kambing, serta puluhan ternak sedang-besar lainnya mati/hilang akibat banjir bandang. Selanjutnya, terdapat 358 kapal nelayan yang hilang, rusak, atau terdampak akibat badi, sehingga berisiko menghambat jumlah tangkapan ikan segar. Di sisi lain, kebijakan PPKM yang dilakukan di Kota Kupang dan Kab. Sumba Timur, serta PPKM Mikro yang dilakukan di seluruh wilayah Provinsi NTT dapat menahan konsumsi masyarakat, sehingga dapat menjadi faktor penahan inflasi.

3.5. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID

Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi dan implementasi program-program. Upaya-upaya yang dilakukan TPID adalah sebagai berikut:

- Rutin melaksanakan rapat koordinasi TPID, baik rapat tim teknis maupun *High Level Meeting*.
- Meningkatkan produksi bawang merah dan aneka cabai, terutama di daerah Kab. Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Rote Ndao.
- Mengumpulkan data Pengolahan Informasi Pasar (PIP) untuk memantau harga dan pasokan komoditas pendukung peternakan, terutama pakan ternak.

- Membangun tiga pabrik pakan ternak yang berlokasi di Kab. Manggarai Timur, Sumba Tengah, dan Kupang. Setiap pabrik dirancang memiliki kapasitas produksi 30 ton pakan ternak per bulan. Pabrik ternak tersebut ditargetkan sudah mulai operasional di tahun 2021 dan diharapkan dapat mendukung stabilisasi produksi daging ayam, daging sapi, dan daging babi.
- Melakukan operasi pasar dan program pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk memastikan kecukupan pasokan dan stabilitas harga.
- Rencana menerbitkan izin usaha pembudidayaan ikan bagi pelaku usaha yang usahanya mencakup lintas kabupaten/kota.
- Melanjutkan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dalam rangka memperkuat pasokan jagung sebagai pendukung pabrik pakan ternak.
- Bersama dengan Kementerian Pertanian, membangun kawasan *Food Estate* di Kabupaten Sumba Tengah dengan total luas 10.000 ha dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan.
- Menjaga kelancaran distribusi melalui Pelabuhan Tenau di Kupang, terutama untuk komoditas pokok masyarakat.

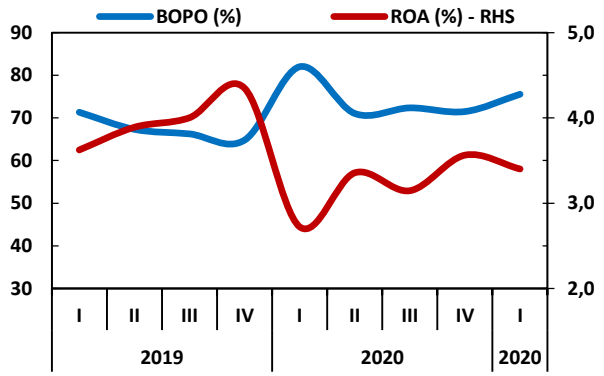
Bab IV.
STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 masih terjaga. Profitabilitas dan fungsi intermediasi sedikit menurun, seiring dengan konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. DPK tumbuh sebesar 3,65% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, ditopang oleh tabungan masyarakat perseorangan yang meningkat. Namun penyaluran kredit melambat, dengan pertumbuhan sebesar 3,60% (yoy). Kredit usaha korporasi mencatat pertumbuhan yang tinggi sebesar 39,61% (yoy). Namun demikian, kredit usaha UMKM terkontraksi sebesar 2,05% (yoy). Secara keseluruhan, kualitas kredit secara keseluruhan masih terjaga, dengan NPL (gross) sebesar 1,93%.

4.1 Kondisi Umum

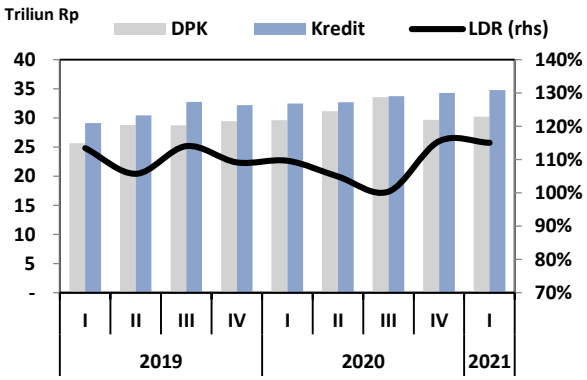
4.1.1 Kinerja Bank Umum

Pada triwulan I 2021 kinerja bank umum di Provinsi NTT masih terjaga, meskipun mengalami penurunan. *Return on Asset* (ROA) perbankan tercatat sebesar 3,40%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, efisiensi perbankan juga sedikit menurun, tercermin dari rasio beban operasional atas pendapatan operasional (BOPO) sebesar 75,52. Fungsi intermediasi perbankan tercatat sebesar 115,06%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Risiko kredit perbankan juga masih terjaga, dengan rasio NPL (gross) sebesar 1,93%, masih di bawah level 5%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1: Perkembangan Profitabilitas Bank Umum



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2: Perkembangan LDR Bank Umum

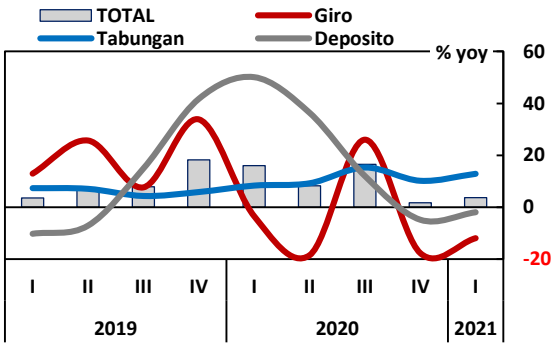
Tabel 4.1: Perkembangan Indikator Bank Umum di Provinsi NTT

Indikator	Nominal (Miliar Rp)					Pertumbuhan (% yoy)				
	2020				2021	2020				2021
	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	I
Aset	**43.917**	**46.159**	**48.994**	**44.857**	**45.497**	**17,85**	**13,00**	**14,29**	**4,46**	**3,60**
DPK	**29.651**	**31.154**	**33.605**	**30.085**	**30.739**	**15,46**	**8,11**	**16,90**	**1,99**	**3,67**
Giro	5.614	6.408	7.616	3.672	4.904	(3,18)	(16,51)	28,53	(16,39)	(12,65)
Tabungan	14.665	15.605	16.549	17.992	16.518	8,38	9,08	15,03	9,95	12,64
Deposito	9.372	9.141	9.441	8.421	9.317	47,58	33,74	11,91	(3,66)	(0,59)
Kredit	**32.521**	**32.699**	**33.751**	**34.297**	**34.824**	**11,62**	**7,28**	**2,92**	**6,50**	**7,08**
Modal Kerja	10.293	11.394	11.077	11.385	11.716	14,52	16,99	4,79	10,62	13,82
Investasi	2.653	3.225	2.315	2.310	2.293	4,81	24,48	(25,06)	(10,40)	(13,57)
Konsumsi	19.574	19.788	20.358	20.600	20.815	11,11	9,01	6,40	6,54	6,34
% LDR	**109,68**	**104,96**	**100,43**	**114,00**	**113,29**					
% NPL (Gross)	**2,02**	**1,85**	**1,86**	**1,79**	**1,93**					

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi bank), diolah

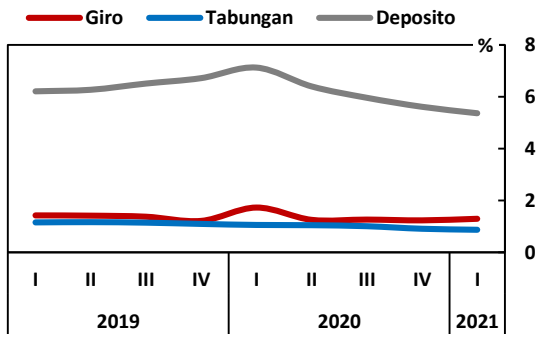
4.1.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pada triwulan I 2021, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 3,65% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,65% (yoy). Pertumbuhan DPK yang meningkat terutama bersumber dari DPK jenis tabungan yang tumbuh sebesar 6,43% (yoy). Di sisi lain, DPK jenis giro dan deposito masih mengalami kontraksi, meskipun perlahan mencatat perbaikan. Giro terkontraksi 11,94% (yoy), terutama dipengaruhi oleh giro pemerintah daerah yang menurun. Hal ini sejalan dengan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat yang menurun sebagai dampak realokasi anggaran. Selanjutnya, deposito juga terkontraksi 1,89% (yoy), terutama dipengaruhi oleh suku bunga deposito yang terus menurun sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Suku bunga deposito yang menurun ini mendorong nasabah-nasabah segmen atas untuk memindahkan likuiditas dari deposito ke aset lain dengan *yield* yang lebih tinggi.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3: Pertumbuhan DPK dan Komponennya

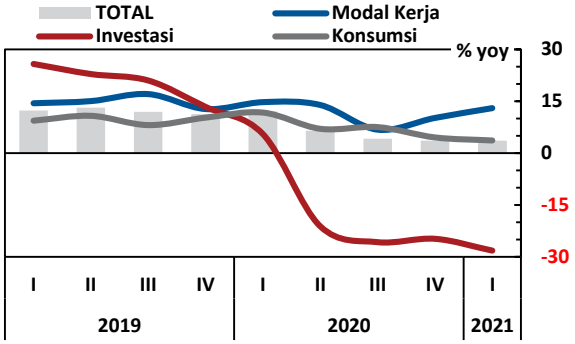


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4: Suku Bunga Tertimbang Berdasarkan Jenis Simpanan

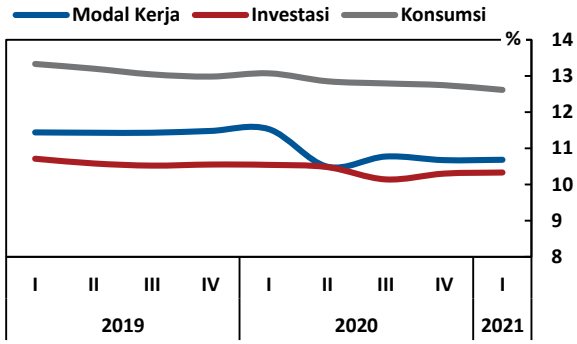
4.1.3 Penyaluran Kredit

Pertumbuhan kredit mencapai 3,65% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,13% (yoy). Perlambatan kinerja penyaluran kredit terutama bersumber dari kredit konsumsi yang merupakan mayoritas dari total kredit yang disalurkan di NTT. Kredit konsumsi tumbuh sebesar 4,52%s (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,51% (yoy). Kinerja penyaluran kredit konsumsi yang melambat sejalan dengan PDRB konsumsi rumah tangga yang belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, suku bunga tertimbang kredit konsumsi terus melanjutkan tren penurunan, sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia.



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi proyek), diolah

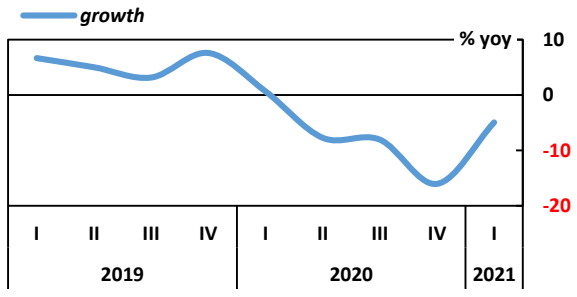
Grafik 4.5: Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6: Suku Bunga Tertimbang Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

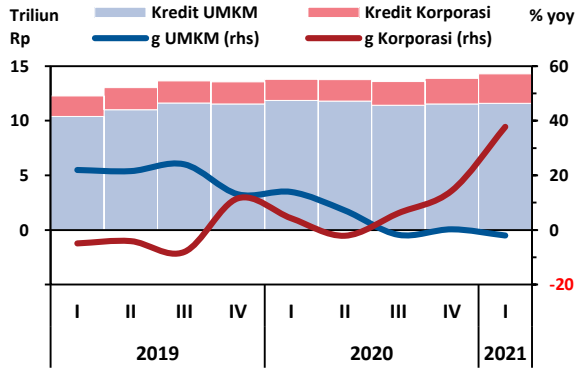
Kinerja kredit modal kerja mengalami peningkatan, sedangkan kredit investasi masih terkontraksi. Kredit modal kerja tumbuh sebesar 12,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,14% (yoy). Sementara itu, kredit investasi terkontraksi 28,19% (yoy), melanjutkan tren dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,78% (yoy).



Sumber: BPS, diolah

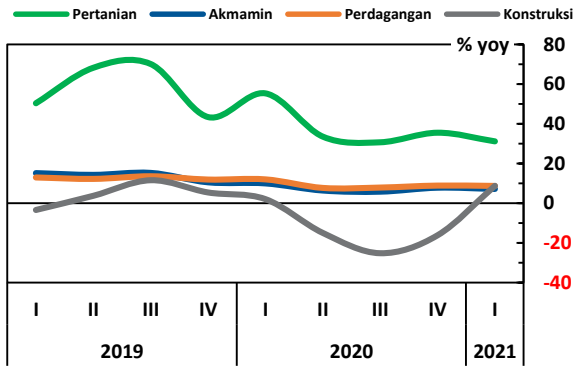
Grafik 4.7: Pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi NTT

Bila dilihat berdasarkan jenisnya, kredit usaha di NTT didominasi oleh UMKM. Sementara itu bila dilihat berdasarkan sektor, kredit usaha didominasi oleh sektor perdagangan. Kredit usaha sektor perdagangan tumbuh sebesar 8,71% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,87% (yoy). Selanjutnya, kredit usaha sektor konstruksi tumbuh sebesar 8,77% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 16,19% (yoy). Perbaikan kredit sektor konstruksi terkonfirmasi oleh perbaikan kinerja PDRB LU Konstruksi yang terutama didorong oleh dilanjutkannya pengerjaan proyek baik Proyek Strategis Nasional maupun proyek infrastruktur yang sempat tertunda di tahun 2020 akibat COVID-19.



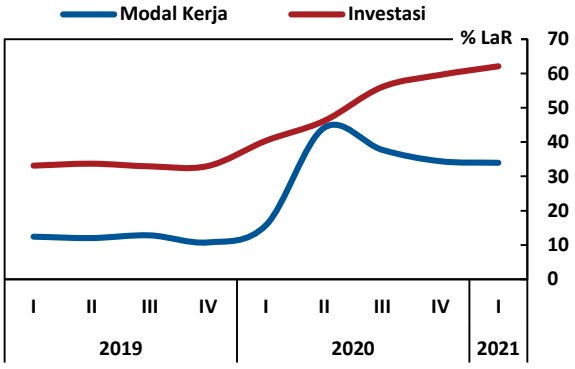
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8: Perkembangan Kredit Usaha Berdasarkan Kategori Usaha



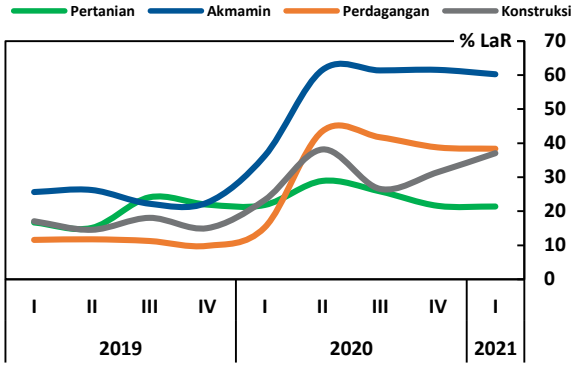
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9: Pertumbuhan Kredit Usaha di Beberapa Sektor Ekonomi



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10: Risiko Kredit Usaha



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11: Risiko Kredit Usaha *(Loan at Risk)* di Beberapa Sektor Ekonomi

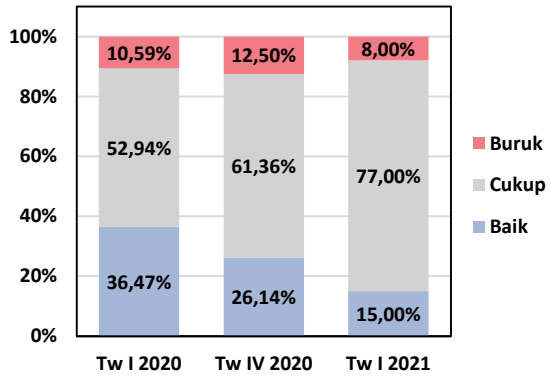
Pada umumnya, kualitas kredit usaha (risiko kredit) masih stabil. *Loan-at-risk* (LaR) kredit modal kerja tercatat menurun, sementara LaR kredit investasi masih terus meningkat. Bila dilihat berdasarkan sektor, LaR kredit di sektor akmamin dan perdagangan mengalami penurunan, sedangkan LaR kredit sektor konstruksi mengalami

peningkatan. Risiko kredit usaha (modal kerja dan investasi) secara keseluruhan masih terjaga, dengan NPL *gross* sebesar 3,91%.

4.2 Kinerja Korporasi Nonkeuangan

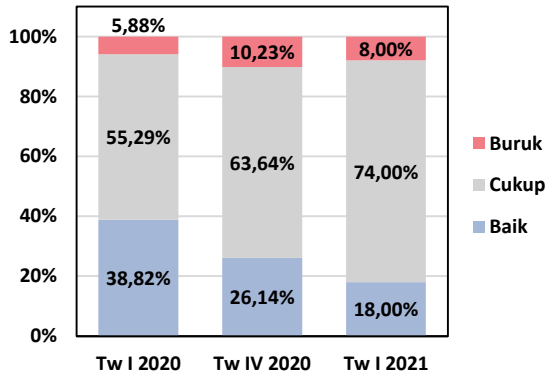
4.2.1 Kondisi dan Prospek Usaha

Di triwulan I 2021, korporasi nonkeuangan cenderung lebih dapat bertahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KPw BI NTT. Dari segi profitabilitas, hanya sebanyak 8% dari perusahaan responden menyatakan mengalami kondisi buruk, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu dari segi likuiditas, hanya sebanyak 8% dari perusahaan responden menyatakan mengalami kondisi buruk, juga menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

Grafik 4.12: Kondisi Profitabilitas Korporasi

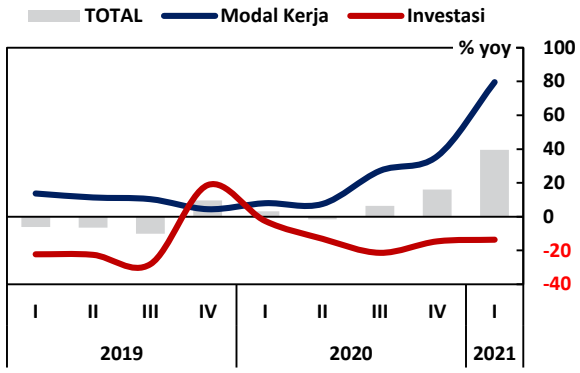


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

Grafik 4.13: Kondisi Likuiditas Korporasi

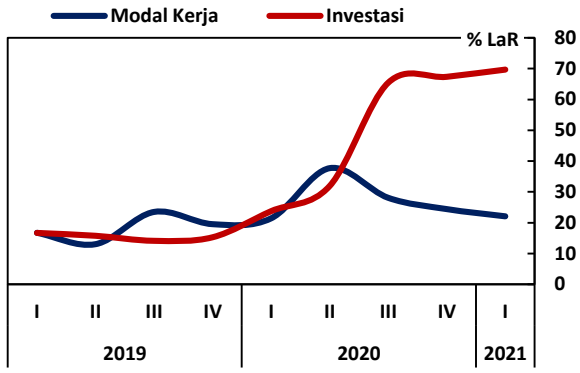
4.2.2 Penyaluran Kredit Korporasi

Kredit Korporasi (non-UMKM) tumbuh sebesar 39,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,10% (yoy). Pertumbuhan kredit korporasi terutama bersumber dari kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 79,52% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, pertumbuhan modal kerja paling tinggi terdapat pada korporasi perdagangan retail yang tumbuh sebesar 87,29% (yoy). Di sisi lain, kredit investasi korporasi masih terkontraksi sebesar 13,60% (yoy), masih melanjutkan tren dari periode-periode sebelumnya.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14: Pertumbuhan Kredit Korporasi Non Keuangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

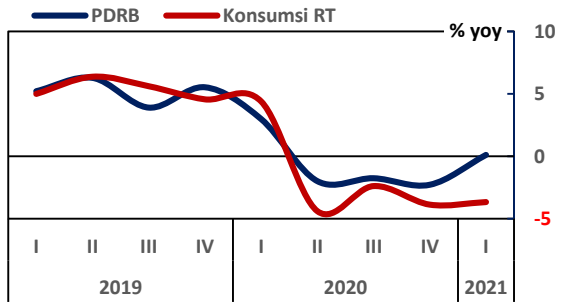
Grafik 4.15: Risiko Kredit *(Loan at Risk)* Korporasi Non Keuangan

Hal yang serupa juga terjadi pada aspek kualitas/risiko kredit korporasi. Kualitas kredit modal kerja mengalami perbaikan, tercermin dari LaR sebesar 22,05%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat LaR kredit modal kerja korporasi mulai mendekati level sebelum pandemi COVID-19. Di sisi lain, kualitas kredit investasi masih terus menurun, tercermin dari LaR sebesar 69,98%, melanjutkan tren peningkatan dari periode-periode sebelumnya.

4.3 Kinerja Keuangan Rumah Tangga

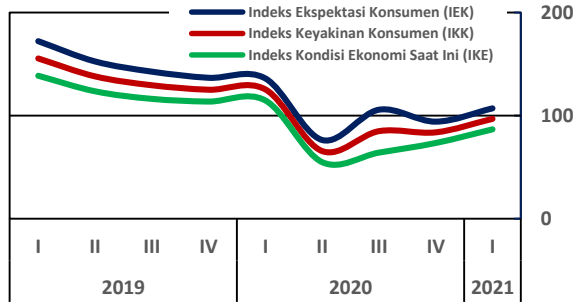
4.3.1 Kondisi Rumah Tangga

Kinerja keuangan sektor rumah tangga terindikasi mengalami perbaikan terbatas. PDRB Konsumsi Rumah Tangga tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,67% (yoy), sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 3,88% (yoy). DPK rumah tangga tumbuh meningkat, namun kredit rumah tangga melambat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung menahan konsumsi dan lebih memilih untuk menabung pada triwulan I 2021.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16: Pertumbuhan PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga

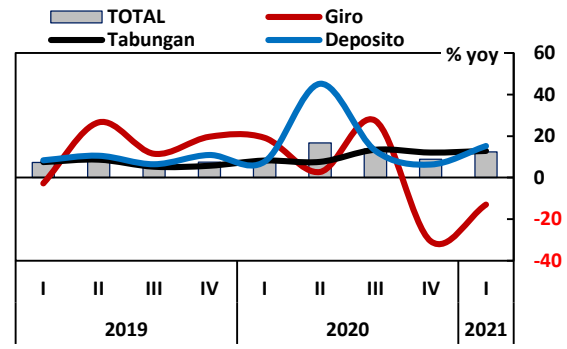


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17: Survei Konsumen Bank Indonesia

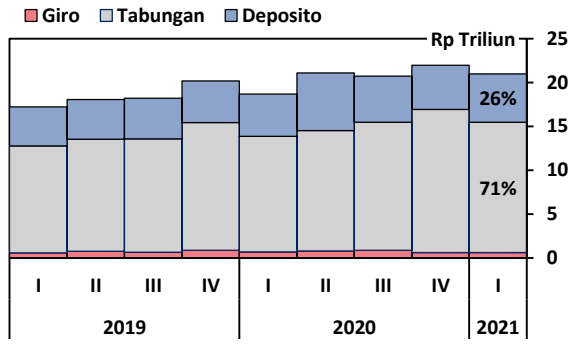
4.3.2 Penghimpunan DPK Rumah Tangga

DPK rumah tangga tumbuh sebesar 12,44% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,80% (yoy). Hal ini terutama bersumber dari tabungan rumah tangga yang tumbuh 12,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Deposito rumah tangga juga tumbuh sebesar 15,23% (yoy). Di sisi lain, giro rumah tangga masih terkontraksi sebesar 12,94% (yoy), meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18: Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

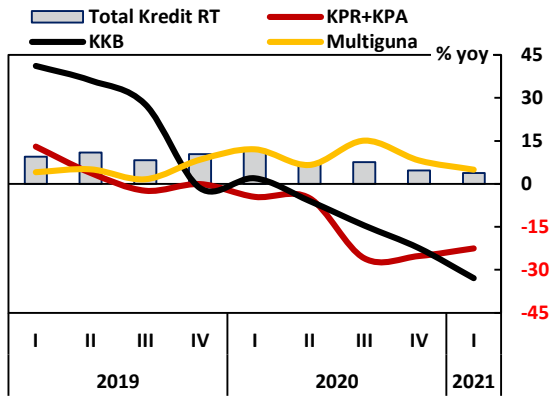


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19: Preferensi Jenis Simpanan Nasabah Rumah Tangga

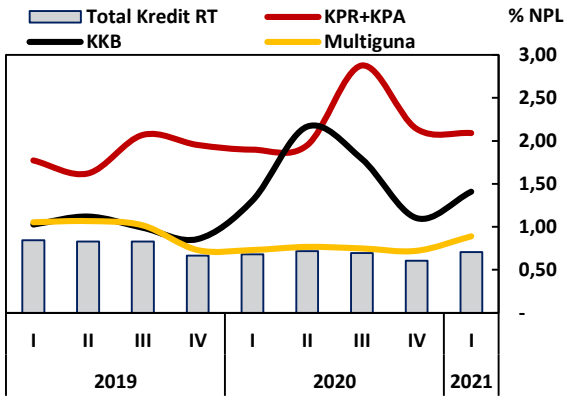
4.3.3 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Kredit rumah tangga tumbuh sebesar 3,76% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,66% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja kredit multiguna, seiring dengan konsumsi rumah tangga yang masih lemah. Kredit multiguna tumbuh sebesar 4,89% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,12% (yoy). Sementara itu, KPR/KPA (Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen) serta KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) masih terkontraksi, masing-masing sebesar 22,56% (yoy) dan 32,90% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat NTT dalam membeli tempat tinggal dan kendaraan masih belum pulih. Selain itu, terdapat kecenderungan dari pihak perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan KPR/KPA dan KKB, sehingga menjadi faktor perlambatan penyaluran kredit.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20: Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga



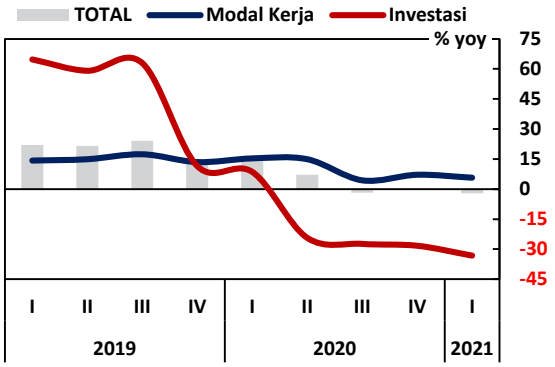
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21: Risiko Kredit Rumah Tangga *(Non-Performing Loan)*

4.4 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

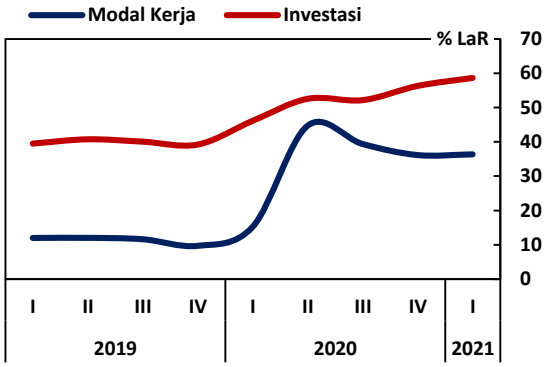
4.4.1 Penyaluran Kredit UMKM

Kredit UMKM terkontraksi sebesar 2,05% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 0,23% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh kredit investasi yang terkontraksi sebesar 33,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 28,24% (yoy). Kemudian, kredit modal kerja UMKM juga mengalami perlambatan, sehingga tidak mampu menopang kinerja kredit UMKM secara keseluruhan. Kredit modal kerja UMKM tumbuh sebesar 5,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,10% (yoy).



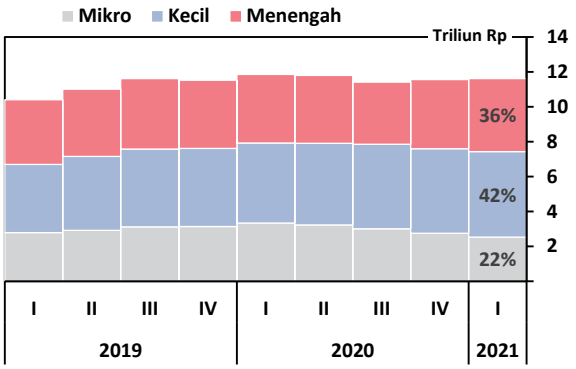
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22: Pertumbuhan Kredit UMKM



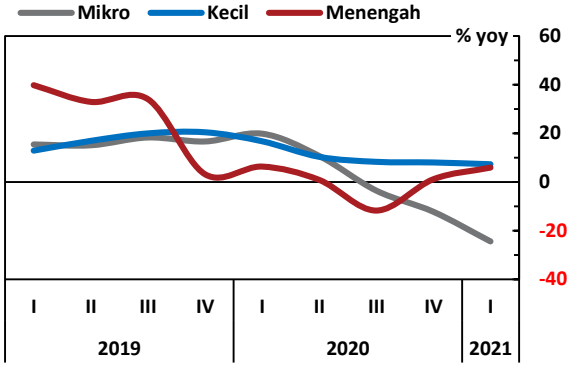
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23: Risiko Kredit UMKM *(Loan at Risk*



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24: Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25: Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Bila dilihat lebih rinci, penurunan kinerja kredit UMKM terutama terjadi pada usaha dengan skala mikro. Kredit usaha mikro terkontraksi sebesar 24,36% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 12,18% (yoy). Hal ini berdampak pada pangsa kredit usaha mikro yang terus mengecil bila dibandingkan dengan kredit UMKM secara keseluruhan. Di sisi lain, kredit usaha skala kecil dan skala menengah masih menunjukkan kinerja yang relatif baik, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,31% (yoy) dan 5,98% (yoy).

Bab V.
PENYELENGGARAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- Pembayaran tunai mengalami kondisi net inflow sesuai pola historis awal tahun pasca berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- Sistem pembayaran nilai besar BI-RTGS mengalami perbaikan, sementara nilai kecil SKNBI masih tertahan.

5.1. Kondisi Umum

Pembayaran tunai dan non tunai tetap bertumbuh di awal tahun 2021. Aliran uang kartal perbankan di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 mengalami *net inflow*[1] sebesar Rp3,06 triliun. Banyaknya uang masuk pada triwulan laporan seiring berakhirnya perayaan HBKN yang memerlukan likuiditas dalam jumlah besar. Dari sisi non tunai, nominal transaksi BI RTGS tumbuh membaik sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian NTT di triwulan I 2021. Sementara itu, SKNBI mengalami perlambatan baik secara nominal maupun volume.

Inklusi keuangan secara bertahap juga bertumbuh tercermin dari meningkatnya jumlah kepemilikan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Pandemi COVID-19 mendorong peningkatan akseptansi dan preferensi masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik. Transaksi elektronik terus mengalami pertumbuhan baik dari nominal maupun volume. Sementara itu, nominal transaksi APMK mengalami perlambatan seiring daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Provinsi NTT

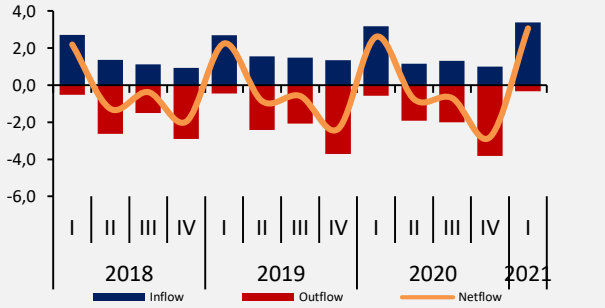
5.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai di Provinsi NTT

Aliran uang kartal perbankan di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 mengalami *net inflow* sebesar Rp3,06 triliun. Kondisi *net inflow* di awal tahun sesuai dengan pola

[1] Uang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih tinggi dibandingkan uang keluar

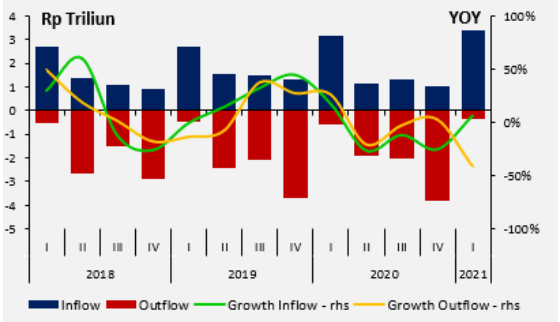
historis aliran uang kartal yang meningkat di setiap awal tahun, pasca berakhirnya HBKN Natal dan Tahun Baru.

Pada triwulan I 2021, *inflow* meningkat dan *outflow* melambat. *Inflow* atau aliran uang masuk ke Bank Indonesia pada triwulan I 2021 tercatat sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh sebesar 6,64% (yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 24,77% (yoy). Sementara itu, *outflow* atau aliran uang keluar dari Bank Indonesia pada triwulan I 2021 sebesar Rp0,33 triliun atau terkontraksi 42,02% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 2,91% (yoy). Melambatnya *outflow* di triwulan laporan karena masih tingginya likuiditas di masyarakat pasca terjadi *net outflow* di triwulan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi Tunai di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.2. Perkembangan Inflow dan Outflow Transaksi Tunai Provinsi NTT

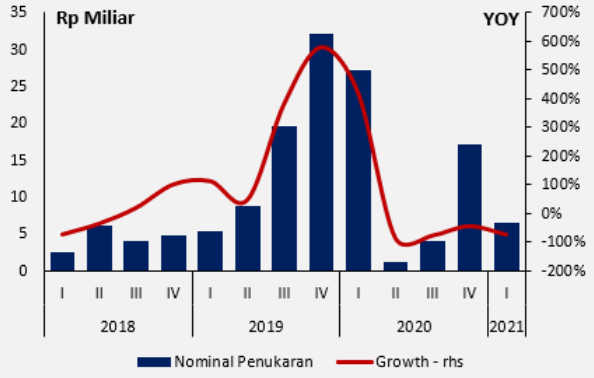
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas di Provinsi NTT

Secara umum, layanan kas di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 mengalami penurunan. Layanan penukaran yang dilakukan di loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada triwulan I 2021 mencapai Rp6,55 miliar. Jumlah penukaran tersebut terkontraksi 75,82% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 46,59% (yoy). Sementara itu, layanan kas keliling masih belum dapat dilaksanakan sebagai upaya mitigasi penyebaran COVID-19.

5.2.2.1. Layanan Kas Titipan

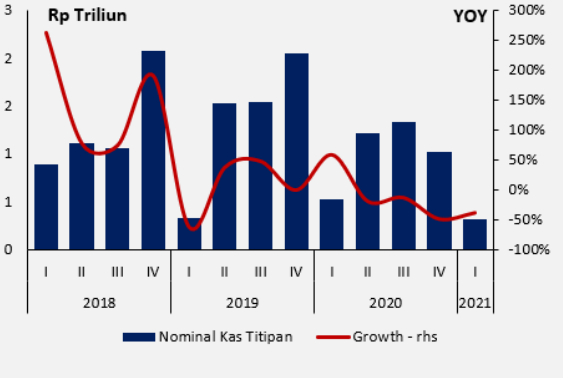
Pada triwulan I 2021, pengiriman uang layak edar ke kas titipan di NTT tercatat mencapai Rp0,31 triliun. Jumlah pengiriman tersebut terkontraksi 39,53% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 49,86%

(yoy). Kondisi gelombang laut yang berangsur membaik mendukung kelancaran pengiriman uang ke kas titipan melalui jalur laut.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.3. Perkembangan Layanan Penukaran Bank Indonesia Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.4 Perkembangan Pengiriman Uang Kepada Kas Titipan Provinsi NTT

5.2.2.2. Uang Tidak Layak Edar

Pada triwulan I 2021, *inflow* yang masuk ke KPwBI Provinsi NTT dalam bentuk Uang Tidak Layak Edar (UTLE) mengalami penurunan. Nominal UTLE yang masuk tercatat sebesar Rp720 miliar, atau tumbuh sebesar 4,19% (yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 27,58% (yoy) atau sebanyak Rp852 miliar. Penarikan UTLE melalui setoran perbankan merupakan salah satu upaya *clean money policy* untuk menjaga kualitas uang yang berada di masyarakat.



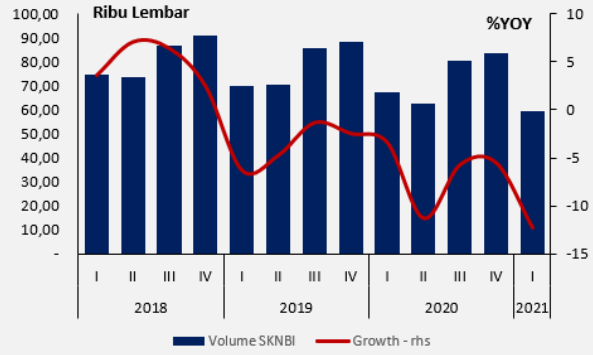
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5. Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar Bank Indonesia Provinsi NTT

5.2.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai di Provinsi NTT

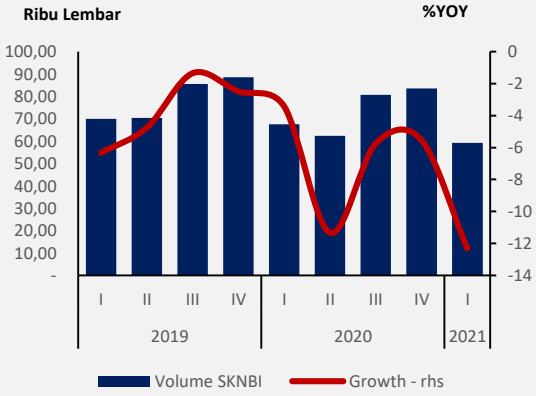
5.2.3.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi NTT

Pada triwulan I 2021, penggunaan transaksi kliring di Provinsi NTT mengalami penurunan. Berdasarkan volume, transaksi kliring pada triwulan I 2021 mencapai 59,23 ribu lembar atau terkontraksi sebesar 12,32% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi sebesar 5,54% (yoy). Nominal kliring di Provinsi NTT pada triwulan I 2021 tercatat sebesar Rp2,80 triliun, terkontraksi 4,38% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,97% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.7. Perkembangan Nilai Nominal Transaksi SKNBI di Provinsi NTT

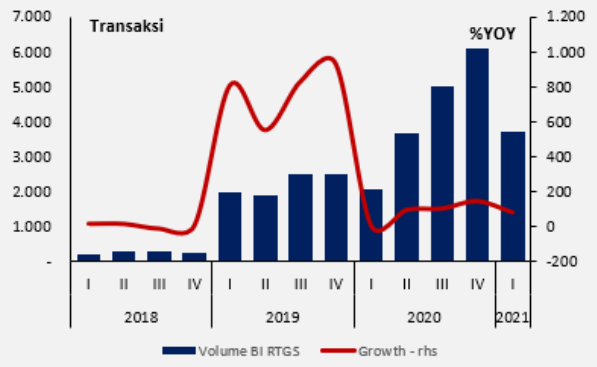


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.8. Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi NTT

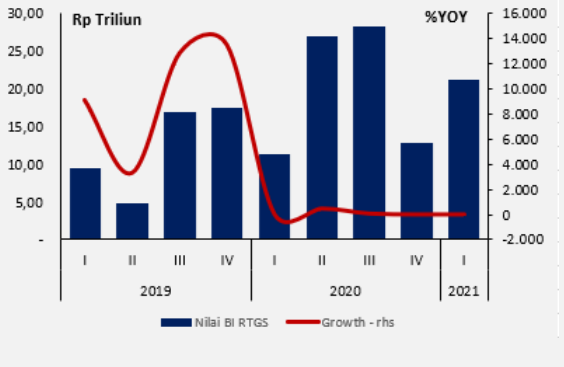
5.2.3.2. Transaksi BI RTGS di Provinsi NTT

Nominal transaksi BI RTGS meningkat hingga mencapai Rp21,14 triliun atau tumbuh 0,85% (yoy). Pertumbuhan ini lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,27% (yoy). Pertumbuhan nominal transaksi BI RTGS sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi Provinsi NTT di triwulan I 2021. Berdasarkan volume, transaksi BI RTGS mencapai 3.702 transaksi atau tumbuh 80,23% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 143,76% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.9. Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS



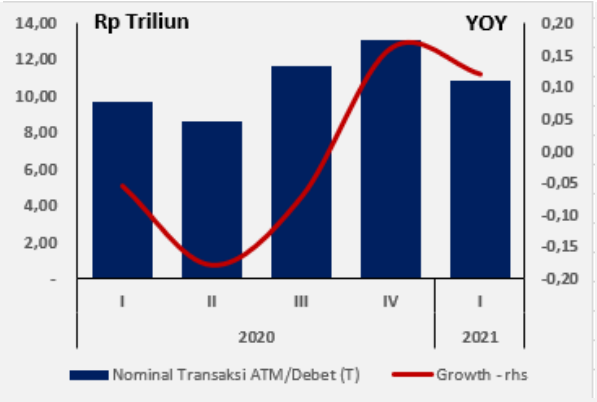
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.10. Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS

5.3. Perkembangan Inklusi Keuangan dan Upaya Elektronifikasi

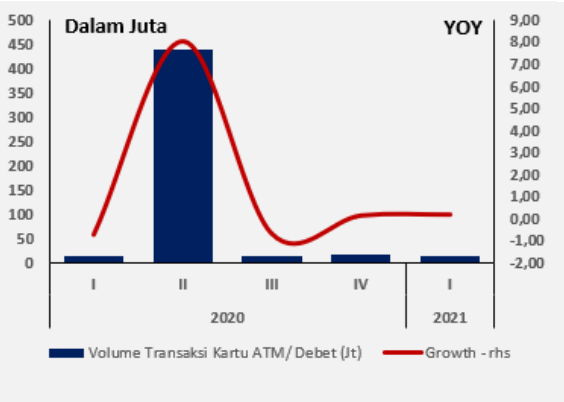
5.3.1. Perkembangan APMK di Provinsi NTT

Ekspansi kartu ATM/Debet di triwulan I 2021 mencapai 2,43 juta kartu atau tumbuh 22,98% (yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,12% (yoy). Sejalan dengan ekspansi kartu yang meningkat, volume transaksi kartu ATM/Debet di triwulan I 2021 tumbuh 17,64% dan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Meningkatnya ekpansi dan volume transaksi kartu APMK menunjukkan peningkatan akseptansi dan preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen non tunai. Akan tetapi, nominal transaksi ATM/Debet pada triwulan I 2021 tumbuh 11,9% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya.



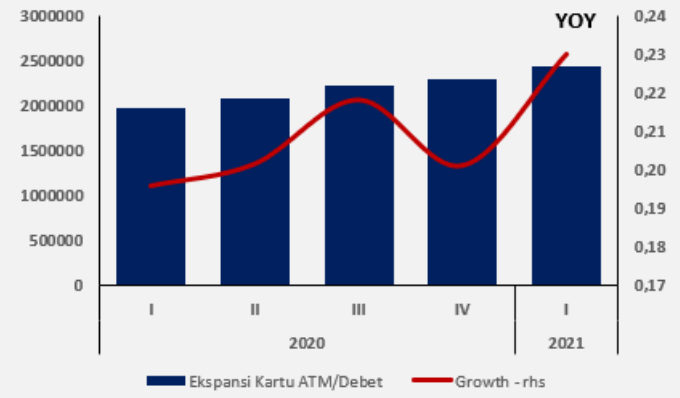
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.11 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/ Debet di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

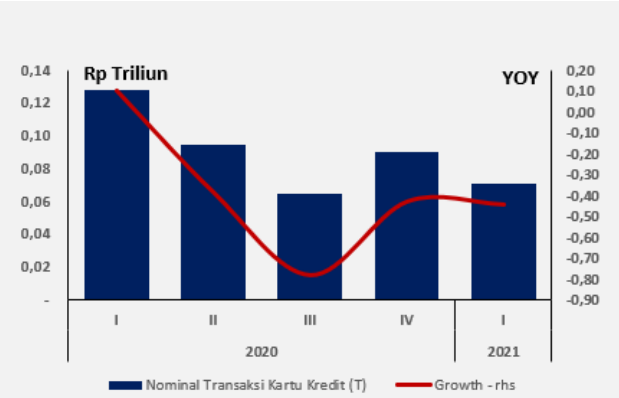
Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/ Debet di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

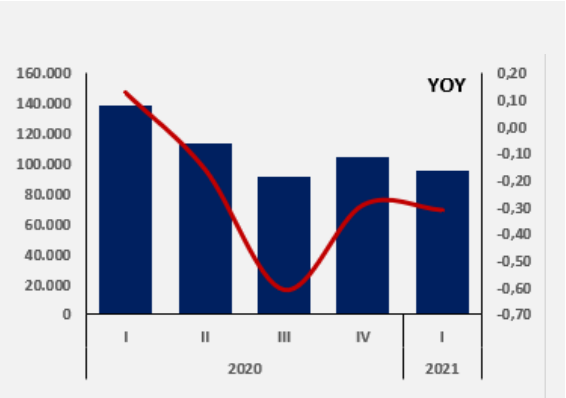
Grafik 5.13 Perkembangan Ekspansi Kartu ATM/ Debet di Provinsi NTT

Nominal dan volume transaksi kartu kredit di triwulan I 2021 terkontraksi lebih dalam. Kontraksi nominal dan volume transaksi kartu kredit masing-masing sebesar 44,4% (yoy) dan 31,3% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya. Perlambatan transaksi kartu kredit sejalan dengan melambatnya penyaluran kredit konsumsi khususnya kredit konsumsi rumah tangga di triwulan laporan. Daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya menjadi pendorong perlambatan transaksi kartu kredit.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.14 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.15 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.16 Perkembangan Ekspansi Kartu Kredit di Provinsi NTT

5.3.2. Perkembangan Transaksi Elektronik di Provinsi NTT

Transaksi Uang Elektronik (UE) di Provinsi NTT mengalami peningkatan baik dari nominal dan volume. Pada triwulan I 2021, nominal transaksi UE di triwulan I tercatat sebesar Rp57,14 miliar atau tumbuh 512% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, volume transaksi UE tercatat sebesar 251.051 transaksi, tumbuh sebesar 479% (yoy). Meningkatnya transaksi UE baik secara nominal dan volume secara signifikan seiring dengan penerapan PPKM di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT pada triwulan I 2021.



Sumber: Bank Indonesia

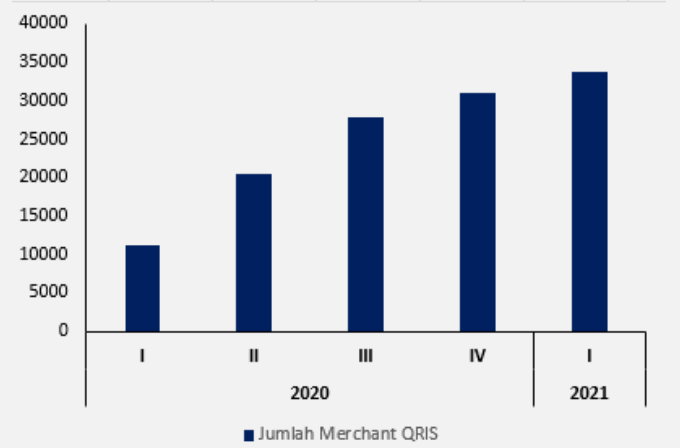
Grafik 5.17. Perkembangan Nominal Transaksi Elektronik di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.18. Perkembangan Volume Transaksi Elektronik di Provinsi NTT

Jumlah *merchant Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) terus meningkat. Pada Maret 2021, tercatat sebanyak 33.733 *merchant* sudah menggunakan QRIS sebagai alternatif transaksi pembayaran. Jumlah tersebut meningkat sebesar 202% (yoy) dan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Upaya KPwBI Provinsi NTT dalam meningkatkan akseptansi QRIS dilakukan baik dari sisi *supply* (jumlah *merchant* yang menggunakan QRIS) maupun dari sisi *demand* (kesadaran masyarakat akan adanya QRIS). Dengan meningkatnya jumlah *merchant* QRIS, masyarakat diharapkan semakin terbiasa dengan transaksi elektronik yang bersifat nirsentuh untuk mengurangi risiko terjangkit penyakit di masa pandemi.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.19. Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di Provinsi NTT

5.3.3. Upaya Elektronifikasi

Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi NTT terus meningkatkan cakupan elektronifikasi di daerah masing-masing. Hal tersebut sebagai wujud komitmen Pemerintah di Daerah untuk mendorong optimalisasi penerimaan dan tranparansi. Sampai dengan triwulan I 2021, terdapat 9 Pemerintah Daerah di Provinsi NTT yang telah memiliki Peraturan Daerah yang memuat mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) Pemerintah Daerah lainnya.

Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi NTT terus meningkatkan elektronifikasi di daerah masing-masing. Hal tersebut sebagai wujud komitmen Pemerintah di Daerah untuk mendorong optimalisasi dan tranparansi penerimaan. Saat ini, terdapat 9 Pemerintah Daerah di Provinsi NTT yang telah memiliki Peraturan Daerah yang memuat mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Dalam rangka memperkuat koordinasi antar stakeholder, pada triwulan 1 2021 telah dibentuk 4 Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) oleh Pemda di wilayah NTT. Sementara 19 Pemda lainnya sedang tahap persiapan pembentukan TP2DD di masing-masing wilayah kerjanya. Keberadaan TP2DD di masing-masing daerah diharapkan mampu mengakselerasi elektronifikasi transaksi khususnya transaksi Pemerintah Daerah.

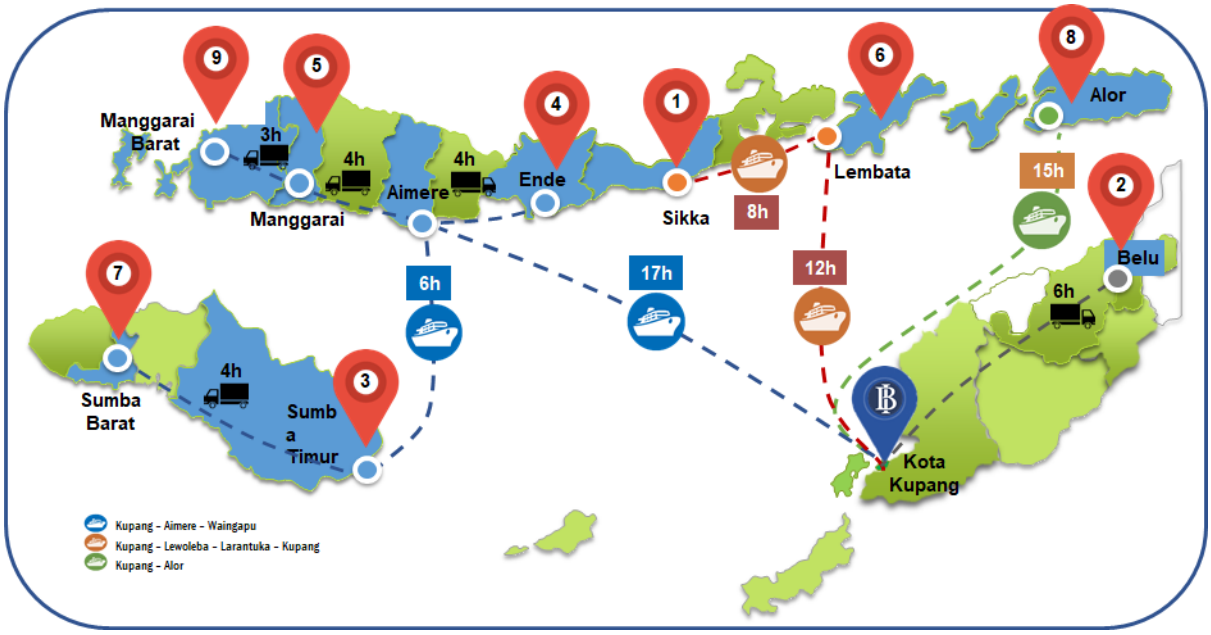
5.4. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

5.4.1. Sistem Pembayaran Tunai

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Bank Indonesia memberikan layanan kas kepada masyarakat dan perbankan. Kegiatan layanan kas tersebut dalam bentuk layanan penukaran, layanan kas keliling dan layanan kas titipan. Layanan penukaran uang di KPwBI Provinsi NTT dilakukan melalui loket penukaran di Kantor Bank Indonesia pada setiap hari Kamis. Sementara itu, layanan kas keliling pada triwulan I 2021 belum dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi penyebaran COVID-19

KPwBI Provinsi NTT memiliki 9 (sembilan) kas titipan yang tersebar di 9 Kabupaten di Provinsi NTT. Kas titipan merupakan layanan penyediaan uang milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank untuk mencukupi persediaan kas bank-bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyaknya jumlah kas titipan di wilayah NTT tersebut sebagai wujud komitmen Bank Indonesia untuk menjamin ketersediaan uang bagi masyarakat dan perbankan, khususnya yang lokasinya cukup jauh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

Gambar Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia di Provinsi NTT



5.4.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

KPwBI Provinsi NTT terus melakukan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat di Provinsi NTT agar lebih mengenal intrumen pembayaran non tunai termasuk QRIS. Pada triwulan I 2021, KPwBI NTT melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan komunitas masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan akseptansi terhadap QRIS. Pembayaran menggunakan QRIS sangat sesuai di tengah pandemi COVID 19 karena dapat dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa sentuh. Kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS berdampak pada terus meningkatnya jumlah merchant QRIS Provinsi NTT di setiap bulannya.

Bab VI.

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

- Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Februari 2021 tercatat sebesar 2,88 juta orang, meningkat 6,99% dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat meningkat menjadi sebesar 3,38%. Meskipun demikian, kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Agustus 2020.
- Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan I 2021 tercatat masih rendah sebesar 94,65. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2020 tercatat sebesar 21,21%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

6.1 Kondisi Umum

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi NTT menurun sebagai dampak pandemi COVID-19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat sebesar 3,38%, lebih tinggi dibandingkan Februari tahun 2020 sebesar 2,64%. Meskipun demikian, terdapat tanda-tanda perbaikan kondisi ketenagakerjaan, tercermin dari data pekerja terdampak COVID-19 yang berkurang dibandingkan dengan Agustus 2020. Sementara itu, tingkat kesejahteraan menurun, tercermin dari rasio kemiskinan yang meningkat menjadi sebesar 21,21% pada September 2020. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) juga masih rendah, dengan NTP pada triwulan I 2021 yang sebesar 94,65.

6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan

TPT Provinsi NTT pada Februari 2021 tercatat sebesar 3,38% (0,10 juta orang), mengalami peningkatan dari Februari 2020 yang sebesar 2,64% (0,08 juta orang), sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Namun demikian, kondisi TPT Provinsi NTT pada Februari 2021 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang sebesar 6,26%. Secara spasial, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedua dengan TPT yang paling rendah setelah Provinsi Sulawesi Barat dengan TPT sebesar 3,28%.

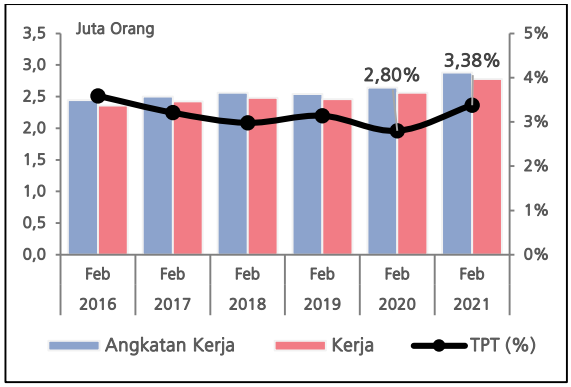
Sampai dengan Februari 2021, terdapat 308 ribu pekerja yang masih terdampak COVID-19. Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan Agustus 2020 di mana terdapat 373 ribu pekerja yang terdampak COVID-19. Bila dilihat lebih detail, jumlah pengangguran karena COVID-19 menurun sebesar 55%. Sementara itu, jumlah pekerja yang jam kerjanya berkurang karena COVID-19 menurun sebesar 18%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTT akan membaik di masa yang akan datang.

Tabel 6.1. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020 s.d. Februari 2021

Komponen	Agustus 2020	Februari 2021	Perubahan Agu '20 - Feb '21	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
a. Pengangguran karena COVID-19	13,76	6,19	-7,57	-55%
b. Bukan Angkatan Kerja karena COVID-19	4,98	4,08	-0,90	-18%
c. Sementara tidak bekerja karena COVID-19	16,50	19,94	3,44	21%
d. Pekerja yang jam kerjanya berkurang karena COVID-19	337,98	277,83	-60,15	-18%
TOTAL	**373,22**	**308,04**	**-65,18**	**-17%**

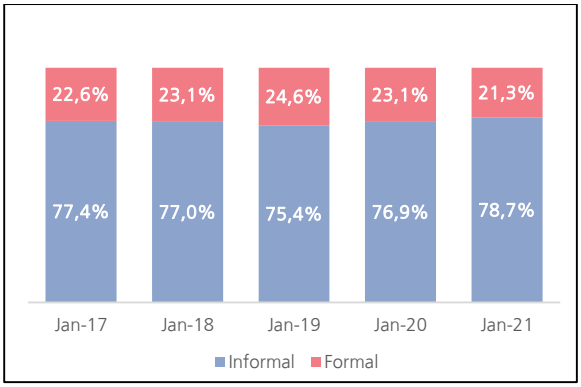
Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Februari 2021 tercatat sebesar 73,29%, menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 73,91%. Meskipun jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan, meningkatnya tingkat pengangguran berdampak pada TPAK yang menurun. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 tercatat sebesar 2,88 juta orang, meningkat dari Februari 2020 yang sebesar 2,86 juta orang. Bila dilihat berdasarkan gender, penurunan TPAK terutama bersumber dari pekerja laki-laki. TPAK laki-laki pada Februari 2021 tercatat sebesar 81,84%, menurun dibandingkan Februari 2020 sebesar 83,10%. Sementara itu, TPAK perempuan pada Februari 2021 tercatat sebesar 65,03%, relatif tidak berubah dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 65,04%.



Sumber: BPS

Grafik 6.1. Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi NTT



Sumber: BPS

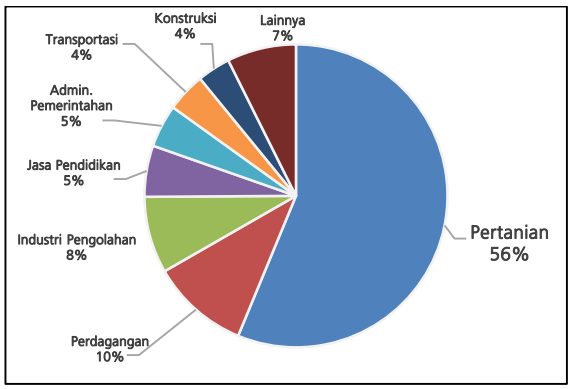
Grafik 6.2. Perkembangan Status Tenaga Kerja Provinsi NTT

Lapangan kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pada Februari 2021, terdapat 2,19 juta penduduk yang bekerja di sektor informal, atau sebesar 78,7% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Jumlah pekerja di sektor informal tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,65% (yoy) dibandingkan Februari 2020. Banyaknya penduduk yang bekerja pada kegiatan informal umumnya dikarenakan persyaratan yang cukup mudah, salah satunyatidak diperlukannya latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan tertentu. Kondisi ini sejalan dengan profil penduduk bekerja di Provinsi NTT yang sebagian besar merupakan lulusan SD (51,14%).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih mendominasi pangsa tenaga kerja di Provinsi NTT. Terdapat 1,57 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, atau mencapai 56% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian Provinsi NTT secara keseluruhan. Berdasarkan data PDRB Provinsi NTT triwulan I 2021, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pangsa sebesar 29,4% dari ekonomi Provinsi NTT.

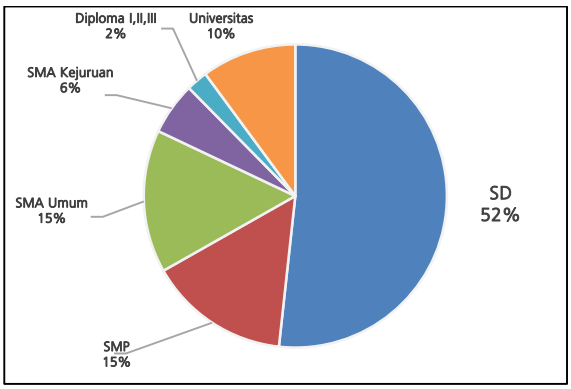
Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja di Provinsi NTT pada Februari 2021 merupakan lulusan SD. Pekerja dengan pendidikan SD tercatat sebanyak 1,44 juta, atau sebesar 52% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kemudian, pekerja dengan pendidikan SMP tercatat sebanyak 0,42 juta, atau sebesar 15% dari total

tenaga kerja. Pekerja dengan pendidikan SMA tercatat sebanyak 0,42 juta, atau sebesar 15% dari total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja dengan pendidikan Diploma dan Sarjana masih terbatas, dengan jumlah masing-masing sebanyak 60 ribu orang (2%) dan 280 ribu orang (10%). Ke depan, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi NTT melalui peningkatan pendidikan.



Sumber: BPS

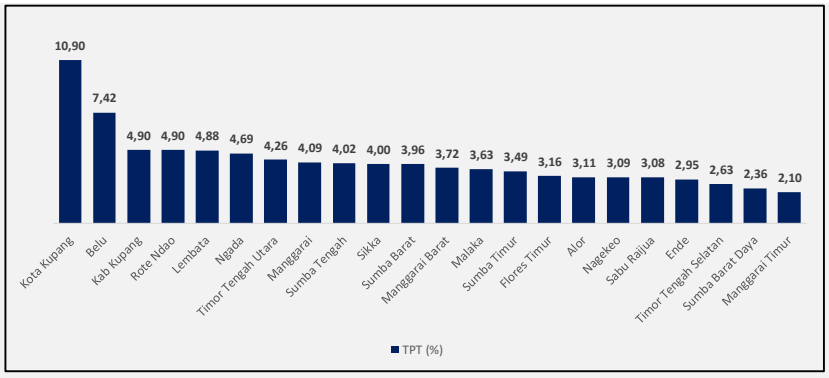
Grafik 6.3. Pangsa Lapangan Usaha Tenaga Kerja NTT Per Februari 2021



Sumber: BPS

Grafik 6.4. Pangsa Pendidikan Terakhir Tenaga Kerja NTT Per Februari 2021

Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 10,90%. Hal tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Belu yakni sebesar 7,42%, sedangkanTPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur yang sebesar 2,10%. Pada Agustus 2020, seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT mengalami peningkatan TPT dibandingkan Agustus 2019 sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja.

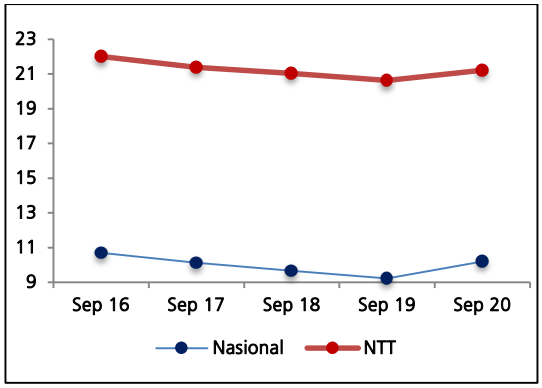


Sumber: BPS

Grafik 6.3. TPT Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Per Agustus 2020

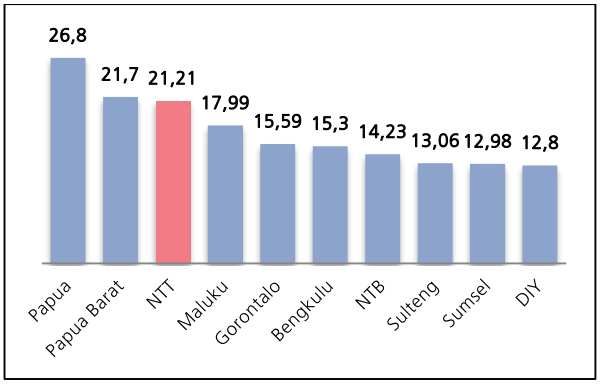
6.3 Perkembangan Kesejahteraan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 21,21% atau sejumlah 1,17 juta orang, meningkat dibandingkan September 2019 yang sebesar 20,62% (1,13 juta orang). Kemiskinan di Provinsi NTT sejalan dengan kondisi Nasional yang juga mengalami kenaikan menjadi 10,19% (27,55 juta orang) dari sebelumnya 9,22% (24,79 juta orang) pada September 2019. Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (26,80%) dan Papua Barat (21,70%). Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Namun, *outbreak* COVID-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi yang pada ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS

Grafik 6.4. Perkembangan Persentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional

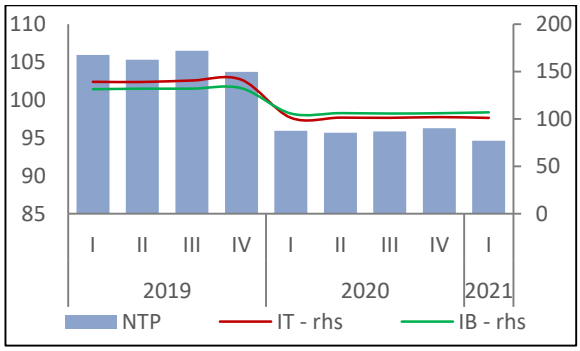


Sumber: BPS

Grafik 6.5. Sepuluh Provinsi Dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi Per September 2020

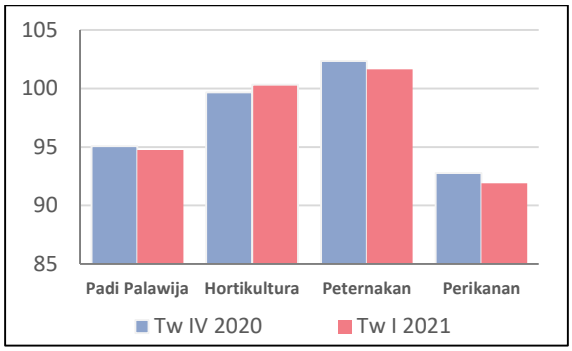
Tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP), mengalami penurunan. NTP Provinsi NTT pada triwulan I tercatat sebesar 94,65, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 96,27. NTP yang tercatat di bawah indeks 100 mengindikasikan bahwa harga bahan baku yang dibayar oleh petani untuk produksi lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima dari penjualan produk. Bila dilihat lebih rinci, indeks yang dibayar (IB) tercatat sebesar 106,95, lebih tinggi dari indeks yang diterima (IT) sebesar 101,23. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang

dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Bila dilihat berdasarkan subsektor, pertanian hortikultura dan peternakan mencatat NTP di atas 100, dengan masing-masing sebesar 100,33 dan 101,65. Di sisi lain, subsektor padi palawija dan perikanan masih mencatatkan NTP di bawah 100, dengan masing-masing sebesar 94,75 dan 91,89.



Sumber: BPS

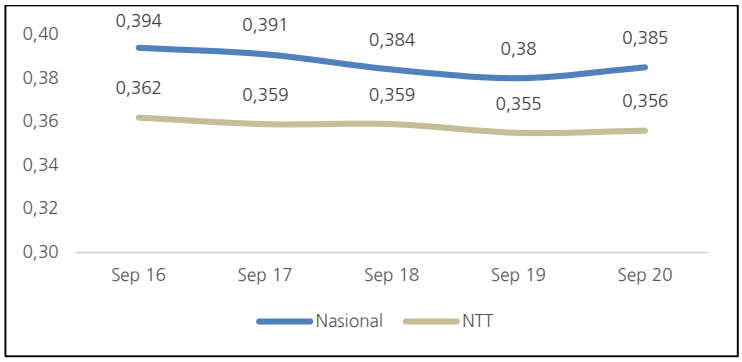
Grafik 6.6. Perkembangan NTP Provinsi NTT



Sumber: BPS

Grafik 6.7. NTP Provinsi NTT Berdasarkan Subsektor

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT yang tercermin dari rasio gini relatif stabil. Rasio gini pada September 2020 tercatat 0,356, relatif stabil dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 0,355. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional yang tercatat memiliki rasio gini sebesar 0,385. Secara umum, rasio gini yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.



Sumber: BPS

Grafik 6.8. Perkembangan Rasio Gini Provinsi NTT

Bab VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0.83% (yoy). Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 ditopang oleh peningkatan investasi, perbaikan kinerja konsumsi masyarakat, serta percepatan peran fiskal sebagai *countercyclical*. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan didorong oleh LU utama kecuali LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sedikit tertahan akibat dampak dampak badai siklon Seroja.

- Pada akhir tahun 2021, inflasi Provinsi NTT diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi tahun 2020 sebesar 0,61% (yoy). Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat terutama didorong oleh membaiknya permintaan domestik seiring dampak kebijakan PEN, peningkatan aktivitas ekonomi pasca vaksinasi, serta keyakinan konsumen yang meningkat. Sementara itu, Siklon Seroja pada awal April 2021 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kerusakan lahan pertanian, kematian binatang ternak, kerusakan kapal tangkap, dan kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu dan tempe.

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 3,18% – 4,18%, meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0.83% (yoy). Kinerja perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 ditopang oleh investasi dan keberlanjutan pengerjaan konstruksi dan infrastruktur pemerintah, kinerja konsumsi masyarakat sejalan dengan program vaksinasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi, serta percepatan peran fiskal sebagai *countercyclical*. Kegiatan vaksinasi tahap pertama di Provinsi NTT telah dimulai sejak 15 Januari 2021 kepada tenaga kesehatan dengan sasaran sebanyak 32.221 orang. Sampai dengan 23 Mei 2021, pemberian vaksin dosis pertama kepada tenaga kesehatan telah mencapai 107%, dan penyuntikan dosis kedua mencapai 98%. Vaksinasi terhadap pelayan publik dengan sasaran sebesar 402,222 orang, dan sasaran vaksinasi terhadap lansia sebesar 443,409 orang juga telah dilakukan dengan capaian vaksinasi dosis kedua masing-masing sebesar 16% dan 2%. Kegiatan vaksinasi diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih secara perlahan dan membentuk *herd immunity*. Sementara itu, keberlanjutan pembangunan proyek investasi pada tahun 2021 diperkirakan meningkat, didukung oleh berlanjutnya pembangunan PSN (Program Strategis Nasional), pinjaman

infrastruktur kepada PT. SMI sebesar Rp. 1,01 T[1], optimisme pelaku usaha pasca adaptasi kebiasaan baru serta kenaikan pagu belanja modal pemerintah. Sementara itu, kinerja sektor eksternal diperkirakan meningkat didorong oleh perbaikan ekonomi global yang diproyeksikan oleh IMF mencapai 6% pada tahun 2021[2], peningkatan kinerja negara mitra dagang utama (antara lain Timor Leste, dan Vietnam) serta pemulihan akses perdagangan antarnegara dan antardaerah setelah dilakukan pelonggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Adapun badai siklon Seroja yang terjadi di Prov. NTT pada tanggal 4-5 April 2021 menyebabkan kerusakan terhadap berbagai infrastruktur termasuk perumahan warga, dan korban jiwa sebanyak 181 orang pada 21 Kab/Kota, sehingga mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat akibat kerusakan terhadap aset dan penurunan nilai kekayaan dan berpotensi menahan kinerja konsumsi. Bencana juga berdampak pada akses yang mengalami kerusakan, seperti jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya yang berisiko menahan kinerja perdagangan antar daerah Provinsi NTT. Sampai dengan 18 April 2021, terdapat 2.687 kerusakan Fasilitas umum yang harus segera ditindaklanjuti.

Kasus positif COVID-19 di Provinsi NTT mulai terkendali, tercermin dari peta zona risiko yang menunjukkan tidak ada kota/kab yang berisiko tinggi (zona merah) sejak bulan Mei 2021. Pemetaan profil risiko COVID-19 di Provinsi NTT menunjukkan tidak ada kabupaten/kota yang berada pada zona merah atau berisiko tinggi. Akan tetapi, terdapat 8 kabupaten/kota berisiko sedang dan 14 kabupaten lainnya berisiko rendah. Mulai 13 Januari 2021[3], Pemerintah Kota Kupang menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya mencegah penyebaran transmisi lokal COVID-19 di Kota Kupang. Penerapan PPKM juga dilaksanakan di Kab. Manggarai Barat periode 25 Maret 2021 sampai 5 April 2021[4], serta Kab. Sumba Timur mulai tanggal 16 Januari 2021[5] sampai sekarang. Pembatasan ini dilakukan dalam rangka mengendalikan dan meminimalisir penularan transmisi local COVID-19 yang menjadi faktor risiko pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT.

[1] Surat Kepala Dinas PUPR Prov. NTT No. PUPR.SKT.05.01/900/360/IX/2020 perihal Tambahan Usulan Pemanfaatan Dana Pinjaman PT. SMI (PEN) Tahun 2021.
[2] IMF World Economic Outlook: April 2021
[3] Surat Edaran Walikota Kupang Nomor 006/HK.188.45.443.1/II/2021
[4] Surat Edaran Bupati Manggarai Barat Nomor Kesra.460/55/III/2021
[5] Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor Kesra.400/104/I/2021

Tabel 7.1.Profil Risiko COVID-19 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

PROFIL RISIKO	KABUPATEN/KOTA
Risiko Sedang	Kota Kupang, Ngada, Lembata, Sumba Timur, Manggarai, Kupang, Ende, Manggarai Barat, Sumba Tengah
Risiko Rendah	Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Malaka, Flores Timur, Sumba Barat, Alor, Sabu Raijua, Timur Tengah Utara, Sikka, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Belu, Nagekeo

Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, data 26 Mei 2021

Meningkatnya kinerja ekonomi empat LU utama di Provinsi NTT diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh curah hujan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring musim penghujan yang dimulai sejak bulan November 2020[6], implementasi program pemerintah seperti TJPS, serta rencana pinjaman non infrastruktur kepada PT. SMI sebesar Rp491,78 miliar untuk pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan. Disamping itu, pembangunan *food estate* di Sumba Tengah dengan target luas lahan sebesar 10.000 ha pada tahun 2021, dan penambahan *food estate* di Kab. Belu seluas 380-1000 ha diperkirakan dapat mendorong kinerja LU Pertanian secara keseluruhan tahun 2021. Akan tetapi badai siklon Seroja yang melanda Provinsi NTT pada tanggal 4-5 April 2021, berdampak terhadap kerusakan lahan subsektor tanaman bahan makanan (tabama)[7] mencapai 23,5 ribu Ha padi dan 13,96 ribu Ha jagung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan di tengah musim panen raya pada Tw. II tahun 2021. Pada subsektor peternakan terdapat 45,1 ribu ekor ternak hilang (terdiri dari 14 ribu ternak besar dan 31,1 ribu ternak kecil) sementara di sisi subsektor perikanan sebanyak 602 kapal mengalami kerusakan berat (537 unit memiliki kapasitas 1-10GT dan 65 unit memiliki kapasitas 10-30 GT) dan 2.000 ton rumput laut terdampak bencana.

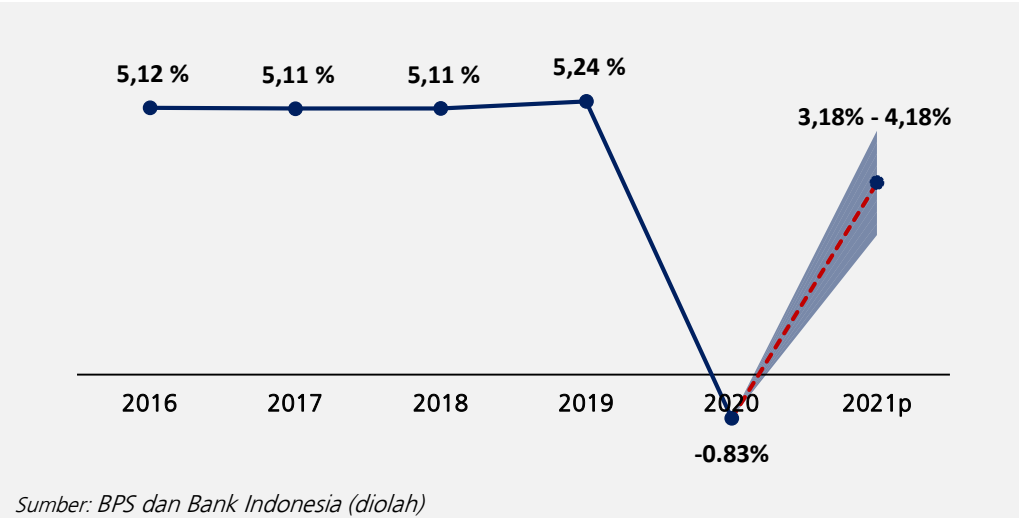
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga diperkirakan membaik pada tahun 2021 seiring pembukaan akses perdagangan baik luar negeri maupun antardaerah, didukung dengan ekspektasi positif pelaku usaha dan

[6] Keterangan BMKG NTT pada bulan September 2020
[7] Keterangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tanggal 5 Mei 2021

rumah tangga terkait COVID-19 yang semakin terkendali. Sementara itu, pelonggaran PPKM[8] terhadap pembukaan aktivitas perdagangan dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, penambahan jam dan kapasitas operasional, serta pembatasan kegiatan pengunjung restoran untuk mitigasi risiko penularan COVID-19. Rusaknya akses jalan dan jembatan setelah terjadinya badai siklon Seroja di 21 Kab/Kota di Provinsi NTT menghambat aktivitas perdagangan, jalur distribusi, serta produksi sektor manufaktur dan jasa yang terhambat akibat terbatasnya pasokan listrik berpotensi menahan kinerja LU Perdagangan di Tahun 2021.

LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib diperkirakan meningkat, sejalan dengan kenaikan pagu belanja APBN dan APBD Pemerintah di Provinsi NTT pada tahun 2021 dan juga akselerasi belanja produktif untuk pemulihan ekonomi sebagai katalisator aktivitas ekonomi daerah[9]. Kinerja LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya proyek pengembangan DPSP Labuan Bajo baik infrastruktur (jalan, Bandara Komodo, pelabuhan *multipurpose*, dan pengolahan air) serta penataan kawasan wisata akan mendorong sektor konstruksi secara keseluruhan. Disamping itu, pengerjaan jalan provinsi melalui skema pembiayaan pinjaman daerah PT. SMI tahun 2020 (Rp189,7 miliar) ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2021. Pada Tahun 2021, pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Provinsi NTT juga terus berlanjut, Provinsi NTT mengajukan pinjaman infrastruktur kepada PT SMI dalam rangka PEN sebesar Rp1,01 triliun untuk pembenahan jalan provinsi 516,47 km, pembangunan embung 22 unit dan pengembangan SPAM. Disamping itu, pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo juga menjadi faktor pendorong LU Konstruksi pada keseluruhan tahun 2021.

[8]SE Walikota Kupang Nomor 006/HK.188.45.443.1/II/2021 tanggal
[9] Keterangan DJPb dalam Kajian Fiskal Regional Prov. NTT Mei 2021



Sumber: BPS dan Bank Indonesia (diolah)

Grafik 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021

7.2 Prospek Inflasi Provinsi NTT Tahun 2021

Pada akhir tahun 2021, inflasi Provinsi NTT diperkirakan mencapai kisaran 2,1% - 3,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2020 yang sebesar 0,61% (yoy). Perkiraan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 masih di dalam kisaran sasaran inflasi nasional yakni 3,00% ± 1,00% (yoy). Dari sisi *demand*, meningkatnya inflasi pada tahun 2021 didorong oleh membaiknya permintaan domestik seiring dampak kebijakan PEN, peningkatan aktivitas ekonomi pasca vaksinasi, serta keyakinan konsumen yang meningkat. Kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan Pemerintah pada awal tahun 2021 juga akan berdampak pada kenaikan harga semua jenis rokok[10]. Sementara itu, siklon Seroja pada awal April 2021 mengakibatkan: (1) kerusakan lahan-lahan pertanian terutama hortikultura, (2) kerusakan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, (3) menyebabkan kematian binatang ternak seperti sapi dan ayam, (4) kerusakan kapal-kapal nelayan untuk menangkap ikan di laut, (5) kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu dan tempe, serta (6) meningkatkan konsumsi bahan-bahan konstruksi untuk perbaikan bangunan.

Dari sisi *supply*, kenaikan harga dipicu oleh *pricing behavior* dari pelaku usaha pasca adaptasi kebiasaan baru antara lain dengan meningkatkan biaya operasional untuk memenuhi standar protokol kesehatan, kompensasi kerugian di tahun 2020, serta pembatasan kapasitas maksimal terutama penumpang angkutan. Tekanan eksternal pada tahun 2021 diperkirakan tetap terjaga, tercermin dari membaiknya prospek

[10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 15 Desember 2020

ekonomi global, nilai tukar terjaga, serta pembatasan perdagangan komoditas bahan makanan yang minimal.



Sumber: BPS dan Bank Indonesia (diolah)

Grafik 7.3. Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Tahun 2021